

**Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II dan
entitas anaknya/*and its subsidiaries***

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen/
*Consolidated financial statements
as of December 31, 2019 and for the year then ended
with independent auditors' report*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-3	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	4-5	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	8-191	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA**

**DIRECTOR'S STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

- | | |
|--|--|
| <p>1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address</p> <p>Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/Residential address/in accordance with personal identity card</p> <p>Nomor telepon/Telephone number
Jabatan/Title</p> | <p>: Arif Suhartono
: Pelabuhan Indonesia II (Persero)
: Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok,
: Jakarta 14310, Indonesia
: Jl. Tunas Kelapa Raya / 167
: RT/RW 005/007 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawa
: Lumbu Kota Bekasi
: Jawa Barat, Indonesia
: 61-21-4301080
: Direktur Utama/President Director</p> |
| <p>2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address</p> <p>Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/Residential address/in accordance with personal identity card</p> <p>Nomor telepon/Telephone number
Jabatan/Title</p> | <p>: Yon Irawan
: Pelabuhan Indonesia II (Persero)
: Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok,
: Jakarta 14310, Indonesia
: Griya Permata Gedangan Blok LI/19
: RT/RW 003/007 Kel. Keboansikep Kec. Gedangan
: Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia
: 61-21-4301080
: Direktur/Director</p> |

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|---|---|
| <p>1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.</p> <p>2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.</p> <p>4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.</p> | <p>1. <i>I responsible for the preparation and presentation of the Company's consolidated financial statements as of December 31, 2019 and for the year then ended.</i></p> <p>2. <i>The Company's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</i></p> <p>3. a. <i>All information has been fully and correctly disclosed in the Company's consolidated financial statements, and</i>
b. <i>The Company's consolidated financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.</i></p> <p>4. <i>I am responsible for the Company's internal control system.</i></p> |
|---|---|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 31 Maret 2020 / March 31, 2020


Arif Suhartono
Direktur Utama/President Director


Yon Irawan
Direktur/Director



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00369/2.1032/AU.1/06/0240-3/1/III/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditors' Report

Report No. 00369/2.1032/AU.1/06/0240-3/1/III/2020

**The Shareholder and the Board of Commissioners and Board of Directors
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00369/2.1032/AU.1/06/0240-3/1/III/2020 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00369/2.1032/AU.1/06/0240-3/1/III/2020 (continued)

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00369/2.1032/AU.1/06/0240-3/1/III/2020 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

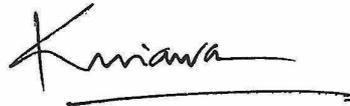
Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00369/2.1032/AU.1/06/0240-3/1/III/2020 (continued)

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II and its subsidiaries as of December 31, 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Muhammad Kurniawan

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0240/Public Accountant Registration No. AP.0240

31 Maret 2020/March 31, 2020

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	Catatan/ Notes	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	15.603.533.329	2c,2d,2f,2u,4 41,42,43,44	18.018.671.479	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	2.596.701.126	2c,2d,2f,2u 5,41,42,43,44	3.836.007.289	Short-term investments
Piutang usaha - neto		2c,2g,2u 6,41,42,43,44		Trade receivables - net
Pihak ketiga	712.826.744		634.078.032	Third parties
Pihak berelasi	135.198.738	2d,41	155.875.322	Related parties
Piutang lain-lain - neto		2g,2u,7,42,43,44		Other receivables - net
Pihak ketiga	45.117.978		9.530.083	Third parties
Pihak berelasi	784.951.419	2d,41	640.168.731	Related parties
Uang muka dan beban dibayar di muka	104.181.981	2i,8 2c,2u,9	120.068.178	Advances and prepaid expenses
Pendapatan masih akan diterima		41,43,44		Accrued revenues
Pihak ketiga	258.865.863		256.914.263	Third parties
Pihak berelasi	46.586.491	2d,41	65.953.809	Related parties
Persediaan	82.940.596	2h,10	59.139.424	Inventories
Pajak dibayar di muka	680.605.067	2s,22a	751.789.998	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	10.253.126	2u,43,44	6.139.521	Other current assets
Total Aset Lancar	21.061.762.458		24.554.336.129	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Investasi jangka panjang	3.211.023.600	2j,11,43,44	3.211.737.431	Long-term investment
Properti investasi - neto	357.295.487	2k,12	377.142.447	Investment properties - net
Aset tetap - neto	13.387.155.835	2l,13	12.628.997.433	Fixed assets - net
Aset kerjasama operasi - neto	461.100.101	2n,14	482.390.189	Joint operation assets - net
Aset pajak tangguhan	73.873.814	2s,22f	47.498.765	Deferred tax assets
Aset takberwujud - neto	10.818.271.480	2o,15	9.038.949.144	Intangible assets - net
Taksiran tagihan restitusi pajak	958.917.154	2s,22a	841.931.567	Estimated claims for tax refund
Aset tidak lancar lainnya	1.711.199.806	2u,16,43,44	249.893.918	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar	30.978.837.277		26.878.540.894	Total Non-current Assets
TOTAL ASET	52.040.599.735		51.432.877.023	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	Catatan/ Notes	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek	34.193.914	17,41,43	4.000.000	Short-term bank loans
Utang usaha		2c,2u		Trade payables
Pihak ketiga	359.929.551	18,42,43,44	418.899.213	Third parties
Pihak berelasi	1.076.552.787	2d,41	1.247.008.500	Related parties
Pendapatan diterima di muka jangka pendek	845.489.224	2d,2q,19	834.098.021	Short-term unearned revenues
Utang pajak	445.015.994	2s,22b	389.495.675	Taxes payable
Beban akrual	2.274.726.626	2u,20,43,44	2.290.832.616	Accrued expenses
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang		2u,43,44		Current maturities of long-term liabilities
Utang bank	12.000	2c,23,42	-	Bank loans
Liabilitas jangka panjang lainnya - pihak berelasi	19.887.737	2c,26	38.272.280	Other long-term liabilities - related parties
Liabilitas jangka pendek lainnya		2u,21,43,44		Other current liabilities
Pihak ketiga	206.170.895		185.350.553	Third parties
Pihak berelasi	91.743.873	2d,41	90.237.622	Related parties
Total Liabilitas Jangka Pendek	5.353.722.601		5.498.194.480	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang obligasi	21.984.178.194	2c,2u,24	22.890.166.969	Bonds payable
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar				Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	114.978.000	2u,43,44	-	Bank loans
Liabilitas jangka panjang lainnya - pihak ketiga	225.013.928		234.402.238	Other long-term liabilities - third party
- pihak berelasi	10.250.000	2c,26,44	-	- related party
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	4.005.631.257	2q,25	4.290.892.916	Long-term unearned revenue
Liabilitas imbalan kerja	1.966.325.908	2t,27	1.776.917.294	Employee benefit liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	254.289.069	2s,22f	307.846.807	Deferred tax liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang	28.560.666.356		29.500.226.224	Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS	33.914.388.957		34.998.420.704	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2019
(Expressed in Thousands Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	Catatan/ Notes	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES AND EQUITY (continued)
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham - nilai nominal				Share capital - par value of
Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham				Rp1,000,000 (full amount) per share
Modal dasar - 4.000.000 saham				Authorized capital - 4,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.444.029 saham	1.444.029.000	28	1.444.029.000	Issued and fully paid - 1,444,029 shares
Modal donasi	26.825.982	29	26.825.982	Donated capital
Tambahan modal disetor	(317.597.475)	2e,33	(317.597.475)	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	13.273.514.540		11.726.994.846	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	2.455.762.802		2.379.261.695	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	(105.008.860)	1e,32	(114.597.288)	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - neto	16.777.525.989		15.144.916.760	Equity attributable to owners of the parent entity - net
Kepentingan nonpengendali	1.348.684.789	2b,30	1.289.539.559	Non-controlling interests
Ekuitas - neto	18.126.210.778		16.434.456.319	Equity - net
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	52.040.599.735		51.432.877.023	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,				
	2019	Catatan/ Notes	2018	
Pendapatan operasi	11.141.752.225	2r,34	11.436.700.894	Operating revenues
Pendapatan konstruksi	1.542.697.617	2r,35	781.658.834	Construction revenues
Beban operasi	(8.520.357.673)	2r,36	(8.042.554.820)	Operating expenses
Beban konstruksi	(1.542.697.617)	2r,35	(781.658.834)	Construction expenses
Pendapatan (beban) operasi lainnya - neto	717.114.514	2r,37	(196.360.574)	Other operating income (expense) - net
LABA USAHA	3.338.509.066		3.197.785.500	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	836.260.112	2r,38	688.914.300	Finance income
Beban keuangan	(1.200.237.089)	2r,39	(1.130.782.016)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi	240.568.343	2j,2n,40	376.200.594	Equity in income of associates
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	3.215.100.432		3.132.118.378	INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX
Beban pajak final	(509.692.491)	22d	(357.113.222)	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	2.705.407.941		2.775.005.156	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN				CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	(259.917.054)	2s 22d,22e	(353.981.768)	Current
Tangguhan	58.319.461	22d,22f	9.686.466	Deferred
LABA TAHUN BERJALAN	2.503.810.348		2.430.709.854	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(68.567.665)	2t,32	32.019.693	Remeasurements of defined benefit plans
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be reclassified to profit or loss
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	254.857.849	1e,32	(18.329.765)	Exchange differences due to financial statements translation
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	(170.053.962)	2f,32	(54.273.223)	Changes in fair value of available-for-sale financial assets
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.520.046.570		2.390.120.559	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended December 31, 2019
(Expressed in Thousands Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	Catatan/ Notes	2018	
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	2.455.762.801		2.379.261.695	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	48.047.547	2b,30	51.448.159	Non-controlling interests
LABA TAHUN BERJALAN	2.503.810.348		2.430.709.854	INCOME FOR THE YEAR
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	2.473.310.918		2.337.030.239	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	46.735.652	2b,30	53.090.320	Non-controlling interests
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.520.046.570		2.390.120.559	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	1.700.633	2v	1.647.655	BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Equity attributable to owners of the parent entity												
Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Modal donasi/ Donation capital	Tambah modal disetor/ Additional paid- in capital	Saldo laba/Retained earnings		Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income			Neto/ Net	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests	Ekuitas - neto/ Equity - net	
				Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Exchange difference due to financial statement translation	Pengukuran kembali program imbangan pasti/ Remeasurements of defined benefit plans	Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual/ Changes in fair value of available for-sale financial assets				
Saldo per 31 Desember 2017	1.444.029.000	26.825.982	(317.597.475)	10.201.069.392	2.179.893.506	391.851.724	(473.163.054)	8.945.498	13.461.854.573	486.063.225	13.947.917.798	Balance as of December 31, 2017
Pembagian dividen kas	31	-	-	-	(653.968.052)	-	-	-	(653.968.052)	-	(653.968.052)	Distribution of cash dividend
Cadangan umum	31	-	-	1.525.925.454	(1.525.925.454)	-	-	-	-	-	-	General reserve
Setoran modal pada entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.386.014	750.386.014	Paid in capital for a subsidiary
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	1e	-	-	-	-	(18.325.578)	-	-	(18.325.578)	(4.187)	(18.329.765)	Exchange difference due to financial statement translation
Pengukuran kembali program imbalan pasti	1e,32	-	-	-	-	-	30.367.672	-	30.367.672	1.652.021	32.019.693	Remeasurements of defined benefit plans
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	1e,32	-	-	-	-	-	-	(54.273.550)	(54.273.550)	(5.673)	(54.279.223)	Changes in fair value of available-for-sale financial assets
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	2.379.261.695	-	-	-	2.379.261.695	51.448.159	2.430.709.854	Income for the year
Saldo per 31 Desember 2018	1.444.029.000	26.825.982	(317.597.475)	11.726.994.846	2.379.261.695	373.526.146	(442.795.382)	(45.328.052)	15.144.916.759	1.289.539.559	16.434.456.319	Balance as of December 31, 2018
Pembagian dividen kas	31	-	-	-	(832.742.000)	-	-	-	(832.742.000)	-	(832.742.000)	Distribution of cash dividend
Cadangan umum	31	-	-	1.546.519.694	(1.546.519.694)	-	-	-	-	-	-	General reserve
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	1e	-	-	-	-	246.899.366	-	-	246.899.366	12.408.373	259.307.739	Exchange difference due to financial statement translation
Pengukuran kembali program imbalan pasti	1e,32	-	-	-	-	-	(67.273.984)	-	(67.273.984)	(1.293.681)	(68.567.665)	Remeasurements of defined benefit plans
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	1e,32	-	-	-	-	-	-	(170.036.954)	(170.036.954)	(17.007)	(170.053.961)	Changes in fair value of available-for-sale financial assets
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	2.455.762.801	-	-	-	2.455.762.801	48.047.547	2.503.810.348	Income for the year
Saldo per 31 Desember 2019	1.444.029.000	26.825.982	(317.597.475)	13.273.514.540	2.455.762.802	620.425.512	(510.069.366)	(215.365.006)	16.777.525.988	1.348.684.790	18.126.210.778	Balance as of December 31, 2019

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	Catatan/ Notes	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	11.677.175.952		10.414.180.403 <i>Cash receipts from customers</i>
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya	(5.642.396.334)		(4.849.497.861) <i>Payment to contractors, suppliers and others</i>
Pembayaran kepada karyawan	(2.609.390.364)		(2.324.087.858) <i>Payment to employees</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(1.995.196.071)		(541.932.045) <i>Payment for income taxes</i>
Penghasilan bunga	719.435.193		604.025.265 <i>Interest received</i>
Pembayaran beban bunga dan keuangan lainnya	(1.025.736.701)		(1.064.789.688) <i>Payment of interest and other financial charges</i>
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.123.891.675		2.237.898.216 Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dividen	281.858.622		272.747.364 <i>Receipt of dividend</i>
Laba penjualan aset tetap	80.629.851		5.442.459 <i>Receipt of dividend</i>
Perolehan aset tetap dan aset takberwujud	(3.312.163.703)		(1.984.667.658) <i>Acquisition of fixed assets and intangible assets</i>
Penerimaan investasi jangka pendek	1.239.306.163		3.163.075.409 <i>Receipt of short-term investments</i>
Penerimaan sewa di muka	124.255.688		318.174.500 <i>Receipt of advance rental fee</i>
Penempatan investasi saham	(787.067.050)		(327.615.532) <i>Placement of investment in shares of stock</i>
Kas Neto (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(2.373.180.429)		1.447.156.542 Net Cash (Used in) Provided by Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya	145.183.914		2.139.397 <i>Receipt of bank loans and other financial institution</i>
Pembayaran dividen	(832.742.000)	31	(653.968.052) <i>Payment of dividend</i>
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(687.558.086)		(651.828.655) Net Cash Used in Financing Activities
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(478.291.310)		778.115.044 Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(2.415.138.150)		3.811.341.147 NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	18.018.671.479	4	14.207.330.332 CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	15.603.533.329	4	18.018.671.479 CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Perusahaan" atau "PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)") pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 15 Tahun 1983 juncto PP No. 5 Tahun 1985. Perum Pelabuhan II merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 tanggal 17 Juni 1993. Sejak terbentuknya Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998, Perusahaan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 09 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. tanggal 21 Agustus 2019 mengenai perubahan jenis saham dan anggaran dasar Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0323035 tanggal 30 Agustus 2019.

Berdasarkan Akta No. 09 tersebut di atas, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("the Company" or "PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)") was initially established as Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II based on Government Regulation No. 15 of 1983 as amended by Government Regulation No. 5 of 1985. It was a State-Owned Enterprise ("SOE") under the supervision of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

Based on Government Regulation No. 57 Year 1991, the legal entity of Perum Pelabuhan II was changed into a State Owned Company (Persero). As result of such government regulation, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established based on Notarial Deed No. 3 of Imas Fatimah, S.H., dated December 1, 1992. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 dated June 17, 1993. Since the establishment of the Ministry of State-Owned Enterprise ("MOSOE"), the Company has been under the supervision of MOSOE. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Shareholders Decision Statement notarized by Notarial Deed No. 09 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated August 21, 2019 regarding change in the types of shares and the Company's Articles of Association. This amendment was registered to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Acceptance of No. AHU-AH.01.03-0323035 dated August 30, 2019.

Based on the Notarial Deed No. 09 as stated above, the Government of the Republic of Indonesia which in this case represented by the Minister of SOEs to changes the type of shares which originally without series, changed to be consisted of Series A Dwiwarna shares and Series B shares.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Selain lingkup usaha tersebut di atas Perusahaan dapat pula mendirikan dan menjalankan usaha lain yang memiliki hubungan dengan usaha kepelabuhanan.

Saat ini, Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Kelompok Usaha") bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi jasa kepelabuhanan, logistik, jasa informasi teknologi, jasa rumah sakit, jasa pengerukan, jasa kepelatihan dan lainnya.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia.

Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan mengelola 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan yang terdiri dari:

Cabang Pelabuhan Utama	Tanjung Priok, Banten dan/and Panjang	Main Port Branch
Cabang Pelabuhan Madya	Teluk Bayur, Pontianak, Palembang, Bengkulu, Jambi dan/and Cirebon	Medium Port Branches
Cabang Pelabuhan Pratama	Pangkal Balam, Sunda Kelapa dan/and Tanjung Pandan	Small Port Branches

Berikut adalah izin-izin penting yang diperoleh Perusahaan sehubungan dengan operasional pelabuhan:

- Keputusan Menteri Perhubungan No. 98 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

The Company's purposes and objectives are managing and operating port services and optimizing resource utilization owned by the Company to produce competitive and high quality goods and/or services to gain profits in order to increase the Company's value by applying the limited liability company principles.

Other than the above-mentioned scope of activities, the Company may establish and manage other businesses related to port business.

Currently, the Company and its subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Company") are involved in several businesses consisting of port services, logistic, information technology services, hospital services, dredging services, training services and others.

The Company's head office is located at Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia.

The Company's parent and ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

The Company manages 12 (twelve) Port Branches as follows:

The following are significant permits obtained by the Company in relation to port operations:

- *Decision of Minister of Transportation No. 98 Tahun 2011 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as Port Operation Entity.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

- Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1121 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.
- Perjanjian konsesi (Catatan 45a dan 46m).

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut:

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	Tahun pendirian/ Year of establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination	
					2019	2018
<u>Kepemilikan Langsung/Direct Ownership</u>						
PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTP")	Jakarta	Terminal Petikemas dan Konvensional/ Container and multicargo Terminal	2013	99,00%	1.762.867.454	1.882.166.289
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia ("PPI")	Jakarta	Pengembangan Pelabuhan/ Port Development	2012	99,89%	1.841.105.049	2.159.484.557
PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")	Jakarta	Jasa Logistik/ Logistic Services	2002	99,00%	884.682.897	898.058.263
PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("JAI") ****)	Jakarta	Penyedia Jasa Transportasi Laut/ Ship Transportation Services Provider	2013	76,89%	1.277.801.802	1.192.128.218
PT Pengerukan Indonesia ("Rukindo")	Jakarta	Pengerukan Alur/ Dredging	1991	99,91%	376.359.505	352.868.336
PT Rumah Sakit Pelabuhan ("RSP")	Jakarta	Rumah Sakit/ Hospital	1999	99,84%	575.930.021	423.222.370
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IKT") ****)	Jakarta	Terminal Kendaraan/ Car Terminal	2012	71,28%	1.262.080.951	1.254.556.394
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS")	Jakarta	Sistem Informasi/ Information System	2012	51,00%	160.100.918	179.025.159
PT Electronic Data Interchange Indonesia ("EDI")	Jakarta	Sistem Informasi/ Information System	1995	51,00%	179.282.586	138.970.919
PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	Jakarta	Penyedia Energi Listrik/ Electricity Provider	2012	55,00%	145.105.432	164.452.796
PT IPC Terminal Petikemas ("IPC TPK")	Jakarta	Terminal Petikemas dan Konvensional/ Container and multicargo Terminal	2013	99,00%	1.099.123.570	1.221.341.130

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

- Decision of Minister of Transportation No. KP 1121 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.
- Concession Agreement (Notes 45a and 46m).

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation

As of December 31, 2019 and 2018, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia ("JPPI")	Jakarta	Jasa Peralatan Pelabuhan/ Port Equipment Services
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia ("PMLI")	Jakarta	Jasa Pelatihan dan Pendidikan Maritim dan Logistik / Maritime and Logistic training and education services
PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")	Jakarta	Investasi pasar modal dan Konsultan bisnis/ Investment in stock exchange and business consultant

Kepemilikan Tidak Langsung/Indirect Ownership

Dimiliki melalui/Owned through PP

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities
PT Akses Pelabuhan Indonesia ("API")	Jakarta	Penyertaan Saham pada proyek Jalan Tol/Investment in Toll and access Road Project
PT Menara Maritim Indonesia ("MMI")	Jakarta	Jasa pengelola properti / Building management service

Entitas Asosiasi/Associate Entities

Dimiliki melalui/Owned through IPC TPK

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities
PT New Priok Container Terminal One ("NPCT1") (Catatan 45d/Note 45d) *)	Jakarta	Terminal Petikemas/ Container Terminal

Dimiliki melalui/Owned through API

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP") (Catatan 11/Note 11) **)	Jakarta	Operasi Jalan Tol/Toll Road Operation
PT Jakarta International Container Terminal ("JICT") (Catatan 46b/Note 46b)	Jakarta	Terminal Petikemas/ Container Terminal
PT Terminal Petikemas Indonesia ("TPI")	Jakarta	Terminal Petikemas/ Container Terminal

Operasi Bersama/Joint Operation

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities
Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja ("TPK Koja") (Catatan 46a/Note 46a)	Jakarta	Terminal Petikemas/ Container Terminal
Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia ("MKO MTKI") (Catatan 46o/Note 46o) ***)	Gresik	Terminal Kendaraan/ Car Terminal

*) Laporan keuangan NPCT1 tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan IPC TPK, karena IPC TPK tidak memiliki pengendalian atas NPCT1. (Catatan 45d)

***) Pada bulan September 2015, API melakukan akuisisi 45% kepemilikan saham di CTP (Catatan 11).

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

Tahun pendirian/ Year of establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination	
		2019	2018
2012	99,00%	157.445.101	143.759.943
2013	99,00%	71.354.014	50.067.630
2017	99,00%	1.036.864.363	1.428.675.682
2014	99,52%	779.593.101	776.783.899
2018	70,00%	357.601.919	88.512.621
2014	51,00%	3.878.213.647	4.326.430.446
2006	45,00%	7.375.640.508	4.217.335.404
1999	48,90%	4.342.577.010	4.712.275.127
2013	25,00%	131.111.708	131.715.920
1994	54,91%	520.428.809	523.023.618
2015	45,00%	4.339.729	3.253.132

*) The financial statements of NPCT1 is not consolidated into IPC TPK's financial statements, due to IPC TPK has no control over NPCT1. (Note 45d)

***) On September 2015, API performed an acquisition of 45% share of ownership in CTP (Note 11).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

- ***) Pada bulan April 2015, IKT membentuk manajemen kerjasama operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia dengan porsi pendanaan 45% (Catatan 46o).
- ****) Pada bulan Desember 2017, JAI menerbitkan saham baru sebanyak 1.215.506.500 saham atau 23% dari modal ditempatkan dan disetor JAI setelah penawaran umum perdana saham JAI di Bursa Efek Indonesia.
- ****) Pada bulan Juli 2018, IKT menerbitkan saham baru sebanyak 509.147.700 saham atau 28% dari modal ditempatkan dan disetor IKT setelah penawaran umum perdana saham IKT di Bursa Efek Indonesia.

EDII

EDII didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1995 dari Notaris Sulami Mustafa, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9572.HT.01.01.TH.95 tanggal 3 Agustus 1995.

Pada tanggal 31 Desember 2016, modal dasar EDII adalah sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 25.000.000 saham atau sebesar Rp25.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 51,00% atau sebanyak 12.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp12.750.000.
- PT Sisindokom Teknologi memiliki 49,00% atau sebanyak 12.250.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.250.000.

Saat ini, EDII bergerak dalam bidang penyediaan data informasi, transfer data, penjualan software dan pelayanan administrasi efek.

MTI

MTI didirikan berdasarkan Akta Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH., No. 15 tanggal 15 Februari 2002. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 April 2002.

Modal dasar MTI sebesar Rp28.500.000 terdiri dari 57.000.000 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 34.629.439 saham atau sebesar Rp17.314.719.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

- ***) On April 2015, IKT establishing joint operation management Maspion Terminal Kendaraan Indonesia with funding portion of 45% (Note 46o).
- ***) On December 2017, JAI issued new shares of 1,215,506,500 shares or 23% of JAI's issued and paid-up capital subsequent to the initial public offering at Indonesia Stock Exchange.
- ****) On July 2018, IKT issued new shares of 509,147,700 shares or 28% of IKT's issued and paid-up capital subsequent to the initial public offering at Indonesia Stock Exchange.

EDII

EDII was established based on Notarial Deed No. 1 dated June 1, 1995 of Sulami Mustafa, S.H and was approved by Minister of Justice in Decree No. C2-9572.HT.01.01.TH.95 dated August 3, 1995.

As of December 31, 2016, the authorized capital of EDII amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp25,000,000 composed of 25,000,000 shares with share ownership as follows:

- The Company owns 51.00% or 12,750,000 shares amounting to Rp12,750,000.
- PT Sisindokom Teknologi owns 49.00% or 12,250,000 shares amounting to Rp12,250,000.

Currently, EDII's activities consist of providing of information data, data transfer, software sales and securities administration services.

MTI

MTI was established based on Notarial Deed of Notary Herdimansyah Chaidirsyah, SH., No. 15 dated February 15, 2002. The establishment of MTI was approved by Minister of Justice and Human Rights in Decree No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 tanggal April 11, 2002.

The authorized capital of MTI amounted to Rp28,500,000 composed of 57,000,000 shares with par value of Rp500 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp17,314,719 composed of 34,629,439 shares.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

MTI (lanjutan)

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah:

- Perusahaan memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 34.283.150 saham dengan nilai nominal Rp17.141.575.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 1,00% atau sebanyak 346.289 saham dengan nilai nominal Rp173.144.

Saat ini, MTI bergerak dalam bidang jasa logistik.

RSP

RSP didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Nelly Elsyeh Tahamata, SH., No. 2 tanggal 1 Mei 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.11876.HT.01.01 tanggal 29 Juni 1999.

Modal dasar RSP sebesar Rp150.000.000 terdiri dari 150.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,84% atau sebanyak 37.452 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.452.000.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,48% atau sebanyak 180 saham dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.

Saat ini, RSP bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya.

IKT

IKT didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 November 2012 oleh Yulianti Irawati, SH., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

MTI (continued)

The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 99.00% or 34,283,150 shares with total amount of Rp17,141,575.
- Koperasi Pegawai Maritim owns 1.00% or 346,289 shares with total amount of Rp173,144.

Currently, MTI's activities are in logistic services.

RSP

RSP was established based on Establishment Notarial Deed of Notary Nelly Elsyeh Tahamata, S.H., No. 2 dated May 1, 1999 and has been approved by Minister of Justice of Republic Indonesia with the Decree No. C.11876.HT.01.01 dated June 29, 1999.

The authorized capital of RSP amounted to Rp150,000,000 composed of 150,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share.

The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.52% or 37,452 shares with total amount of Rp37,452,000.
- Koperasi Pegawai Maritim owns 0.48% or 180 shares with total amount of Rp180,000.

Currently, RSP activities are in health services and other health support services.

IKT

IKT was established based on Notarial Deed No. 10 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, SH., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of IKT was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012 dated November 19, 2012.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

IKT (lanjutan)

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa IKT No. 19 tanggal 18 Juli 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui, jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 30% dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, atau sejumlah sebanyak-banyaknya 557.142.800 saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana IKT, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham, termasuk pengalokasian sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari saham baru yang dikeluarkan dengan program ESA (Employee Stock Option).

Modal dasar IKT sebesar Rp181.838.482 terdiri dari 1.818.384.820 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh IKT adalah sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 71,28% atau sebanyak 1.296.144.749 saham dengan nilai sebesar Rp129.614.475.
- MTI memiliki 0,72% atau sebanyak 13.092.371 saham dengan nilai sebesar Rp1.309.237.
- PII memiliki 5,54% atau sebanyak 100.682.600 saham dengan nilai sebesar Rp10.068.260.
- Masyarakat memiliki 22,46% atau sebanyak 408.465.100 saham dengan nilai sebesar Rp40.486.510.

Saat ini, IKT bergerak dalam bidang pengelolaan terminal kendaraan, bongkar muat barang, pelayanan penumpukan dan pelayanan logistik lainnya.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

IKT (continued)

Based on Deed of Extraordinary General Shareholders Meeting of IKT No. 19 dated July 18, 2018 by Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, the Company's shareholders agreed, amount of shares issued in the context of Public Offering were at most 30% from the issued and paid-up capital after the Public Offering has been completed, or no more than 557,142,800 of new shares offered to the public through the IKT's Initial Public Offering, each with nominal value of Rp100 (full amount) per share, including allocation of at most 10% of new shares issued with the ESA (Employee Stock Option) program.

The authorized capital of IKT amounting Rp181,838,482 consisted of 1,818,384,820 shares with nominal value of Rp100 (full amount) per share. The composition of issued and paid-up capital of IKT are as follow:

- The Company owns 71.28% or 1,296,144,749 shares with total amount of Rp129,615,475.
- MTI owns 0.72% or 13,092,371 shares with total amount of Rp1,309,237.
- PII owns 5.54% or 100,682,600 shares with total amount of Rp10,068,260.
- Public own 22.46% or 408,465,100 shares with total amount of Rp40,486,510.

Currently, IKT's activities consist of car terminal management, stevedoring/ cargodoring, yard operation and other logistic services.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

ILCS

ILCS didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 21 September 2012 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-50211.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 September 2012.

Modal dasar ILCS sebesar Rp400.000.000 terdiri dari 40.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 51,00% atau sebanyak 5.100.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp51.000.000.
- PT Multimedia Nusantara memiliki 49,00% atau sebanyak 4.900.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp49.000.000.

Saat ini, ILCS bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan *e-trade logistic* dan jasa lainnya yang meliputi jasa pengelolaan data, jasa *e-commerce*, konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika, jasa pembuatan perangkat lunak, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi dan jasa konsultan teknologi informasi.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

ILCS

ILCS was established based on Notarial Deed No. 11 dated September 21, 2012 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., M.Kn. The establishment of ILCS was approved by Minister of Law and Human Rights No.AHU-50211.AH.01.01.Tahun 2012 dated September 26, 2012.

The authorized capital of ILCS amounted to Rp400,000,000 composed of 40,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 51.00% or 5,100,000 shares with total amount of Rp51,000,000.*
- PT Multimedia Nusantara owns 49.00% or 4,900,000 shares with total amount of Rp49,000,000.*

Currently, ILCS' activities consist of providing e-trade logistic services and other services including data management, e-commerce, consultation on computing and informatics engineering services, software development services, multimedia provision and utilization through telecommunication hardware and consultation in information technology services.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PPI

PPI didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-57925.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 13 September 2018 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp900.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp225.000.000 yang diambil bagian oleh Perusahaan dan MTI masing-masing sebesar Rp224.750.000 dan Rp250.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.03-0230843 tanggal 9 Agustus 2018.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 38 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 25.000 saham yang ada dalam PPI kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp342.000.

Modal dasar PPI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,89% atau sebanyak 22.475.000 saham dengan nilai sebesar Rp224.750.000.
- PII memiliki 0,11% atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Saat ini, PPI bergerak dalam bidang pengembangan pelabuhan.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PPI

PPI was established based on Notarial Deed No. 9 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU-57925.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 13, 2012.

Based on Deed No. 11 dated September 13, 2018 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company increased the authorized capital to Rp900,000,000 and the issued and fully paid capital to Rp225,000,000 which was subscribed by the Company and MTI amounting to Rp224,750,000 and Rp250,000, respectively. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-AH.01.03-0230843 dated August 9, 2018.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 38 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia transfers and hands over all of the shares owned, which are 25,000 shares in PPI to PII with a buying price of Rp342,000.

The authorized capital of PPI amounted to Rp100,000,000 composed of 10,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.89% or 22,475,000 shares with total amount of Rp224,750,000.*
- PII owns 0.11% or 25,000 shares with total amount of Rp250,000.*

Currently, PPI engages in port development.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

JPPI

JPPI didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-57978.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 38 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 25.000 saham yang ada dalam JPPI kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp227.500.

Modal dasar JPPI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,00% atau sebanyak 2.475.000 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Saat ini, JPPI bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan usaha teknik meliputi pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) serta instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, elektrik dan mekanikal, bejana tekan (*boiler/pressure vessel*), serta bidang usaha terkait.

EPI

EPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-58019.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 14 November 2012.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

JPPI

JPPI was established based on Notarial Deed No. 8 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in Decision No. AHU-57978.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 13, 2012.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 38 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia transfers and hands over all of the shares owned, which are 25,000 shares in JPPI to PII with a buying price of Rp227,500.

The authorized capital of JPPI amounted to Rp100,000,000 composed of 10,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.00% or 2,475,000 shares with total amount of Rp24,750,000.
- PII owns 1.00% or 25,000 shares with total amount of Rp250,000.

Currently, JPPI activities are in providing technical activities including installation, reparation and maintenance and installation of technical tools, installation of equipment for water, gas, telecommunication, electrical and mechanical and boiler/pressure vessel and the related activities.

EPI

EPI was established based on Notarial Deed No. 11 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in Decision No. AHU-58019.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 14, 2012.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

EPI (lanjutan)

Modal dasar EPI sebesar Rp600.000.000 terdiri dari 60.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 55,00% atau sebanyak 8.250.000 saham dengan nilai sebesar Rp82.500.000.
- PT Haleyora Power memiliki 45,00% atau sebanyak 6.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp67.500.000.

Saat ini, EPI bergerak dalam bidang penyedia pasokan energi listrik di wilayah pelabuhan dan sekitarnya.

Rukindo

Rukindo didirikan dengan nama PT Pengerukan Indonesia (Persero) berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 Oktober 1991 dari Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Notaris Imas Fatimah, S.H., yang kemudian diubah dengan Akta No. 51 tanggal 11 Februari 1992 dari Notaris Imas Fatimah, S.H. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 tanggal 3 Maret 1992.

Modal dasar Rukindo sebesar Rp2.000.000.000 terdiri dari 2.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 47 tanggal 28 Desember 2017, para pemegang saham Perusahaan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula berjumlah Rp195.000.000 yang akan dikonversi menjadi modal pada akhir tahun ke-10 (sepuluh). Saham yang diterbitkan sejumlah 195.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

EPI (continued)

The authorized capital of EPI amounted to Rp600,000,000 composed of 60,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 55.00% or 8,250,000 shares with total amount of Rp82,500,000.
- PT Haleyora Power owns 45.00% or 6,750,000 shares with total amount of Rp67,500,000.

Currently, EPI's activities consist of providing electrical supply on port areas.

Rukindo

Rukindo was established under the name of PT Pengerukan Indonesia (Persero) based on Deed No. 2 dated October 1, 1991 of Achmad Bajumi, S.H., a substitute of Notary Imas Fatimah, S.H., which was subsequently amended by Deed No. 51 dated February 11, 1992 of Notary Imas Fatimah, S.H. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 dated March 3, 1992.

The authorized capital of EPI amounted to Rp2,000,000,000 composed of 2,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Based on Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H., No. 47 dated December 28, 2017, the Company's shareholders approved the following matters:

- Increase in the issued and paid capital from Rp195,000,000 which will be converted into capital at the end of 10 (ten) year. The issued shares amounted to 195,000 shares with a par value of Rp1,000,000 (full amount) per share.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Rukindo (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 48 tanggal 28 Desember 2017 yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-AH.01.03-0007913 tanggal 10 Januari 2018, Perusahaan menerima 70.000 saham baru sebagai hasil konversi utang Rukindo kepada Perusahaan. Kepemilikan saham Perusahaan di Rukindo bertambah menjadi 99,93%.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,91% atau sebanyak 806.622 saham dengan nilai sebesar Rp806.622.000.
- PPI memiliki 0,09% atau sebanyak 542 saham dengan nilai sebesar Rp542.000.

Saat ini, Rukindo terutama bergerak dalam bidang pengerukan alur-alur pelayaran, kolam pelabuhan, reklamasi dan transportasi hasil keruk.

JAI

JAI didirikan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 10 Juli 2013 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-47228.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 9 September 2013.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan No. 14 tanggal 11 Oktober 2017 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham JAI menyetujui diantaranya:

- perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham menjadi Rp100 (nilai penuh) per saham.
- Pengeluaran saham dari portopel JAI, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 30% dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum selesai dilaksanakan atau sejumlah sebanyak-banyaknya 1.743.987.600 saham baru, yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham JAI.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

Rukindo (continued)

Based on Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H., No. 48 dated December 28, 2017, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No AHU-AH.01.03-0007913 dated January 10, 2018, the Company received 70,000 newly-issued shares as a result of the conversion of Rukindo's payable to the Company. The Company's shares ownership in Rukindo increased to 99.93%.

The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.91% or 806,622 shares with total amount of Rp806,622,000.
- PPI owns 0.09% or 542 shares with total amount of Rp542,000.

Currently, Rukindo's main activities consist of dredging of sail navigation channel, port basin, reclamation and transportation of dredging products.

JAI

JAI was established based on Notarial Deed No. 24 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-47228.AH.01.01.Tahun 2013 dated September 9, 2013.

Based on Deed of Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company No. 14 dated October 11, 2017 of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, JAI's shareholders agrees among others:

- change in par value of share from Rp1,000,000 (full amount) per share to Rp100 (full amount) per share.
- Issuance of shares from JAI's portfolio, which represents new shares issued from the portfolio of as much as 30% of the issued and paid-up capital after the public offering has been completed or as much as 1,743,987,600 new shares, offered to the public through initial public offering.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

JAI (lanjutan)

- Meningkatkan modal dasar JAI dari sebesar Rp100.000.000 menjadi Rp1.500.000.000, yang terbagi atas 15.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp58.000.000 menjadi Rp406.930.460 dimana peningkatan sebesar Rp348.930.460 atau sebesar 3.489.304.600 saham dilakukan oleh Perusahaan melalui inbreng 21 unit kapal, terdiri dari 9 unit kapal pandu, 10 unit kapal tunda dan 2 unit kapal kepil. Inbreng kapal tersebut telah dilakukan penilaian oleh KJPP Toto Suharto & Rekan dengan hasil penilaian No. P.PP.17.00.0111 tanggal 9 Juni 2017.

Modal dasar JAI sebesar Rp1.500.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 76,89% atau sebanyak 4.063.504.600 saham dengan nilai sebesar Rp406.350.460.
- MTI memiliki 0,11% atau sebanyak 5.800.000 saham dengan nilai sebesar Rp580.000.
- PII memiliki 4,75% atau sebanyak 250.864.747 saham dengan nilai sebesar Rp25.086.474.
- Masyarakat memiliki 18,25% atau sebanyak 964.641.753 saham dengan nilai sebesar Rp96.464.175.

Saat ini, JAI bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan kapal, penundaan kapal, angkutan laut, sungai, danau dan penyebrangan, penyewaan kapal dan keagenan kapal.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

JAI (continued)

- Increase of the authorized share capital of JAI from Rp100,000,000 to Rp1,500,000,000, divided into 15,000,000,000 shares at par value of Rp100 (full amount) per share and the increase of issued and paid-up capital from Rp58,000,000 to Rp406,930,460 whereby an increase of Rp348,930,460 or 3,489,304,600 shares was performed by the Company through injection of 21 units of vessels, consist of 9 units of pilotage vessels, 10 units of tug vessels and 2 units of mooring vessels. Injection of vessels has been appraised by KJPP Toto Suharto & Partners through appraisal report No. P.PP.17.00.0111 dated June 9, 2017.

The authorized capital of JAI amounted to Rp1,500,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp100 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 76.89% or 4,063,504,600 shares with total amount of Rp406,350,460.
- MTI owns 0.11% or 5,800,000 shares with total amount of Rp580,000.
- PII owns 4.75% or 250,864,747 shares with total amount of Rp25,086,474.
- Public owns 18.25% or 964,641,753 shares with total amount of Rp96,464,175.

Currently, JAI's activities consist of pilotage and tug services, sea, river, lake and crossing transportation, ship rental and ship agencies.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PMLI

PMLI didirikan berdasarkan Akta No. 26 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-45955.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 2 September 2013.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 38 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 300 saham yang ada dalam PMLI kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp173.500.

Modal dasar PMLI sebesar Rp120.000.000 terdiri dari 120.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,00% atau sebanyak 29.700 saham dengan nilai sebesar Rp29.700.000.
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 300 saham dengan nilai sebesar Rp300.000.

Saat ini, PMLI bergerak dalam bidang penyediaan jasa pendidikan, pelatihan, konsultasi di bidang maritim dan logistik serta mengelola fasilitas dan infrastruktur pendidikan dan pelatihan.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PMLI

PMLI was established based on Notarial Deed No. 26 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of PMLI was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-45955.AH.01.01.Tahun 2013 dated September 2, 2013.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 38 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all of the shares owned, which are 300 shares in PMLI to PII with a buying price of Rp173,500.

The authorized capital of PMLI amounted to Rp120,000,000 composed of 120,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company owns 99.00% or 29,700 shares with total amount of Rp29,700,000.*
- *PII owns 1.00% or 300 shares with total amount of Rp300,000.*

Currently, PMLI's activities consist of providing educational, training services, consultation on maritime and logistic areas and also managing facilities and infrastructure of education and training .

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PTP

PTP didirikan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

Berdasarkan perjanjian No. HK.566/20/13/PI/II-13 tanggal 27 Desember 2013, Perusahaan dan PTP mengadakan Perjanjian Serah Operasi Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Pelabuhan serta Penggunaan Lahan Pelabuhan berdasarkan Hak Pengelolaan (HPL) Perusahaan pada Cabang Tanjung Priok. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan setuju untuk memberikan hak kepada PTP untuk mengoperasikan fasilitas pelabuhan dan fasilitas penunjang pelabuhan serta penggunaan lahan pelabuhan yang merupakan aset milik Perusahaan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perjanjian. Perjanjian tersebut telah diperpanjang beberapa kali. Terakhir dengan addendum II No.KS.03/27/12/3/DI.1/GM/C.Tpk-17 dan No. HK.566/27/12/1/PTP-17 tanggal 27 Desember 2017 dimana PTP dan Perusahaan sepakat untuk menambah dan mengurangi beberapa hal, diantaranya tidak lagi mengadakan kerjasama serah operasi Hak Pengelolaan (HPL) milik Perusahaan Cabang Tanjung Priok.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 30 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 250 saham yang ada dalam PTP kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp16.549.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PTP

PTP was established based on Notarial Deed No. 27 dated July 10, 2013 of Notary N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of PTP was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 dated August 1, 2013.

Based on agreement No. HK.566/20/13/PI/II-13, dated December 27, 2013, the Company and PTP entered into Agreement of Handover of Port Facilities, Port Supporting Facilities and Land under Right to Operate (HPL) of the Company on Tanjung Priok Branch. Based on the agreement, the Company agreed to provide the rights to PTP to operate port facilities and port supporting facilities also the land owned by the Company to perform Port Services and other services based on the terms and condition stipulated in the agreement. This agreement have been extended several times. Recently with addendum II No. KS.03/27/12/3/DI.1/GM/C.Tpk-17 and No. HK.566/27/12/1/PTP-17 dated on December 27, 2017 whereas PTP and the Company agreed to add and change several articles, among others, no longer holding the cooperation of handover of the Right to Operate (HPL) owned by Company's Tanjung Priok Branch.

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 30 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all of the shares owned, which are 250 shares in PTP to PII with a buying price of Rp16,549,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PTP (lanjutan)

Modal dasar PTP sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,00% atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan tanggal 22 Desember 2017, sebagaimana telah diubah pada tanggal 18 Mei 2018, diatur mengenai zonasi bisnis PTP di cabang pelabuhan Perusahaan, termasuk kegiatan pengoperasian dan pola kerjasama serta pembagiannya.

Pada tanggal 16 Juli 2018, PTP melakukan *spin-off* operasi petikemasnya di pelabuhan Tanjung Priok kepada PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK), pihak berelasi.

Pada tanggal 1 Agustus 2018, PTP melakukan kerjasama dengan Perusahaan cabang Panjang, Bengkulu dan Jambi terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal nonpetikemas.

Pada tanggal 1 September 2018, PTP melakukan kerjasama dengan Perusahaan cabang Banten terkait kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal nonpetikemas.

Saat ini, PTP bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas, jasa curah kering, curah cair, *bunkering* serta jasa pergudangan dan lapangan.

IPC TPK

IPC TPK didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-40641.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PTP (continued)

The authorized capital of PTP amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.00% or 24,750 shares with total amount of Rp24,750,000.
- PII owns 1.00% or 250 shares with total amount of Rp250,000.

Based on Company's Directors' Decision Letter dated December 22, 2017, as has been amended on May 18, 2018, it regulated PTP's business zonation in Company's port branches, including the operational activities as well as the agreement scheme and allocation.

On July 16, 2018, PTP spins-off its container operation in Tanjung Priok port to PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK), a related party.

On August 1, 2018, PTP cooperates with Company's Panjang branch, Bengkulu branch and Jambi branch in relation to operational and management of non-container terminal.

On September 1, 2018, PTP cooperates with Company's Banten branch in relation to operational and management of non-container terminal.

Currently, PTP's activities consist of container terminal services, dry bulk and liquid bulk services, *bunkering* and warehousing and field services.

IPC TPK

IPC TPK was established based on Notarial Deed No. 25 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of IPC TPK was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-40641.AH.01.01.Tahun 2013 dated July 25, 2013.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

IPC TPK (lanjutan)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 36 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI mengalihkan serta menyerahkan seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 250 saham yang ada dalam IPC TPK kepada PII dengan harga pembelian sebesar Rp7.915.500.

Modal dasar IPC TPK sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,00% atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- PII memiliki 1,00% atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Saat ini, IPC TPK bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas dan jasa kepelabuhanan lainnya.

API

API didirikan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 24 Juli 2014 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-19255.40.10.2014 tanggal 4 Agustus 2014. Anggaran Dasar API telah mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 26 Maret 2015 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0934117.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 27 April 2015.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

IPC TPK (continued)

Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 36 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MTI transfers and hands over all of the shares owned, which are 250 shares in IPC TPK to PII with a buying price of Rp7,915,500.

The authorized capital of IPC TPK amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.00% or 24,750 shares with total amount of Rp24,750,000.
- PII owns 1.00% or 250 shares with total amount of Rp250,000.

Currently, IPC TPK's activities consist of container terminal services and other port services.

API

API was established based on Deed No. 29 dated July 24, 2014 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU-19255.40.10.2014 dated August 4, 2014. API's Articles of Association has been amended based on Deed No. 29 dated March 26, 2015 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, regarding the increase in authorized and paid-in capital, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0934117.AH.01.02.TAHUN 2015 dated April 27, 2015.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

API (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 21 Desember 2017 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp1.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp386.000.000 yang diambil bagian oleh PPI dan PTP masing-masing sebesar Rp382.140.000 dan Rp3.860.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0027756.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 27 Desember 2017.

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 28 Desember 2018 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, API melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp805.760.000 yang diambil bagian oleh PPI dan PTP masing-masing sebesar Rp801.900.000 dan Rp3.860.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.03-0018880 tanggal 11 Januari 2019.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PPI memiliki 99,52% atau sebanyak 80.190.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp801.900.000.
- PTP memiliki 0,48% atau sebanyak 386.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.860.000.

Saat ini, kegiatan API terutama terkonsentrasi pada investasi pada CTP, entitas asosiasi yang bergerak dalam penyelenggaraan proyek jalan tol.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

API (continued)

Based on Deed No. 33 dated December 21, 2017 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company increased the authorized capital to Rp1,000,000,000 and the issued and fully paid capital to Rp386,000,000 which was subscribed by PPI and PTP amounting to Rp382,140,000 and Rp3,860,000, respectively. The Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0027756.AH.01.02.TAHUN 2017 dated December 27, 2017.

Based on Deed No. 26 dated December 28, 2018 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, API increased the issued and fully paid capital to Rp805,760,000 which was subscribed by PPI and PTP amounted to Rp801,900,000 and Rp3,860,000, respectively. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-AH.01.03-0018880 dated January 11, 2019.

The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- PPI owns 99.52% or 80,190,000 shares with total amount of Rp801,900,000.
- PTP owns 0.48% or 386,000 shares with total amount of Rp3,860,000.

Currently, the API's activities are primarily concentrated on investment in CTP, an associate which is engaged in a toll road project.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

NPCT1

NPCT1 didirikan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014 dari Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-11432.40.10.2014 tanggal 3 Juni 2014.

Modal dasar NPCT1 sebesar Rp340.725.600 yang terbagi atas 510 saham Kelas A dan 490 saham Kelas B masing-masing dengan nilai nominal Rp340.725.600 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- IPC TPK memiliki 51,00% atau sebanyak 510 saham Kelas A dengan nilai nominal sebesar Rp173.770.056.
- Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., memiliki 49,00% atau sebanyak 490 saham Kelas B dengan nilai nominal sebesar Rp166.955.544.

Saat ini, NPCT1 bergerak dalam bidang pelayanan jasa bongkar muat barang.

TPI

TPI didirikan berdasarkan Akta No. 36 tanggal 10 April 2013 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan AHU-21873.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 24 April 2013.

Modal dasar TPI sebesar Rp500.000.000 yang terbagi atas 500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

NPCT1

NPCT1 was established based on Deed No. 33 dated May 28, 2014 of Notary Liestiani Wang, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-11432.40.10.2014 dated June 3, 2014.

The authorized capital of NPCT1 amounted to Rp340,725,600 which is divided into 510 Class A shares and 490 Class B shares with a nominal value of Rp340,725,600 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC TPK owns 51.00% or 510 Class A shares with total amount of Rp173,770,056.
- Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., owns 49.00% or 490 Class B shares with total amount of Rp166,955,544.

Currently, NPCT1 engage in cargo handling services.

TPI

TPI was established based on Deed No. 36 dated April 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No. AHU-21873.AH.01.01. Tahun 2013 dated April 24, 2013.

The authorized capital of TPI amounted to Rp500,000,000 which is divided into 500,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 25.00% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

TPI (lanjutan)

- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

Saat ini, TPI belum melakukan kegiatan operasi komersial.

JICT

JICT didirikan berdasarkan Akta No. 72 tanggal 27 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsy Tahamata, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-5466.HT.01.01.TH'99 tanggal 29 Maret 1999.

Berdasarkan Akta Perubahan No. 77 dan No. 78 tanggal 30 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsy Tahamata, S.H., dinyatakan bahwa modal dasar JICT adalah sebesar Rp221.450.406 terbagi atas 1 saham seri A porsi Pemerintah Republik Indonesia dan 442.900.812 saham seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut (Catatan 46b, 46c, 46d dan 46e):

- Perusahaan memiliki 48,90% atau sebanyak 216.578.498 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp108.289.249.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,10% atau sebanyak 442.899 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp221.449.
- Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (dahulu Grosbeak Pte. Ltd.) memiliki 51% atau sebanyak 225.879.415 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp112.939.707.

Saat ini, JICT bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan, jasa terminal petikemas, lapangan penumpukan dan jasa lainnya.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

TPI (continued)

- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.

Currently, TPI has not yet started commercial operation.

JICT

JICT was established based on Notarial Deed No. 72 dated March 27, 1999 of Notary Nelly Elsy Tahamata, S.H., M.Kn. The establishment of JICT was approved by Minister of Law and Human Rights No. C-5466.HT.01.01.TH'99 dated March 29, 1999.

Based on Deed of Amendment No. 77 and 78 dated March 30, 1999 by Notary Nelly Elsy Tahamata, S.H., the authorized capital of JICT amounted to Rp221,450,406, comprising of 1 Series A share for The Government of Republic of Indonesia portion and 442,900,812 Series B shares with par value of Rp500 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows (Notes 46b, 46c, 46d and 46e):

- The Company owns 48.90% or 216,578,498 Series B shares with total amount of Rp108,289,249.
- Koperasi Pegawai Maritim owns 0.10% or 442,899 Series B shares with total amount of Rp221,449.
- Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (formerly Grosbeak Pte. Ltd.) owns 51% or 225,879,415 Series B shares with total amount of Rp112,939,707.

Currently, JICT's activities consist of port services, container terminal services, dockyard and other related services.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

TPK Koja

Kerjasama Operasi TPK Koja didirikan berdasarkan Akta No. 53 tanggal 23 Oktober 1996 oleh Imas Fatimah, S.H. dan Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Koja pada tanggal 16 Agustus 1994 antara Perusahaan dengan PT Hutchison Ports Indonesia ("HPI"). Perjanjian tersebut kemudian diubah secara substansial pada tanggal 26 Maret 1999 ("Amandemen I") dan selanjutnya diubah pada tanggal 22 Juni 2011 ("Amandemen II"), tanggal 5 Agustus 2014 ("Amandemen III") dan tanggal 22 Juni 2015. Perjanjian tersebut berlaku selama 20 tahun sejak tanggal operasi komersial, yaitu tanggal 1 November 1998 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Maret 2039 (Catatan 46a).

Proporsi investasi partisipan untuk tahun 2019 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Saat ini, TPK Koja bergerak dalam bidang pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan dan terminal petikemas.

CTP

Berdasarkan Perjanjian Pengambilbagian Saham Bersyarat dan Perjanjian Pemegang Saham MTDX tanggal 14 April 2015, yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 28 Agustus 2015, API, MTD Capital Bhd dan PT Nusacipta Etika Pratama sepakat bahwa API akan melakukan investasi di MTDX dengan cara mengambil bagian atas 130.220 saham baru dengan total nilai nominal Rp118.500.200 (mewakili 45% kepemilikan saham) yang diterbitkan MTDX. Pada tanggal 18 September 2015, transaksi telah diselesaikan dan API menjadi pemilik 45% saham MTDX.

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., MTDX mengganti nama menjadi PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP"). Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0011468.AH.01.02 tanggal 26 Mei 2017.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

TPK Koja

Kerjasama Operasi TPK Koja was established based on Deed No. 53 dated October 23, 1996 of Imas Fatimah, S.H. and on Master Cooperation Agreement dated August 16, 1994 between the Company and PT Hutchison Ports Indonesia ("HPI"). The agreement was substantially revised on March 26, 1999 ("Amendment I") and revised further on June 22, 2011 ("Amendment II"), August 5, 2014 ("Amendment III") and June 22, 2015. The term of the agreement is 20 years from the date of commencement of full commercial operations on November 1, 1998 and has been extended until March 26, 2039 (Note 46a).

The investment proportions of the participants for the year 2019 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

Currently, TPK Koja's activities consist of operating and managing a container port and terminal.

CTP

Based on Conditional Share Subscription Agreement and Shareholders Agreement of MTDX dated April 14, 2015, which was amended and restated on August 28, 2015, API, MTD Capital Bhd and PT Nusacipta Etika Pratama agreed that API will invest in MTDX by subscribing to 130,220 new shares with a total nominal amount of Rp118,500,200 (representing 45% share ownership) issued by MTDX. On September 18, 2015, the transaction was completed and API became the owner of 45% shares in MTDX.

Based on Deed No. 17 dated May 24, 2017 drawn before Drs. Soebiantoro, S.H., MTDX change the name to PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP"). The deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0011468.AH.01.02 dated May 26, 2017.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

MKO MTKI

Pada tanggal 9 April 2015, IKT mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik Jawa Timur dengan PT Maspion Industrial Estate ("MIE") dengan membentuk MKO MTKI. Jangka waktu perjanjian adalah 25 tahun dengan porsi pendanaan IKT dan MIE masing-masing sebesar 45,00% dan 55,00%.

Pada bulan Maret 2016, MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia telah beroperasi secara komersial dan bergerak dalam bidang pengelolaan terminal kendaraan.

PII

PII didirikan berdasarkan Akta No. 112 tanggal 17 November 2017 dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan No. AHU-0052776.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 21 November 2017.

Modal dasar PII sebesar Rp800.000.000 yang terbagi atas 800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,00% atau sebanyak 198.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp198.000.000.
- MTI memiliki 1,00% atau sebanyak 2.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000

Saat ini, PII bergerak dalam bidang investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan maupun jasa terkait kepelabuhanan lainnya, investasi di pasar modal dan pasar uang, jasa konsultasi bisnis serta bertindak sebagai penasihat.

MMI

MMI didirikan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 5 Juli 2018 dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan No. AHU-0033122.AH.01.01. Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

MKO MTKI

On April 9, 2015, IKT entered into an Agreement of Construction and Operation of Car Terminal in Gresik Jawa Timur with PT Maspion Industrial Estate ("MIE") by establishing MKO MTKI. The period of agreement is 25 years with the funding portion for IKT and MIE amounted to 45.00% and 55.00%, respectively.

On March, 2016, MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia has operated commercially and engages in car terminal operation.

PII

PII was established based on Deed No. 112 dated November 17, 2017 of Notary Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision letter No. AHU-0052776.AH.01.01. Tahun 2017 dated November 21, 2017.

The authorized capital of PII amounted to Rp800,000,000 which is divided into 800,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.00% or 198,000 shares with total amount of Rp198,000,000.
- MTI owns 1.00% or 2,000 shares with total amount of Rp2,000,000.

Currently, PII's activities consist of investment in companies engaged in port services and other port related services, investment in capital markets and money markets, business consultancy services and acting as advisor.

MMI

MMI was established based on Deed No. 16 dated July 5, 2018 of Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision letter No. AHU-0033122.AH.01.01. Tahun 2018 dated July 16, 2018.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

MMI (lanjutan)

Modal dasar MMI sebesar Rp350.000.000 yang terbagi atas 350.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PPI memiliki 70,00% atau sebanyak 612.500.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp61.250.000.
- PT PP Properti Tbk memiliki 30,00% atau sebanyak 262.500.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp26.250.000.
- Saat ini, MMI belum melakukan kegiatan komersial.

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	-
Komisaris Independen	Suaidi Marasabessy
Komisaris	Kushari Suprianto
Komisaris	Montty Giriana
Komisaris	D. Andhi Nirwanto
Komisaris	Djadmiko
Komisaris	R. Agus H. Purnomo

Direksi

Direktur Utama	Elvyn G. Masassya
Wakil Direktur Utama	Hambra
Direktur Komersial	Arif Suhartono
Direktur Teknik	Dani Rusli Utama
Direktur Operasi	Prasetyadi
Direktur Keuangan	Widyaka Nusapati
Direktur SDM	Rizal Ariansyah
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Ogi Rulino

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

MMI (continued)

The authorized capital of MMI amounted to Rp350,000,000 which is divided into 350,000 shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 70.00% or 612,500,000 shares with total amount of Rp61,250,000.
- PT PP Properti Tbk owns 30.00% or 262,500,000 shares with total amount of Rp26,250,000.
- At the moment, MMI has not performed any commercial activities.

c. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees

Board of Commissioners and Directors

As of December 31, 2019 and 2018, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors is as follows:

December 31, 2019

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Directors

President Director
Vice President of Director
Director of Commercial
Director of Engineering
Director of Operations
Director of Finance
Director of Human Resources
Director of Transformation and Business Development

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

31 Desember 2018

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/ Independen	Tumpak H. Panggabean
Komisaris Independen	Suaidi Marasabessy
Komisaris	Kushari Suprianto
Komisaris	Montty Giriana
Komisaris	D. Andhi Nirwanto
Komisaris	Djadmiko
Komisaris	R. Agus H. Purnomo

Direksi

Direktur Utama	Elvyn G. Masassya
Direktur Komersial	Saptono R. Irianto
Direktur Teknik	Dani Rusli Utama
Direktur Operasi	Prasetyadi
Direktur Keuangan	Widyaka Nusapati
Direktur SDM	Rizal Ariansyah
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Riry Syeried Jetta

Sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2019 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang telah mengangkat Tumpak H. Panggabean sebagai ketua Dewan Pengawas KPK, maka pada tanggal 23 Desember 2019, Tumpak H. Panggabean telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 2 Januari 2020, Djadmiko ditunjuk untuk melaksanakan fungsi Komisaris Utama Perusahaan sampai dengan ditetapkannya Komisaris Utama Perusahaan oleh RUPS.

Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan

Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	Kushari Suprianto
Anggota	Rakmat Adi Santosa
Anggota	Muhdi Al Fajar
Sekretaris Perusahaan	Shanti Puruhita

1. GENERAL (continued)

c. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees (continued)

December 31, 2018

Board of Commissioners

President/Independent Commissioner
Independent Commissioner Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Directors

President Director
Director of Commercial
Director of Engineering
Director of Operations
Director of Finance
Director of Human Resources
Director of Transformation and Business Development

In relation to the Decision of the President of the Republic of Indonesia dated December 19, 2019 regarding Appointment of Membership of the Supervisory Board on the Eradication of Corruption (KPK) which appoint Tumpak H. Panggabean as the president of the KPK Supervisory Board, on December 23, 2019, Tumpak H. Panggabean has filed a resignation as the Company's President Commissioner as well as Independent Commissioner.

Based on Board of Commissioner's Decision dated Januari 2, 2020, Djadmiko was appointed to perform the functionality of the Company's President Commissioner until the establishment of Independent Commissioner by RUPS.

Audit Committee and Corporate Secretary

The Company's Audit Committee and Corporate Secretary as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

Audit Committee

Head
Member
Member
Corporate Secretary

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

Karyawan

Total karyawan tetap Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebanyak 4.640 dan 4.560 karyawan (tidak diaudit).

d. Mata Uang Pelaporan

Mata uang pelaporan Kelompok Usaha adalah Rupiah, kecuali TPK Koja, NPCT1 dan JICT dalam Dolar Amerika Serikat.

Sebelum tanggal 1 Januari 2019, mata uang fungsional PPI adalah Dolar AS (USD), yang juga digunakan sebagai mata uang penyajian dalam laporan keuangan. Efektif tanggal 1 Januari 2019, PPI mengubah mata uang fungsionalnya menjadi Rupiah (Rp) yang disebabkan oleh terjadinya perubahan secara substansial dalam mata uang yang digunakan dalam sebagian besar transaksi penjualannya. Sebagai akibatnya, efektif tanggal 1 Januari 2019, mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan juga berubah menjadi Rupiah. Manajemen berkeyakinan bahwa perubahan ini akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat dalam laporan keuangan.

e. Penjabaran dalam Mata Uang Penyajian

Mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional.

Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha, laporan keuangan TPK Koja, NPCT1 dan JICT dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan cara sebagai berikut:

- Aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan;
- Penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- Seluruh hasil dari selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya.

1. GENERAL (continued)

c. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees (continued)

Employees

Total permanent employees of the Company as of December 31, 2019 and 2018 are 4,640 and 4,560 employees, respectively (unaudited).

d. Reporting Currency

The Company's reporting currency is Rupiah, except TPK Koja, NPCT1 and JICT which are in United States Dollar.

Prior to January 1, 2019, the functional currency of PPI is US Dollar (USD), which was also used as presentation currency in the financial statements. Effective January 1, 2019, PPI has changed its functional currency to Rupiah (Rp) due to substantial change in the currency used in majority of its sales transaction. As a result, effective January 1, 2019, the presentation currency used in the financial statements has also been changed to Rupiah. The management believes that such change will result in a more appropriate presentation in the financial statements.

e. Translation into Presentation Currency

The presentation currency of the Company's consolidated financial statements is in Rupiah, which is also the functional currency.

In preparing the consolidated financial statements of the Company, financial statements of TPK Koja, NPCT1 and JICT were translated to Rupiah currency based on the following:

- Assets and liabilities were translated using the prevailing rates at reporting date;
- Income and expenses were translated using the average exchange rate; and
- All resulting exchange differences were recognized in other comprehensive income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

e. Penjabaran dalam Mata Uang Penyajian (lanjutan)

Mutasi akun selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebagai berikut:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Saldo awal	373.526.146
Efek penjabaran - neto	246.899.366
Saldo akhir	620.425.512

f. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2020. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam Catatan yang relevan.

1. GENERAL (continued)

e. Translation into Presentation Currency (continued)

Movement for exchange differences due to financial statements translation account are as follows:

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	391.851.724	<i>Beginning balance</i>
	(18.325.578)	<i>Effect due to translation - net</i>
	373.526.146	<i>Ending balance</i>

f. Completion of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II and its subsidiaries as of December 31, 2019 and for the year then ended are completed and authorized for issuance on March 31, 2020. The Company's Directors who signed the Directors' statement are responsible for the fair preparation and presentation of such consolidated financial statements.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which comprises the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, have been prepared on an accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts that were measured by using a basis as disclosed in the relevant Notes.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI Penting
(lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

b. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Kelompok Usaha seperti yang disebutkan pada Catatan 1.

Perusahaan memiliki kontrol atas entitas anak apabila Perusahaan memiliki dampak dari atau memiliki hak atas penerimaan/imbalance hasil variabel dari hubungannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk penerimaan tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak.

Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Nonpengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

**2. Summary of Significant Accounting Policies
(continued)**

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

The consolidated statements of cash flow was prepared using direct method and presents receipts and expenditures of cash and cash equivalents, which were classified into operating, investing and financing activities.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company mentioned in Note 1.

The Company have control to entity when the Company have an impact to, or has right of, variable return from its involvement with the subsidiaries and has the ability to affect those returns through its power over the subsidiaries.

All material intercompany transactions and balances have been eliminated in the consolidated financial statements.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtained control and continue to be consolidated until the date such control ceases.

Losses of a subsidiary that is not fully owned by the Company are attributed to Non-controlling Interest (NCI) even if that will result in a deficit balance.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Kelompok Usaha:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak.
- menghentikan pengakuan nilai tercatat setiap KNP.
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas (bila ada).
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima.
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya.
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh entitas induk yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Kelompok Usaha pada suatu entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Kelompok Usaha dan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah KNP disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik Entitas Induk.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

If it loses control over a subsidiary, the Company:

- *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiaries.*
- *derecognizes the carrying amount of any NCI.*
- *derecognizes any cumulative translation differences recorded in equity (if any).*
- *recognizes the fair value of the consideration received.*
- *recognizes the fair value of any investment retained.*
- *recognizes any surplus or deficit in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and*
- *reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate.*

NCI reflects the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries entity that not attributable directly or indirectly by the parent company which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the parent entity.

Changes in the Company's ownership interest in a subsidiary that do not impact in loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Company's and non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. Any differences between the amount by which the NCI are adjusted and the fair value of consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Parent Company.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" (Catatan 1d dan 1e).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aset tertentu dikapitalisasi ke aset dalam penyelesaian dan aset tak berwujud.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (nilai penuh):

	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Dolar Amerika Serikat (USD) 1	13.901
Euro Eropa (EUR) 1	15.589
Dolar Singapura (SGD) 1	10.321

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Kelompok Usaha memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi, seperti yang dijelaskan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

e. Kombinasi bisnis entitas sependengali

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sependengali".

Berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), entitas yang melepas bisnis maupun yang menerima bisnis mencatat selisih antara imbalan yang diterima/dialihkan dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas/jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis di ekuitas dan menyajikannya dalam akun "tambahan modal disetor".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Foreign Currency Transactions and Balances

The Company applied PSAK No. 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" (Notes 1d and 1e).

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency and presentation currency. Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, except for foreign exchange difference that can be attributed to qualifying assets which are capitalized to construction in progress and intangible assets.

Below are the major exchange rates used for translation as of December 31, 2019 and 2018 (full amount):

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	14.481	United States Dollar (USD) 1
	16.560	European Euro (EUR) 1
	10.603	Singapore Dollar (SGD) 1

d. Transactions with related parties

The Company has transactions with related parties, as defined in PSAK No. 7 (revised 2010), "Related Party Disclosures".

The transactions are made based on terms agreed by the parties.

e. Business combinations entities under common control

The Company applied PSAK No. 38 (Revised 2012), "Business Combinations Entities Under Common Control".

Based on PSAK No. 38 (Revised 2012), the entity that disposed and received business records the difference between the consideration received/transferred and the carrying amount of the disposed business/carrying amount of any business combination transaction in equity in the "additional paid-in capital" account.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek.

g. Piutang Usaha dan Penyisihan Penurunan Nilai

Piutang usaha pada awalnya diukur sesuai dengan nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Pembentukan penyisihan penurunan nilai piutang ditentukan berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo dengan menggunakan metode roll rate. Berdasarkan keyakinan manajemen, metode pembentukan penyisihan penurunan nilai piutang tersebut tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo dengan menggunakan basis individual. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih.

h. Persediaan

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan identifikasi khusus. Persediaan terdiri dari suku cadang kapal dan crane, bahan bakar, alat tulis kantor, obat dan alat-alat medis.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan.

i. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka dibebankan pada operasi sesuai dengan masa manfaatnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all investments with maturities of three months or less from the date of placement that were not used as collateral and are unrestricted.

Time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year are presented as short-term investments.

g. Trade Receivables and Allowance for Losses

Trade receivables are initially measured at fair value and subsequently measured at amortized cost, net of allowance for impairment. Allowance for impairment losses is determined based on management's evaluation on the collectability of the balances using roll rate method. Based on the management beliefs, the impairment method will not have a significant difference compared to management evaluation on the collectability of the balances using individual basis. Trade receivables are written off in the period when the receivables cannot be collected.

h. Inventory

Inventory was recorded using the weighted average method and specific identification. Inventories consists of ship and crane spare part, fuels, office supplies, medicine and medical instruments.

Allowance for inventory obsolescence is defined based on analysis of inventory condition on the date of reporting of financial position.

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are charged to operations over the useful life.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

j. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh perusahaan dimana Kelompok Usaha memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendali. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas dan pada awalnya diakui sebesar harga perolehan. Investasi pada entitas asosiasi tersebut termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi dikurangi rugi penurunan nilai.

Bagian Kelompok Usaha atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca-akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lainnya pasca-akuisisi diakui didalam penghasilan komprehensif lainnya. Mutasi penghasilan komprehensif pasca-akuisisi disesuaikan terhadap nilai tercatat investasinya, jika bagian Kelompok Usaha atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan.

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Kelompok Usaha memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi. Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul dari investasi pada entitas asosiasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kelompok Usaha menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal Kelompok Usaha tidak lagi memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi dan mencatat investasinya sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang mana hilangnya pengaruh signifikan tersebut tidak mengakibatkan entitas asosiasi menjadi entitas anak atau pengaturan bersama sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama". Ketika kehilangan pengaruh signifikan, maka Kelompok Usaha mengukur setiap investasi yang tersisa pada entitas asosiasi pada nilai wajar. Kelompok Usaha mengakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian setiap selisih antara:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Investment in Associates

Associates entities over which the Company has significant influence but not control. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting and are initially recognized at cost. The Company's investment in associates include goodwill identified on acquisition, net of impairment loss.

The Company's share of their associates post acquisition profits or losses is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. Their share of post acquisition movement in other comprehensive income is recognized as other comprehensive income. The cumulative post-acquisition movements are adjusted against the carrying amount of the investment, when the Company's share of losses in an associate exceeds its interest in the associates, including any unsecured receivable.

The Company does not recognize for the losses unless they have incurred obligation or made payments on behalf of the associates. Diluted gains and losses arising in investments in associates are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

The Company discontinue the use of the equity method from the date when Company ceases to have significant influence over an associate and records for the investment in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014), "Financial Instrument: Recognition and Measurement", from that date, provided the associate does not become a subsidiary or a joint arrangement as defined in PSAK No. 66, "Joint Arrangement". On the loss of significant influence, the Company shall measure at fair value any investment the investor retains in the former associate. The Company shall recognize in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income any difference between:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

j. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

- (a) nilai wajar investasi yang tersisa dan hasil pelepasan sebagian kepemilikan pada entitas asosiasi; dengan
- (b) jumlah tercatat investasi dalam tanggal ketika hilangnya pengaruh signifikan.

Ketika investasi dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dan dicatat sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), maka nilai wajar investasi ketika dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sebagai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014).

k. Properti Investasi

Properti investasi merupakan properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai Kelompok Usaha untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi tersebut.

Perusahaan telah memilih model biaya untuk mencatat properti investasinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi yang berupa bangunan fasilitas pelabuhan (10 - 50 tahun) dan jalan dan bangunan (10 - 40 tahun).

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Investment in Associates (continued)

- (a) the fair value of any retained investment and any proceeds from disposing of the part of the interest in the associate; and
- (b) the carrying amount of the investment at the date when significant influence is lost.

When an investment ceases to be an associate and is recorded for in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014), the fair value of the investment at the date when it ceases to be an associate shall be regarded as its fair value on initial recognition as a financial asset in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014).

k. Investment Properties

Investment properties represents properties (land or building - or part of a building - or both) held by the Company to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and any impairment in value, if any. The carrying amount includes the cost of replacement of an existing investment property in the year such costs are incurred, if the recognition criteria are met and does not include the cost of daily use of the investment property.

The Company has chosen the cost model to record for its investment properties.

Depreciation is computed using the straight-line basis over the estimated useful lives of investment properties which consist of building and port facilities (10 - 50 years) and road and building (10 - 40 years).

Investment properties are derecognized when either it has been disposed of or when it is permanently withdrawn from use and no future benefit is expected from its disposal. Any gains or losses on the retirement or disposal of investment properties are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the period of retirement or disposal.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Aset tetap

I. Fixed assets

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

All fixed assets are initially recognized at cost which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for the assets to be capable of operating in the manner intended by management.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

After to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets start when it is available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful live of the assets as follows:

<u>Jenis Aset</u>	<u>Tahun/Years</u>	<u>Type of Assets</u>
Bangunan fasilitas pelabuhan	10 - 50	Building and port facilities
Kapal	5 - 20	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	5 - 20	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	10 - 25	Port facility installation
Jalan dan bangunan	10 - 40	Road and building
Peralatan	4 - 25	Equipment
Kendaraan	5	Vehicles
Emplasemen	3 - 25	Emplacement

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the year in which the asset is derecognized.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

I. Aset tetap (lanjutan)

Pada akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi dan disesuaikan secara prospektif jika terjadi perubahan.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya. Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas, dalam hal ini disusutkan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.

Biaya perbaikan yang signifikan diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba pada saat terjadinya.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Aset kerjasama operasi merupakan kegiatan kerjasama yang meliputi pemanfaatan aset dari para pihak atas suatu kegiatan operasi yang didasarkan pada perjanjian kontraktual. Aset kerjasama operasi dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Fixed assets (continued)

At the end of reporting period, the residual values, useful lives and methods of depreciation of assets are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of reporting period.

Land is stated at cost and not depreciated.

If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration and the benefits from the site dismantlement, removal and restoration is limited, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs. In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from it.

The cost of major repairs is recognized as the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the profit or loss as incurred.

Major spare parts and stand-by equipments are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

Joint operation assets are joint activities that include utilization of the assets from the parties for operational activities that is based on contractual agreements. Joint operation assets are stated at cost less accumulated depreciation and are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lives of similar fixed assets.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

m. Sewa

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau mengandung sewa adalah berdasarkan substansi dari perjanjian tersebut pada penetapan awal. Perjanjian dievaluasi apakah pemenuhannya tergantung kepada penggunaan aset atau aset-aset tertentu secara spesifik atau perjanjian mengalihkan hak untuk menggunakan aset atau aset-aset, walaupun hak tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian.

Kelompok Usaha sebagai lessee

Sewa pembiayaan yang mengalihkan kepada Kelompok Usaha secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar dari aset sewaan atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa dipisahkan antara beban keuangan dan pengurangan liabilitas sewa, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Beban keuangan diakui sebagai beban pendanaan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Sebuah aset sewaan disusutkan selama masa manfaat dari aset tersebut. Tetapi, jika tidak terdapat kepastian memadai bahwa Kelompok Usaha akan memperoleh kepemilikan diakhir masa sewa, maka aset disusutkan selama mana yang lebih pendek antara taksiran masa manfaat aset dan masa sewa.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban usaha dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian secara garis lurus selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Lease

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date. The arrangement is assessed for whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets or the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

Company as a lessee

A finance lease that transfers to the Company substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item is capitalized at the commencement of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognized as financing cost in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the Company will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

Operating lease payments are recognized as an operating expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line basis over the lease term.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Kelompok Usaha sebagai lessor

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasional jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto tersebut.

Pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan.

n. Pengaturan bersama

Kelompok Usaha merupakan pihak dalam pengaturan bersama apabila terdapat pengaturan kontraktual yang memberikan pengendalian bersama atas aktivitas relevan kepada Kelompok Usaha dan minimal satu pihak lainnya. Pengendalian bersama diuji dengan prinsip yang sama dengan penilaian pengendalian atas anak perusahaan.

Kelompok Usaha mengklasifikasikan kepentingannya dalam pengaturan bersama sebagai berikut:

- Ventura bersama: ketika Kelompok Usaha memiliki hak hanya pada net aset dari pengaturan bersama
- Operasi bersama: ketika Kelompok Usaha memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas yang terkait dengan pengaturan bersama.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Lease (continued)

Company as a lessor

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership. Leases are classified as operating leases if the lease does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

In a finance lease, the lessor recognizes finance lease assets such as receivables in the consolidated statements of financial position at an amount equal to the net lease investment.

The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the lessor's net investment in the finance lease.

n. Joint arrangements

The Company is a party to a joint arrangement when there is a contractual arrangement that confers joint control over the relevant activities of the arrangement to the Company and at least one other party. Joint control is assessed under the same principles as control over subsidiaries.

The Company classifies its interests in joint arrangements as either:

- Joint ventures: where the Company has rights to only the net assets of the joint arrangement
- Joint operations: where the Company has both the rights to assets and obligations for the liabilities of the joint arrangement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

n. Pengaturan bersama (lanjutan)

Dalam melakukan penilaian klasifikasi kepentingan dalam pengaturan bersama, Kelompok Usaha mempertimbangkan hal-hal berikut:

- struktur pengaturan bersama
- bentuk hukum pengaturan bersama apabila dibentuk melalui kendaraan terpisah
- persyaratan pengaturan kontraktual
- ketika relevan, fakta dan keadaan lain (termasuk semua perjanjian kontraktual lainnya).

Kelompok Usaha mencatat kepentingannya dalam operasi bersama dengan mengakui hak atas aset, kewajiban atas liabilitas, pendapatan dan beban sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban dalam ketentuan kontraktual.

o. Aset Takberwujud

Aset takberwujud Kelompok Usaha terdiri dari aset hak konsesi, piranti lunak dan biaya ditangguhkan.

Aset takberwujud diakui jika Kelompok Usaha kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Aset takberwujud diamortisasi selama umur manfaat ekonomi aset dan dievaluasi apabila terdapat indikasi adanya penurunan nilai untuk aset takberwujud. Periode dan metode amortisasi untuk aset takberwujud direviu setidaknya setiap akhir tahun tutup buku.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat; i) dilepaskan atau ii) ketika tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Joint arrangements (continued)

In assessing the classification of interests in joint arrangements, the Company considers:

- *The structure of the joint arrangement*
- *The legal form of joint arrangements structured through a separate vehicle*
- *The contractual terms of the joint arrangement agreement*
- *Any other facts and circumstances (including any other contractual arrangements).*

The Company accounts for its interests joint operations by recognising its share of assets, liabilities, revenues and expenses in accordance with its contractually conferred rights and obligations.

o. Intangible Assets

Intangible assets of the Company consist of concession rights asset, software and deferred charges.

Intangible assets are recognized if the Company will obtain useful economic benefit from the intangible assets and the cost of assets can be reliably measured.

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, the intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and impairment loss, if any.

An intangible asset is amortized over the asset's useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset are reviewed at least at each financial year end.

An intangible asset shall be derecognized; i) on disposal; or ii) when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi

Kelompok Usaha telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22).

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Kelompok Usaha membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan terminal Kalibaru yang akan diamortisasi selama periode aset diharapkan dapat digunakan oleh Perusahaan sejak tanggal pengoperasian terminal. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi terminal Kalibaru diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

Concession Asset

The Company has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22).

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Company records for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are Kalibaru terminal concession rights which are amortized over the period of assets are expected to use from the date of operation of the Kalibaru terminal. During the construction period, the accumulated Kalibaru terminal construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ("OP") tanpa syarat.

Aset konsesi yang diberikan kepada Kelompok Usaha dapat dipindahkan dengan persetujuan Pemerintah/OP. Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/OP pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selain itu, Kelompok Usaha mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" (PSAK 34) dan PSAK 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Kelompok Usaha menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Kelompok Usaha diakui pada nilai wajar.

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan aset konsesi - Terminal Kalibaru yang meliputi biaya pembangunan dermaga, pengadaan tanah dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

Concession Asset (continued)

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ("OP") for no consideration.

Concession asset which granted to the Company are transferrable with approval from the Government/OP. These concession assets will be transferred to the Government/OP at the end of the concession period and, at such time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

In addition, the Company recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" (PSAK 34) and PSAK 23, "Revenue", for the services it performs. When the Company provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Company is recognized at its fair value.

Construction contract comprehends all cost directly attributable to the construction of concession assets - Kalibaru Terminal which includes cost of port development, land acquisition and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required, plus the cost of borrowing directly used for financing the construction of concession asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Kelompok Usaha mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset takberwujud dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya.

Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

Aset konsesi diamortisasi selama periode aset diharapkan dapat digunakan oleh Perusahaan dengan menggunakan metode garis lurus.

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya-biaya sehubungan dengan perolehan sistem perangkat lunak yang mempunyai masa manfaat 4-5 tahun, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

p. Kapitalisasi Biaya Pinjaman

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 26 (Revisi 2011), "Biaya Pinjaman".

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Kelompok Usaha sehubungan dengan pinjaman dana.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

Concession Asset (continued)

The Company recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets which the Company receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Company records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract.

Construction cost is the value of the construction contract.

The concession assets that amortized over the period of assets are expected to use using straight line method.

Software

Software represents expenses relating to systems software cost, which benefits extend over a period of 4-5 years, are deferred and amortized over the periods benefited using the straight-line method.

p. Capitalization of Borrowing Cost

The Company implemented PSAK No. 26 (Revised 2011), "Borrowing Costs".

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction and production of the qualifying assets are capitalized as a part of the related assets. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Company incurs in connection with the borrowing of funds.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

p. Kapitalisasi Biaya Pinjaman (lanjutan)

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai maksudnya.

q. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka atas pemakaian lahan dan bangunan diamortisasi selama masa kontrak pemakaian dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian tidak lancar atas pendapatan diterima di muka disajikan sebagai bagian dari "liabilitas jangka panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

r. Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran.

Berikut merupakan kriteria pengakuan pendapatan yang harus dipenuhi sehingga pengakuan dapat diakui:

- Pendapatan jasa kapal, jasa terminal petikemas, jasa barang, jasa terminal dan logistik diakui pada saat transaksi jasa telah selesai dilakukan.
- Pendapatan pelayanan kesehatan diakui pada saat jasa telah diberikan atau saat barang medis telah diserahkan kepada pasien.
- Pengakuan atas pendapatan jasa jaringan, konsultasi dan pemeliharaan diakui pada saat jasa tersebut telah diserahkan kepada pelanggan. Pendapatan dari penjualan software diakui pada saat risiko dan hak kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pelanggan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**p. Capitalization of Borrowing Cost
(continued)**

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are completed for their intended use.

q. Unearned Revenues

Unearned revenues from usage of land and buildings are amortized over the usage term using the straight-line method. The non-current portion of unearned revenues is shown as part of "long term liabilities" in the consolidated statements of financial position.

r. Revenue and Expenses

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is being made. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivables.

The criteria of revenue recognition are as follows:

- *Revenue from ship services, container services, goods services, terminal services and logistic are recognized when the transactions have been performed.*
- *Revenue from medical services is recognized when the services rendered or when the medical items are have been delivered to the patients.*
- *Revenue from network services, consulting and maintenance services are recognized when services have been rendered to the customers. Revenue from software sales is recognized when the significant risk and rewards of ownership have been transferred to the customer.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

- Pendapatan jasa pengerukan diakui berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan aktual. Persentase pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan tetapi belum ditagihkan dicatat sebagai pendapatan masih akan diterima. Selisih lebih antara pembayaran yang diterima dengan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka.
- Pendapatan atas kegiatan pelatihan diakui pada saat kegiatan telah dilaksanakan.
- Pendapatan sewa tanah dan bangunan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.
- Pendapatan dividen diakui pada saat hak Kelompok Usaha untuk menerima pembayaran dividen ditetapkan.
- Pendapatan konstruksi Kelompok Usaha mengakui aset takberwujud atas jasa konstruksi dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Pada fase konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan basis kontrak biaya-plus.

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

Beban konstruksi diakui sejak kegiatan konstruksi dimulai sampai dengan proses pembangunan aset selesai dan siap untuk digunakan.

Kelompok Usaha mencatat pendapatan dan beban konstruksi bersamaan dengan pengakuan aset takberwujud pada tahap konstruksi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Revenue and Expenses (continued)

- Revenue from dredging services is recognized based on actual percentage of work completion. Percentage of work that has been completed based on memorandum of work completion but not yet been billed are recorded as accrued income. Excess of payments received from customers over value of work that has been completed the are recorded as unearned revenue.
- Revenue from training services is recognized when the activities are completed.
- Land and building rental revenue is recognized on a straight line basis over the term of the lease contracts.
- Dividend revenue is recognized when the Company's right to receive the dividend payment is established.
- Construction revenues
The Company recognizes intangible assets of construction services in which the Company receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. In the construction period, the Company recorded intangible assets and recognize revenues and costs of construction by using cost-plus contract basis.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

Construction cost are recognized during construction stage up to construction activity was finished and asset ready to use.

The Company accounted for construction revenue and construction cost at the same time of recognition of intangible asset during construction phase.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Perpajakan

s. Taxation

Pajak Final

Final Tax

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subjected to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Mengacu pada revisi PSAK No. 46 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Kelompok Usaha memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan penghasilan sewa tanah dan bangunan sebagai pos tersendiri.

Referring to revised PSAK No. 46 as mentioned above, final tax is no longer governed by PSAK No. 46. Therefore, the Company has decided to present all of the final tax arising from land and building rent revenue as separate line item.

Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasi dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan, kecuali untuk aset tertentu seperti tanah yang pada saat realisasinya dikenakan pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi.

The difference between the carrying amount of a revalued asset and its tax base is a temporary difference and gives rise to a deferred tax liability or asset, except for certain asset such as land, which realization is taxed with final tax on gross value of transaction.

Pajak Kini

Current Tax

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kelompok Usaha juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini".

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Corporate Income Tax - Current" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. The Company also presented interest/penalty, if any, as part of "Corporate Income Tax - Current".

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if filed an objection, when the result of the objection is determined.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Kelompok Usaha mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Taxation (continued)

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Company reassesses unrecognized deferred tax assets. The Company recognizes a previous unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that they relate to the items that previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statements of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

t. Imbalan Kerja

Imbalan pascakerja

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (Program Pensiun) untuk semua karyawan tetapnya yang telah memenuhi kriteria dan liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai yang ditentukan berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berlaku. Liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai tersebut dihitung dengan membandingkan imbalan yang akan diterima oleh karyawan pada usia normal pensiun dari Program Pensiun dengan imbalan sesuai dengan KKB, setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi pemberi kerja dan hasil pengembangannya. Jika bagian pemberi kerja pada imbalan Program Pensiun kurang dari imbalan yang diharuskan oleh KKB, Perusahaan akan mencadangkan kekurangan tersebut.

Perusahaan memberikan imbalan kerja lainnya, seperti imbalan kesehatan dan uang penghargaan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Estimasi biaya imbalan ini diakru sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Kewajiban imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Beban untuk imbalan kerja berdasarkan KKB/UU/imbalan kesehatan pascakerja ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Laba atau rugi aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi total 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (*present value of the defined benefit obligation*) pada tanggal tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Employee Benefits

Post-employment benefits

The Company has a defined contribution retirement plan (Pension Plan) covering all of its qualified permanent employees and an unfunded employee benefit liability determined in accordance with the existing Collective Labor Agreement (CLA). The unfunded employee benefit liability is calculated by comparing the benefit that will be received by an employee at normal pension age from the Pension Plan with the benefit as stipulated in the CLA, after deducting the accumulated employer contribution and the related investment results. If the employer-funded portion of the Pension Plan benefit is less than the benefit as required by the CLA, the Company reserves for such shortfall.

The Company also provides other post-employment benefits, such as healthcare benefits and service pay to their retirees. The entitlement to these benefits are usually based on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The estimation costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to defined benefit pension plans.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at end of the reporting period less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and prior service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method.

The costs of providing employee benefits under the CLA/Law/post-retirement healthcare benefits plan are determined using the projected-unit-credit method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian yang melebihi ketentuan 10% diakui selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Lebih lanjut, biaya jasa lalu yang terjadi ketika Perusahaan memperkenalkan program imbalan pasti atau terjadinya perubahan atas imbalan yang terhutang dari program yang berlaku saat ini harus diamortisasi selama periode sampai imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan (*vested*).

Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk cuti besar yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan. Perkiraan beban ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pascakerja. Kewajiban ini dihitung minimum satu tahun sekali oleh aktuaris independen. Imbalan jangka panjang lainnya yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Program iuran pasti

Program iuran pasti merupakan program imbalan pascakerja, dimana entitas membayar iuran tetap kepada suatu entitas terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum ataupun konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Kewajiban untuk membayar iuran secara regular merupakan biaya imbalan kerja karyawan untuk periode dimana jasa diberikan oleh pekerja.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

These gains or losses in excess of the 10% threshold are amortized on a straight-line basis over the average of remaining working period of the employees estimates. Further, past service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Other long term employment benefits included the long services leave benefit which is determined in compliance with the Company's Regulation. The expected costs of these benefits are calculated and recognized over the year of employment, using the method which is applied in calculating obligation for post-employment benefits. These obligations are calculated on a minimum once a year by an independent actuary. Other long term employment benefits that are vested, are recognized as expense immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Defined contribution plans

A defined contribution plan is a post-employment benefit plan in which the entity pays fixed contributions into a separate entity and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for the regular contributions constitute employee benefit costs for the period during which services are rendered by employees.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan

i) Aset keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika dibolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan.

Semua aset keuangan diakui pertama kali pada nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali apabila aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan Kelompok Usaha mencakup kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, investasi jangka panjang dan aset tidak lancar lainnya diklasifikasikan sebagai "Pinjaman yang diberikan dan Piutang". Kelompok Usaha juga memiliki investasi jangka pendek yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi dan investasi jangka panjang yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- (a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi termasuk aset keuangan untuk dijual dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments

i) Financial assets

Initial recognition

Financial assets within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments and available-for-sale financial assets, as appropriate. The Company determines the classification of the financial assets upon initial recognition and, if allowed and appropriate, will re-evaluate this designation at the end of each financial year.

Financial assets are recognized initially at fair value plus direct attributable transaction costs, except if the financial assets are recorded at fair value through profit or loss.

The financial assets of the Company, which include cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, other receivables, accrued revenues, long-term investment and other non-current assets, are all classified as "Loans and Receivables". The Company also has short-term investments which are classified as financial assets measured at fair value through profits or losses and long-term investments which are classified as available-for-sale financial assets.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- (a) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

u. Financial Instruments (continued)

i) Aset keuangan (lanjutan)

i) Financial assets (continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan)

Subsequent measurement (continued)

- (a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi (lanjutan)

- (a) *Financial assets at fair value through profit or loss (continued)*

Aset derivatif diklasifikasikan sebagai kelompok untuk dijual kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan Kelompok Usaha pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui sebagai laba atau rugi.

Derivative assets are classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at fair value through profit or loss are presented in the Company's statements of financial position at fair value with gains or losses recognized as profit or loss.

Kelompok Usaha memiliki investasi jangka pendek dalam kategori ini.

The Company has short-term investment classified under this category.

- (b) Pinjaman yang diberikan dan piutang

- (b) *Loan and receivables*

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan keuntungan dan kerugian terkait diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or defined payments that are not quoted in an active market. After initial measurement, such financial assets are recorded at amortized cost using the effective interest rate method, and gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Kelompok Usaha memiliki kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset tidak lancar lainnya dalam kategori ini.

The Company has cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, other receivables, accrued revenue and other non-current assets are classified under this category.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

u. Financial Instruments (continued)

i) Aset keuangan (lanjutan)

i) Financial assets (continued)

(c) Aset keuangan tersedia untuk dijual

**(c) Available-For-Sale ("AFS") financial
Assets**

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif akan direklasifikasi sebagai laba atau rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

AFS financial assets are nonderivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in any of the three preceding categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in the shareholders' equity until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in equity will be reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment.

Perusahaan memiliki investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan saham - tersedia untuk dijual.

The Company has long-term investment in share of stock - available-for-sale.

ii) Liabilitas keuangan

ii) Financial liabilities

Pengakuan awal

Initial recognition

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, liabilitas keuangan yang dinilai pada biaya perolehan yang diamortisasi atau sebagai derivatif yang dirancang sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang lebih sesuai. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang dinilai pada biaya perolehan yang diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial liabilities at fair value through the profit or loss, financial liabilities measured at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of financial liabilities upon initial recognition. Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measured at amortized cost, included direct attributable transaction costs.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal (lanjutan)

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha mencakup pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainnya, utang obligasi, utang bank serta liabilitas jangka panjang lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian harus diakui sebagai laba atau rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasinya.

iii) Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

ii) Financial liabilities (continued)

Initial recognition (continued)

The financial liabilities of the Company, which include short-term bank loans, trade payables, accrued expenses, other current liabilities, bonds payable, bank loans and other long-term liabilities, are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Subsequent measurement

After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Gains and losses are recognized as profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

iii) Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a current enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

iv) Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang secara aktif diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tanpa adanya pengurangan atas biaya transaksi. Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar (*arm's-length market transactions*), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lainnya.

v) Biaya perolehan yang diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokok. Perhitungan ini mencakup seluruh premi atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya transaksi serta komisi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

vi) Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Kelompok Usaha terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

iv) Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are traded in active markets at each reporting date is determined based on to quoted market prices or dealer price quotation (bid price for long position and ask price for short position), without any deduction for transaction costs. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques include recent arm's-length market transactions, referring to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flows analysis, or other valuation models.

v) Amortized cost of financial instruments

Amortized cost is computed using the effective interest rate method deducted by allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

vi) Impairment of financial assets

At the end of each reporting period, the Company assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a company of financial assets is impaired.

For loans and receivables carried at amortized cost, the Company initially assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**vi) Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan)**

Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

**vi) Impairment of financial assets
(continued)**

If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a company of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**vi) Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan)**

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui sebagai laba atau rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan untuk pengukuran rugi penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Kelompok Usaha. Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan penurunan nilai. Pemulihan tidak akan menghasilkan nilai tercatat dari aset keuangan melebihi biaya perolehan yang diamortisasi, jika penurunan nilai tidak diakui pada saat penurunan nilai tersebut dipulihkan. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

**vi) Impairment of financial assets
(continued)**

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is recognized as profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. Loans and receivables, together with the associated allowances, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Company. If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment account. The reversal shall not result in a carrying amount of the financial assets that exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized as profit or loss.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**vii) Penghentian pengakuan aset dan
liabilitas keuangan**

Aset keuangan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau (2) Kelompok Usaha memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan salah satu diantara (a) Kelompok Usaha secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Kelompok Usaha secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut.

Apabila Kelompok Usaha mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, atau tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

**vii) Derecognition of financial assets and
liabilities**

Financial assets

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a company of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired, or (2) the Company have transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement, and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Where the Company has transferred their rights to receive cash flows from a financial asset or have entered into a pass-through arrangement, or has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset but has transferred control of the financial asset, a new financial asset is recognized to the extent of the Company's continuing involvement in the asset.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**vii) Penghentian pengakuan aset dan
liabilitas keuangan (lanjutan)**

Aset keuangan (lanjutan)

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.

Liabilitas keuangan

Dalam hal ini, Kelompok Usaha juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer diukur atas dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban Kelompok Usaha yang ditahan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung, dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui sebagai laba atau rugi.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

**vii) Derecognition of financial assets and
liabilities (continued)**

Financial assets (continued)

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that the Company could be required to repay.

Financial liabilities

In this case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed, and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity, is recognized as profit or loss.

A financial liability is derecognized when the contractual obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized as profit or loss.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

v. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yaitu 1.444.029 saham.

w. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

x. Informasi Segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk atau jasa tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk atau jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Item-item segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the income for the year attributable to the owners of the parent entity by the weighted-average number of shares outstanding during the year, which is 1,444,029 shares.

w. Provision

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

x. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain products or services (business segment), or in providing products or services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-company balances and intra-company transactions are eliminated.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

y. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

z. Penerapan standar akuntansi baru

Efektif tanggal 1 Januari 2019, Kelompok Usaha menerapkan beberapa standar akuntansi baru yang relevan terhadap Kelompok Usaha berikut ini:

- Amandemen PSAK 24 (2018) - Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program.
- Penyesuaian 2018 PSAK 22 - Kombinasi Bisnis.
- Penyesuaian 2018 PSAK 26 - Biaya Pinjaman.
- Penyesuaian 2018 PSAK 46 - Pajak Penghasilan.
- Penyesuaian 2018 PSAK 66 - Pengaturan Bersama.
- ISAK 33 - Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka.
- ISAK 34 - Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan.
- Amandemen PSAK 15 - Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.

Penerapan ini tidak memberikan dampak yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

y. Impairment of Non-financial Assets

Company assesses at reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when impairment testing for an asset is required, Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

z. Adoption of new accounting standards

Effective January 1, 2019, the Company adopted several new accounting standards which are relevant to the Company as follows:

- *Amendments to PSAK 24 (2018) - Employee Benefits on the Plan Amendment, Curtailment or Settlement.*
- *2018 Improvement to PSAK 22 - Business Combinations.*
- *2018 Improvement to PSAK 26 - Borrowing Costs.*
- *2018 Improvement to PSAK 46 - Income Taxes.*
- *2018 Improvement to PSAK 66 - Joint Arrangements.*
- *ISAK 33 - Foreign currency Transaction and Advance Consideration.*
- *ISAK 34 - Uncertainty over Income Tax Treatments.*
- *Amendments to PSAK 15 - Investments in Joint Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures.*

The adoption has no significant impact on the financial reporting and disclosure in the consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif**

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

- PSAK 71: Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan PSAK 71 "Instrumen keuangan" yang secara efektif akan menggantikan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". PSAK 71 membahas klasifikasi, pengukuran dan penghentian pengakuan dari aset dan liabilitas keuangan, memperkenalkan aturan baru untuk akuntansi lindung nilai dan model penurunan nilai baru untuk aset keuangan. PSAK 71 berlaku efektif sejak 1 Januari 2020 dimana penerapan dini diperkenankan. Selain untuk akuntansi lindung nilai, penerapan standar ini harus dilakukan secara retrospektif dengan penyajian kembali informasi komparatif tidak diwajibkan.

Terkait dengan penurunan nilai untuk aset keuangan yang dimiliki oleh Kelompok Usaha, model penurunan nilai di dalam PSAK 71 mensyaratkan pengakuan atas provisi penurunan nilai berdasarkan kerugian kredit espektasian dibandingkan kerugian aktual kredit di dalam PSAK 55. Hal ini berlaku untuk aset keuangan diklasifikasi dalam biaya amortisasi, instrumen utang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya, kontrak aset dalam PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak Pelanggan", piutang sewa, komitmen pinjaman dan kontrak garansi keuangan tertentu. Kelompok Usaha masih dalam proses melakukan perhitungan dampak penyesuaian atas penurunan nilai. Kuantum atau besaran atas tambahan nilai penurunan nilai yang perlu dibukukan oleh Kelompok Usaha masih belum dapat ditentukan karena membutuhkan informasi yang mencukupi pada tanggal adopsi PSAK 71 di 1 Januari 2020.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective**

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current consolidated financial statements are disclosed below. Company intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

- PSAK 71: The Financial Accounting Standards Board has adopted PSAK 71 "Financial instruments" which will effectively replace PSAK 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement". PSAK 71 discusses the classification, measurement and derecognition of financial assets and liabilities, introducing new rules for hedge accounting and new impairment models for financial assets. PSAK 71 is effective since January 1, 2020 where early adoption is permitted. In addition to hedge accounting, the application of this standard must be done retrospectively with restatement of comparative information not required.

Regarding impairment for financial assets held by the Company, the impairment model in PSAK 71 requires recognition of the provision for impairment based on expected loan losses compared to actual credit losses in PSAK 55. This applies to financial assets classified as amortization costs, instruments debt is measured at fair value through other comprehensive income, asset contracts in PSAK 72 "Revenues from Customer Contracts", lease receivables, loan commitments and certain financial guarantee contracts. The Company is still in the process of calculating the effects of adjustments for impairment. The quantum or amount of additional impairment needed to be recorded by the Company cannot be determined yet because it requires sufficient information on the adoption date of PSAK 71 on 1 January 2020.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

Standar baru juga memperluas persyaratan pengungkapan dan perubahan penyajian. Hal ini diharapkan mengubah sifat dan batasan dari pengungkapan Kelompok Usaha tentang instrumen keuangan terutama pada tahun penerapan standar baru.

- PSAK 72: merupakan standar baru yang memberikan kerangka kerja yang komprehensif terkait dengan penentuan bagaimana pendapatan harus diakui, waktu pengakuan pendapatan, serta jumlah yang harus diakui oleh Kelompok Usaha. Standar ini memperkenalkan model tunggal yang digunakan dalam pencatatan pendapatan dengan pelanggan, disebut dengan model lima langkah (Identifikasi Kontrak dengan Pelanggan, Identifikasi Kewajiban Pelaksanaan, Menentukan Harga Transaksi, Alokasi Harga Transaksi, dan Pengakuan Pendapatan), yang harus diterapkan di seluruh kontrak dengan pelanggan. Standar ini juga memperkenalkan beberapa konsep baru seperti perlakuan akuntansi terkait kontrak modifikasi dan kapitalisasi biaya-biaya yang terkait dengan kontrak dengan pelanggan.

PSAK 72 secara efektif akan menggantikan seluruh standar terkait dengan pendapatan yang berlaku saat ini; yaitu PSAK 23 "Pendapatan", PSAK 34 "Kontrak konstruksi", PSAK 44 "Akuntansi aktivitas pengembangan real estate", dan ISAK 10 "Program loyalitas pelanggan". PSAK 72 akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

The new standard also expands disclosure requirements and changes in presentation. This is expected to change the nature and limits of the Company's disclosure of financial instruments, especially in the year of the adoption of new standards.

- PSAK 72: is a new standard that provides a comprehensive framework related to determining how revenue must be recognized, the timing of revenue recognition, and the amount that must be recognized by the Company. This standard introduces a single model used in recording revenue with customers, called the five-step model (Identification of Contracts with Customers, Identification of Implementation Obligations, Determining Transaction Prices, Transaction Price Allocations, and Revenue Recognition), which must be applied in all contracts with customers. This standard also introduces several new concepts such as accounting treatment related to contract modifications and capitalization of costs associated with contracts with customers.

PSAK 72 will effectively replace all standards relating to current income; namely PSAK 23 "Revenue", PSAK 34 "Contract construction", PSAK 44 "Accounting for real estate development activities", and ISAK 10 "Customer loyalty program". PSAK 72 will be effective as of January 1, 2020 with early application permitted.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

Terdapat dua alternatif metode yang dapat digunakan Kelompok Usaha dalam proses transisi PSAK 72. Metode yang pertama, standar diperkenankan secara retrospektif pada kontrak dengan pelanggan yang terdapat pada setiap periode yang disajikan dalam laporan keuangan. Metode yang kedua, Kelompok Usaha diperkenankan untuk menggunakan metode retrospektif modifikasi dimana PSAK 72 hanya akan diterapkan pada transaksi setelah 1 Januari 2020 dimana dampak kumulatif atas penerapan awal akan dibukukan sebagai penyesuaian saldo laba awal (atas komponen ekuitas lainnya, yang sesuai) per 1 Januari 2020.

Dalam tahap ini, Kuantum atau besaran dampak penyesuaian yang harus dibukukan oleh Kelompok Usaha masih belum dapat ditentukan. Kelompok Usaha akan melakukan peninjauan yang lebih mendalam atas dampaknya terhadap periode dua belas bulan ke depan.

- PSAK 73: memberikan model yang komprehensif dalam mengidentifikasi kontrak sewa serta perlakuan akuntansi atas transaksi sewa baik sebagai lessee ataupun lessor. PSAK 73 mengutamakan pentingnya pengendalian dalam identifikasi kontrak sewa dimana faktor yang membedakan kontrak sewa dan kontrak jasa tergantung pada pihak mana yang memiliki pengendalian atas aset identifikasian. Apabila pelanggan yang memiliki pengendalian atas aset identifikasian, kontrak tersebut memenuhi definisi sewa dalam PSAK 73.

PSAK 73 secara efektif akan menggantikan beberapa standar dan interpretasi, yaitu: PSAK 30 "Sewa", ISAK 8 "Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa", ISAK 23 "Sewa operasi-insentif", ISAK 24 "Evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa", dan ISAK 25 "Hak atas tanah". PSAK 73 akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini atas PSAK 73 diperkenankan selama Kelompok Usaha menerapkan PSAK 72 "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan" pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 73.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

There are two alternative methods that the Company can use in the transition process of PSAK.72. The first method, the standard is allowed retrospectively on contracts with customers that exist in each period presented in the financial statements. The second method, the Company is permitted to use a retrospective modification method where PSAK.72 will only be applied to transactions after January 1, 2020 where the cumulative impact on initial adoption will be recorded as an adjustment to the initial profit balance (for other equity components, as appropriate) as of January 1, 2020.

At this stage, the Quantum or the magnitude of the impact of the adjustments that the Company must book is still undetermined. The Company will conduct a more in-depth review of its impact on the next twelve month period.

- *PSAK 73: provides a comprehensive model for identifying lease contracts as well as accounting treatment of rental transactions as lessees or lessors. PSAK 73 emphasizes the importance of control in the identification of rental contracts where the factors that differentiate rental contracts and service contracts depend on which party has control over the identification assets. If the customer has control over the identification assets, the contract meets the rental definition in PSAK 73.*
- *PSAK 73 will effectively replace several standards and interpretations, namely: PSAK 30 "Leases", ISAK 8 "Determination of whether an agreement contains a lease", ISAK 23 "Operating-incentive leases", ISAK 24 "Evaluation of the substance of several transactions involving a legal form of lease ", and ISAK 25" Land rights ". PSAK 73 will be effective as of January 1, 2020. Early application of PSAK 73 is permitted as long as the Company applies PSAK 72 "Revenue from contracts with customers" on or before the date of PSAK 73's initial adoption.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

Penerapan PSAK 73 akan berdampak pada hampir seluruh sewa yang diakui di laporan posisi keuangan, dimana standar ini menghapuskan perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan. Beban sewa operasi dalam PSAK 73, akan dikapitalisasi sebagai aset (atau hak guna atas barang yang disewakan) dan liabilitas keuangan yang menggambarkan komitmen pembayaran sewa di masa depan setelah mempertimbangkan dampak diskonto dan panduan praktis yang akan digunakan oleh Kelompok Usaha. Pengecualian atas perlakuan tersebut hanya terdapat pada sewa jangka pendek dan aset yang bernilai rendah. Lessee diharuskan untuk mengakui dan menyajikan secara terpisah biaya bunga yang muncul dari kewajiban sewa dengan biaya depresiasi dari hak guna atas barang yang disewakan.

The adoption of PSAK 73 will have an impact on almost all leases recognized in the statement of financial position, where this standard eliminates the difference between operating leases and financing. Operating lease costs in PSAK 73, will be capitalized as assets (or use rights for leased goods) and financial liabilities that reflect future rental payment commitments after considering the impact of discounts and practical guidelines to be used by the Company. Exceptions to this treatment are only for short-term leases and low-value assets. The lessee is required to recognize and present separately the interest expense arising from the lease obligation with the depreciation expense of the leasehold rights.

Perlakuan akuntansi untuk lessor tidak akan berbeda secara signifikan.

The accounting treatment for the lessor will not differ significantly.

Dalam tahap ini, kuantum atau besaran dampak penyesuaian yang harus dibukukan oleh Kelompok Usaha masih belum dapat ditentukan. Kelompok Usaha akan melakukan peninjauan yang lebih mendalam atas dampaknya terhadap periode dua belas bulan ke depan.

At this stage, the quantum or magnitude of the impact of the adjustments that the Company must book is not yet determined. The Company will conduct a more in-depth review of its impact on the next twelve month period.

- Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif yang mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga.
- Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan yang mengklarifikasi definisi materi dengan tujuan menyalarkan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait.

- *Amendments to PSAK 71: Financial Instruments concerning the Accelerated Features of Repayment with Negative Compensation which regulates that financial assets with an accelerated repayment feature that can produce negative compensation meet the qualifications as contractual cash flows originating solely from principal and interest payments.*
- *Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements and PSAK 25: Accounting Policies, Changes in accounting estimates and errors that clarify material definitions with the aim of harmonizing the definitions used in the conceptual framework and several related PSAKs.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain.

Estimasi dan asumsi tersebut dibuat berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari setiap entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi sebagian besar pendapatan, biaya dan pendanaan masing-masing entitas.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan ditetapkan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (2014) dipenuhi. Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti dijelaskan pada Catatan 2u.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS**

In the application of the Company's accounting policies, which are described in Note 2 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgements and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources.

These estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgements and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

Judgements

The following judgements are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements.

Determination of functional currency

The functional currency of each entity within the Company is the currency from the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that mainly influence the revenues, costs and financing of each of the respective entities.

Classification of financial assets and financial liabilities

Classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with accounting policies disclosed in Note 2u.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Penyisihan penurunan nilai piutang

Kelompok Usaha mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan, kualitas jaminan yang diterima dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan penurunan nilai piutang.

Bila Kelompok Usaha memutuskan bahwa tidak terdapat bukti obyektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang usaha, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Kelompok Usaha menyertakannya dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terutang.

Arus kas masa depan pada kelompok piutang usaha yang dievaluasi secara kolektif untuk penurunan nilai diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian historis bagi piutang usaha dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan piutang usaha pada kelompok tersebut. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 6.

Perjanjian konsesi jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

The allowance of impairment of receivables

The Company evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company use judgement, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer, quality of collateral received and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company expect to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables.

If the Company determine that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed trade receivables, whether significant or not, it includes the asset in a company of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. The characteristics chosen are relevant to the estimation of future cash flows for companys of such trade receivables by being indicative of the customers' ability to pay all amounts due.

Future cash flows in a company of trade receivables that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for the trade receivables with credit risk characteristics similar to those in the company. Further details are disclosed in Note 6.

Service concession arrangement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. It provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)
Pertimbangan (lanjutan)**

Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

OP memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak OP dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku (Catatan 45a). Pada akhir masa konsesi jasa, Kelompok Usaha harus menyerahkan terminal Kalibaru kepada OP bebas dari setiap bentuk pembebanan, termasuk tanah reklamasi, aset tidak bergerak dan aset bergerak yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian terminal Kalibaru.

Kelompok Usaha berpendapat bahwa Perjanjian Konsesi memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

Kelompok Usaha diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama tahun berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Kelompok Usaha mengakui pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi masing-masing sebesar Rp1.542.697.617 dan Rp715.708.838.

Kelompok Usaha mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK 34. Kelompok Usaha mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima tanpa margin.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)
Judgements (continued)**

Service concession arrangement (continued)

OP granted the rights to the Company, including the right to implement the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of implementing the project without limiting the right of OP in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law (Note 45a). Upon expiry of the service concession period, the Company shall handover the Kalibaru Terminal free of any form of charges, including reclamation land, non-removable assets and movable assets therein directly related to, and in connection with, the operation of the Kalibaru Terminal.

The Company has made judgement that the Concession Agreement qualifies under the intangible asset model, wherein the concession asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

The Company is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession assets made during the year in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. For the years ended December 31, 2019 and 2018, the Company recognized construction revenue amounting to Rp1,542,697,617 and Rp715,708,838, respectively.

The Company recognizes construction revenue of concession asset and construction costs of concession asset in accordance with PSAK 34. The Company measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received without margin.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 43.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Kelompok Usaha diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 21. Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Fair value of financial assets and financial liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation methods used.

The fair value of financial assets and financial liabilities is disclosed in Note 43.

Estimate useful lives of fixed assets

The useful life of each of the item of the Company's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

Estimated useful lives of fixed assets are disclosed in Note 21. There is no change in the estimated useful lives of fixed assets during the year.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Kelompok Usaha.

Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2k, 2l, 12, 13, 14, 15 dan 16.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya belum dapat dipastikan dalam kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 22.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba fiskal pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2s dan 22.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

Further details are disclosed in Notes 2k, 2l, 12, 13, 14, 15 and 16.

Income tax

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of taxable income. Further details are disclosed in Note 22.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Notes 2s and 22.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan kerja karyawan

Penentuan provisi dan liabilitas imbalan kerja karyawan dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebesar Rp1.966.325.908 dan Rp1.776.917.294 (Catatan 27).

4. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Kas	4.797.709	2.637.178
Bank	1.169.594.929	3.399.196.648
Deposito berjangka	14.429.140.691	14.616.837.653
Total kas dan setara kas	15.603.533.329	18.018.671.479

a. Kas

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Rupiah	4.797.709	2.637.178

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Employee benefits

The determination of the employee benefits provision and liability is dependent on the selection of certain assumptions used by an actuary in calculating such amounts. Actual results that differ from the Management's assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the management's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of employee benefits liability. As of December 31, 2019 and 2018, employee benefits liability amounted to Rp1,966,325,908 and Rp1,776,917,294 (Note 27).

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash on hand
Cash in banks
Time deposits
Total cash and cash equivalents

a. Cash on hand

Rupiah

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

b. Bank

b. Cash in banks

		31 Desember/December 31,		
		2019	2018	
Rupiah:				Rupiah:
Pihak ketiga				Third parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk	100.090.077	353.646.552		PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Permata Tbk	21.429.637	156.706.420		PT Bank Permata Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	3.771.120	120.164.092		PT Bank Central Asia Tbk
PT DBS Indonesia	1.321.841	4.192.132		PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Victoria International Tbk	172.878	10.813.821		PT Bank Victoria International Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	5.523.679	19.326.945		Others (each below Rp2 billion)
Pihak berelasi (Catatan 41a)				Related parties (Note 41a)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	516.127.675	873.774.196		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	140.963.425	767.519.280		PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	19.976.271	32.711.087		PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	10.386.922	2.814.711		PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank BNI Syariah	9.671.050	7.222.415		PT Bank BNI Syariah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.244.179	802.805.464		PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Subtotal	830.678.754	3.151.697.115		Sub-total
Dolar AS:				US Dollar:
Pihak ketiga				Third parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk	37.105.758	169.057.553		PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	24.681.736	5.589.763		PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	15.750.732	1.165.193		PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	4.226.276	4.333.711		PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	2.817.266	2.918.130		PT Bank Permata Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	91.019	219.330		Others (each below Rp2 billion)
Pihak berelasi (Catatan 41a)				Related parties (Note 41a)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	193.637.340	15.766.760		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	36.287.523	40.066.025		PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	24.318.481	8.062.416		PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Subtotal	338.916.131	247.178.881		Sub-total
Euro Eropa:				European Euro:
Pihak berelasi (Catatan 41a)				Related parties (Note 41a)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	44	320.652		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total bank	1.169.594.929	3.399.196.648		Total cash in banks

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

c. Deposito berjangka

c. Time deposits

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Rupiah:			Rupiah:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Bukopin Tbk	370.200.000	65.670.648	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	200.000.000	100.000.000	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank UOB Indonesia Tbk	35.596.970	-	PT Bank UOB Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	31.682.478	37.200.337	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Mega Tbk	26.011.830	2.578.052	PT Bank Mega Tbk
PT Bank J Trust Indonesia	5.000.000	-	PT Bank J Trust Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	3.000.000	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank BCA Syariah	2.000.000	2.000.000	PT Bank BCA Syariah
PT Bank CIMB Niaga Syariah	-	50.000.000	PT Bank CIMB Niaga Syariah
PT Bank Victoria International Tbk	-	4.000.000	PT Bank Victoria International Tbk
Pihak berelasi (Catatan 41a)			Related parties (Note 41a)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.073.096.983	854.768.648	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	583.240.758	930.074.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	548.297.580	557.631.769	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	275.290.490	25.000.000	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	131.816.463	10.535.860	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	19.500.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
Subtotal	3.304.733.552	2.639.459.314	Sub-total
Dolar AS:			US Dollar:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Central Asia Tbk	5.605.624	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	1.785.869.325	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Maybank Indonesia	-	1.013.670.000	PT Bank Maybank Indonesia
Pihak berelasi (Catatan 41a)			Related parties (Note 41a)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.144.937.050	3.673.467.675	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.906.696.846	5.032.416.814	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	67.167.619	-	PT Mandiri (Persero) Tbk
Subtotal	11.124.407.139	11.505.423.814	Sub-total
Dolar Singapura:			Singapore Dollar:
Pihak berelasi (Catatan 41a)			Related parties (Note 41a)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	471.954.525	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total deposito berjangka	14.429.140.691	14.616.837.653	Total time deposits

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

c. Deposito berjangka (lanjutan)

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

c. Time deposits (continued)

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2019	2018
Rupiah	5,00% - 9,00%	4,00% - 9,50%
Dolar AS	1,35% - 3,55%	1,25% - 3,70%
Dolar Singapura	-	1,60%

Rupiah
US Dollar
Singapore Dollar

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

31 Desember/December 31,

	2019	2018
Deposito berjangka		
Rupiah:		
Pihak ketiga		
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga	-	17.000.000
PT Bank Panin Syariah	-	2.000.000
Pihak berelasi (Catatan 41b)		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	104.642.400	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	372.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	-	50.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	203.053.994
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	4.000.000
Dolar AS:		
Pihak berelasi (Catatan 41b)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.154.655.000	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	2.099.745.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	796.455.000
Total deposito berjangka	2.259.297.400	3.544.253.994
Efek yang diperdagangkan	337.403.726	291.753.295
Total investasi jangka pendek	2.596.701.126	3.836.007.289

5. SHORT-TERM INVESTMENTS

Time deposits
Rupiah:
Third parties
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga
PT Bank Panin Syariah
Related parties (Note 41b)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
US Dollar:
Related parties (Note 41b)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total time deposits
Marketable securities
Total short-term investments

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

5. INVESTASI JANGKA PENDEK (lanjutan)

Deposito berjangka merupakan deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun serta tidak dijadikan jaminan.

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2019	2018
Rupiah	7.5%	4,44% - 9,25%
Dolar AS	3.7%	3,00% - 3,50%

Efek yang diperdagangkan merupakan instrumen keuangan dalam bentuk saham yang dibeli melalui PT Syailendra Capital dan PT Sinarmas Asset Management, manajer investasi.

6. PIUTANG USAHA

a. Berdasarkan pelanggan

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Pihak ketiga		
Swasta	909.768.844	945.087.249
Perorangan	5.430.314	5.604.648
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(202.372.414)	(316.613.865)
Pihak ketiga - neto	712.826.744	634.078.032
Pihak berelasi (Catatan 41c)	345.392.417	210.172.437
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(210.193.679)	(54.297.115)
Pihak berelasi - neto	135.198.738	155.875.322
Piutang usaha - neto	848.025.482	789.953.354

5. SHORT-TERM INVESTMENTS (continued)

Time deposits represent deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year and were not used as collateral.

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

Rupiah
US Dollar

Marketable securities represent financial instrument in shares of stock purchased through PT Syailendra Capital and PT Sinarmas Asset Management, investment manager.

6. TRADE RECEIVABLES

a. By customer

Third parties
Private
Individuals

Less:
Allowance for impairment

Third parties - net

Related parties (Note 41c)

Less:
Allowance for impairment

Related parties - net

Trade receivables - net

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Rupiah	1.205.344.597	1.036.949.327	Rupiah
Dolar AS	55.168.076	91.475.032	US Dollar
Dolar Singapura	78.902	32.439.975	Singapore Dollar
Total	1.260.591.575	1.160.864.334	Total
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(412.566.093)	(370.910.980)	Allowance for impairment
Neto	848.025.482	789.953.354	Net

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

b. By currency

c. Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Saldo awal	370.910.980	376.788.230	Beginning balance
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan	41.655.113	(5.877.250)	Provision (recovery) for the year
Saldo akhir	412.566.093	370.910.980	Ending balance

c. The movements in the allowance for impairment of receivables is as follows:

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan, manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Tabel berikut menyajikan analisis umur piutang usaha.

Based on a review of the status of each individual receivable accounts at the end of the reporting period, the Company's management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible receivables.

The following table presents the aging analysis of trade receivables.

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Belum jatuh tempo	255.115.082	186.544.320	Not yet overdue
Lewat jatuh tempo			Overdue
1-30 hari	255.538.660	185.984.771	1-30 days
31-60 hari	111.820.153	147.141.362	31-60 days
61-150 hari	102.438.411	71.231.027	61-150 days
Lebih dari 150 hari	535.679.269	569.962.854	Over 150 days
Saldo awal	1.260.591.575	1.160.864.334	Beginning balance
Penyisihan penurunan nilai	(412.566.093)	(370.910.980)	Allowance for impairment
Neto	848.025.482	789.953.354	Net

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

7. PIUTANG LAIN-LAIN

7. OTHER RECEIVABLES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pihak ketiga			Third parties
Swasta	70.235.566	40.109.643	Private
Perorangan	5.414.839	943.136	Individuals
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(30.532.427)	(31.522.696)	Allowance for impairment
Pihak ketiga - neto	45.117.978	9.530.083	Third parties - net
Pihak berelasi (Catatan 41d)	821.218.704	672.932.848	Related parties (Note 41d)
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(36.267.285)	(32.764.117)	Allowance for impairment
Pihak berelasi - neto	784.951.419	640.168.731	Related parties - net
Piutang lain-lain - neto	830.069.397	649.698.814	Other receivables - net

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

The movement in the allowance for impairment of other receivable are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Saldo awal	64.286.813	61.770.315	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	2.512.899	2.516.498	Provision for the year
Saldo akhir	66.799.712	64.286.813	Ending balance

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan masing-masing piutang pada akhir periode pelaporan, manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Based on review of the status of each individual other receivable accounts at the end of the reporting period, the Company's management believes that the allowance for impairment loss is adequate to cover possible losses from uncollectible other receivables.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

8. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

8. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Uang muka			Advances
Operasional	7.033.421	8.921.964	Operational
Lain-lain	892.674	13.268.042	Others
Subtotal	7.926.095	22.190.006	Sub-total
Beban dibayar di muka			Prepaid expenses
Pegawai	47.700.658	41.911.549	Personnel
Asuransi	9.782.442	12.918.214	Insurance
Umum	5.510.554	17.783.362	General
Sewa	5.102.500	7.063.765	Rental
Lain-lain	28.159.732	18.201.282	Others
Subtotal	96.255.886	97.878.172	Sub-total
Total	104.181.981	120.068.178	Total

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, terdapat uang muka operasional yang telah dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perusahaan namun belum dilakukan pertanggungjawaban masing-masing sebesar Rp712.249 dan Rp13.561.377.

As of December 31, 2019 and 2018, there are advances for operational which has been charged to the Company's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income but has not been accounted amounted to Rp712,249 and Rp13,561,377.

9. PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA

9. ACCRUED REVENUES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pihak ketiga			Third parties
Pelayanan tanah, bangunan, air, dan listrik	80.411.283	10.743.824	Land, building, water and electrical services
Pelayanan jasa terminal	60.541.624	120.261.350	Terminal services
Jasa logistik	21.524.157	33.526.077	Logistic services
Pelayanan jasa kapal	12.269.114	9.976.452	Vessel services
Pelayanan kesehatan	9.906.869	22.659.882	Medical services
Pelayanan terminal petikemas	6.653.533	17.255.930	Container terminal services
Pelayanan jasa barang	3.979.721	10.353.249	Cargo services
Pengusahaan peralatan	2.720.876	21.608.684	Equipment services
Lain-lain	60.858.686	10.528.815	Others
Subtotal	258.865.863	256.914.263	Sub-total
Pihak berelasi (Catatan 41e)	46.586.491	65.953.809	Related parties (Note 41e)
Total	305.452.354	322.868.072	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

10. PERSEDIAAN

10. INVENTORIES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Suku cadang	50.398.366	46.300.884	Spareparts
Bahan bakar	16.203.938	1.866.460	Fuels
Obat, bahan, dan alat medis	10.924.650	13.236.622	Medicines, materials and equipment
Alat tulis dan barang cetakan	1.009.483	1.706.454	Stationaries and printings
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	8.580.437	949.230	Others (each below Rp1 billion)
Total	87.116.874	64.059.650	Total
Dikurangi:			Less:
Penyisihan persediaan usang	(4.176.278)	(4.920.226)	Allowance for inventory obsolescence
Neto	82.940.596	59.139.424	Net

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:

The movements are the allowance for inventory obsolescence is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Saldo awal	4.920.226	3.911.120	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	(710.590)	797.211	Provision for the year
Efek penjabaran mata uang asing	(33.358)	211.895	Effect of foreign exchange translation
Saldo akhir	4.176.278	4.920.226	Ending balance

11. INVESTASI JANGKA PANJANG

11. LONG-TERM INVESTMENT

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Investasi pada entitas asosiasi	2.757.291.330	2.362.825.278	Investment in associates
Investasi pada penyertaan saham	50.906.100	524.362.036	Investment in share of stocks
Investasi pada surat utang	402.826.170	324.550.117	Investment in bonds
Total	3.211.023.600	3.211.737.431	Total

a. Investasi pada entitas asosiasi

a. Investment in associates

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
JICT (Catatan 46b, 46c, 46d dan 46e)	1.802.286.963	1.631.969.829	JICT (Notes 46b, 46c, 46d and 46e)
CTP	584.174.631	448.806.191	CTP
NPCT1 (Catatan 45d)	337.706.705	248.748.056	NPCT1 (Notes 45d)
TPI	33.123.031	33.301.202	TPI
Total	2.757.291.330	2.362.825.278	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

11. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2019

	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Nilai tercatat/ Carrying value
Metode ekuitas					
Dimiliki melalui Perusahaan					
JICT	48,90%	108.289.248	1.113.555.444	580.442.271	1.802.286.963
TPI	25,00%	37.500.000	(4.376.969)	-	33.123.031
Dimiliki melalui API					
CTP	45,00%	436.255.820	147.918.811	-	584.174.631
Dimiliki melalui IPC TPK					
NPCT1	51,00%	173.770.056	141.558.496	22.378.153	337.706.705
Total		755.815.124	1.398.655.782	602.820.424	2.757.291.330

Equity method
Owned through the Company
JICT
TPI
Owned through API
CTP
Owned through IPC TPK
NPCT1
Total

31 Desember/December 31, 2018

	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Nilai tercatat/ Carrying value
Metode ekuitas					
Dimiliki melalui Perusahaan					
JICT	48,90%	108.289.248	1.098.225.725	425.454.856	1.631.969.829
TPI	25,00%	37.500.000	(4.198.798)	-	33.301.202
Dimiliki melalui API					
CTP	45,00%	436.255.820	12.550.371	-	448.806.191
Dimiliki melalui IPC TPK					
NPCT1	51,00%	173.770.056	41.145.336	33.832.664	248.748.056
Total		755.815.124	1.147.722.634	459.287.520	2.362.825.278

Equity method
Owned through the Company
JICT
TPI
Owned through API
CTP
Owned through IPC TPK
NPCT1
Total

b. Investasi pada penyertaan saham

b. Investment in share of stock

31 Desember/December 31,

	2019	2018
Metode biaya		
PT Djakarta Lloyd	20.628.000	20.628.000
PT Astra International Tbk	17.312.500	5.481.140
PT Bukit Asam Tbk	5.320.000	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.102.500	-
PT United Tractors Tbk	-	26.286.085
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	-	17.212.965
PT Vale Indonesia Tbk	-	13.495.422
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	-	11.497.500
PT XL Axiata Tbk	-	10.185.318
PT Adaro Energy Tbk	-	7.310.655
PT Holcim Indonesia Tbk	-	6.286.098
PT Delta Dunia Makmur Tbk	-	5.172.300
PT Bumi Serpong Damai Tbk	-	2.868.177
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	-	2.664.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	2.343.132
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	2.543.100	392.931.244
Total	50.906.100	524.362.036

Cost method
PT Djakarta Lloyd
PT Astra International Tbk
PT Bukit Asam Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT United Tractors Tbk
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT Vale Indonesia Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT XL Axiata Tbk
PT Adaro Energy Tbk
PT Holcim Indonesia Tbk
PT Delta Dunia Makmur Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Others (each below Rp2 billion)

Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

11. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. Investasi pada surat utang

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	97.074.515	95.000.000
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	51.367.050	20.000.000
PT Medco Power Indonesia	50.432.290	86.700.775
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	50.000.000	-
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	-	50.000.000
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	-	22.940.425
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	153.952.315	49.908.917
Total	402.826.170	324.550.117

11. LONG-TERM INVESTMENT (continued)

c. Investment in bonds

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
PT Medco Power Indonesia	PT Medco Power Indonesia
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Others (each below Rp2 billion)	Others (each below Rp2 billion)
Total	Total

12. PROPERTI INVESTASI

	31 Desember/ December 31, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2019	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	45.011.598	-	-	(8.741)	45.002.857	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	652.779.657	-	-	(8.745.024)	644.034.633	Port facilities
Jalan dan bangunan	12.799.354	-	-	8.745.024	21.545.378	Roads and buildings
Total	710.590.609	-	-	(8.741)	710.582.868	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(326.645.743)	(19.356.777)	-	-	(346.002.520)	Port facilities
Jalan dan bangunan	(6.802.419)	(482.442)	-	-	(7.284.861)	Roads and buildings
Total	(333.448.162)	(19.839.219)	-	-	(353.287.381)	Total
Nilai buku neto	377.142.447				357.295.487	Net book value
	31 Desember/ December 31, 2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2018	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	45.011.598	-	-	-	45.011.598	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	650.817.393	-	-	1.962.264	652.779.657	Port facilities
Jalan dan bangunan	14.761.618	-	-	(1.962.264)	12.799.354	Roads and buildings
Total	710.590.609	-	-	-	710.590.609	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(305.962.211)	(11.458.812)	-	(9.224.720)	(326.645.743)	Port facilities
Jalan dan bangunan	(10.286.378)	(5.740.761)	-	9.224.720	(6.802.419)	Roads and buildings
Total	(316.248.589)	(17.199.573)	-	-	(333.448.162)	Total
Nilai buku neto	394.342.020				377.142.447	Net book value

Beban penyusutan properti investasi dicatat sebagai bagian dari beban operasi.

Nilai wajar properti investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp11.139.878.868 dan Rp10.035.926.908.

Depreciation expenses of investment properties are recorded as part of operating expenses.

The fair value of investment properties for the years ended December 31, 2019 and 2018 are calculated amounting to Rp11,139,878,868 and Rp10,035,926,908, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP

13. FIXED ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2019	
Harga perolehan						Acquisition Costs
Tanah	2.253.903.307	86.852.116	-	155.037	2.340.910.460	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	5.666.729.950	79.842.388	(6.375.332)	35.513.194	5.775.710.200	Port facilities
Kapal	1.694.204.431	87.903.071	(41.781.018)	-	1.740.326.484	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	2.611.900.537	96.315.481	(13.632.860)	60.902.462	2.755.485.620	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	966.492.385	44.202.013	(8.879.365)	30.278.251	1.032.093.284	Port installation
Jalan dan bangunan	1.990.567.548	176.810.615	(87.096.359)	5.201.742	2.085.483.546	Roads and buildings
Peralatan	597.516.344	82.825.244	(3.103.305)	6.557.597	683.795.880	Equipment
Kendaraan	65.026.632	1.018.860	(1.602.507)	17.490	64.460.475	Vehicles
Emplasemen	40.000.139	2.392.134	(992.930)	2.346.609	43.745.952	Emplacement
Subtotal	15.886.341.273	658.161.922	(163.463.676)	140.972.382	16.522.011.901	Sub-total
Aset dalam penyelesaian	1.272.325.406	700.684.387	-	(148.907.651)	1.824.102.142	Construction in progress
Total	17.158.666.679	1.358.846.309	(163.463.676)	(7.935.269)	18.346.114.043	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(1.292.154.461)	(68.788.295)	3.201.448	-	(1.357.741.308)	Port facilities
Kapal	(788.510.726)	(94.748.495)	41.458.150	-	(841.801.071)	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	(1.238.381.952)	(163.821.487)	13.069.045	-	(1.389.134.394)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(272.636.901)	(46.353.394)	4.260.440	-	(314.729.855)	Port installation
Jalan dan bangunan	(458.559.758)	(80.605.817)	24.396.387	-	(514.769.188)	Roads and buildings
Peralatan	(393.657.642)	(61.263.926)	3.041.239	-	(451.880.329)	Equipment
Kendaraan	(38.710.021)	(3.158.102)	1.015.071	-	(40.853.052)	Vehicles
Emplasemen	(19.154.801)	(3.056.148)	992.930	-	(21.218.019)	Emplacement
Total	(4.501.766.262)	(521.795.664)	91.434.710	-	(4.932.127.216)	Total
Dikurangi:						Less:
Penyisihan penurunan nilai	(27.902.984)	1.071.992	-	-	(26.830.992)	Allowance for impairment
Nilai buku neto	12.628.997.433				13.387.155.835	Net book value
	31 Desember/ December 31, 2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2018	
Harga perolehan						Acquisition Costs
Tanah	1.728.032.428	525.870.879	-	-	2.253.903.307	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	5.453.147.825	47.440.586	-	166.141.539	5.666.729.950	Port facilities
Kapal	1.577.588.016	114.057.373	(565.745)	3.124.787	1.694.204.431	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	2.586.792.790	16.245.067	(7.594.413)	16.457.093	2.611.900.537	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	848.367.746	11.669.632	(218.293)	106.673.300	966.492.385	Port installation
Jalan dan bangunan	1.906.437.903	21.597.414	(45.223)	62.577.454	1.990.567.548	Roads and buildings
Peralatan	562.978.254	46.723.014	-	(12.184.924)	597.516.344	Equipment
Kendaraan	72.079.786	770.745	(1.397.179)	(6.426.720)	65.026.632	Vehicles
Emplasemen	38.245.826	1.716.105	-	38.208	40.000.139	Emplacement
Subtotal	14.773.670.574	786.090.815	(9.820.853)	336.400.737	15.886.341.273	Sub-total
Aset dalam penyelesaian	538.543.736	1.075.058.340	-	(341.276.670)	1.272.325.406	Construction in progress
Total	15.312.214.310	1.861.149.155	(9.820.853)	(4.875.933)	17.158.666.679	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(1.177.445.767)	(112.744.121)	-	(1.964.573)	(1.292.154.461)	Port facilities
Kapal	(700.135.110)	(89.736.742)	1.693.268	(332.142)	(788.510.726)	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	(1.077.698.551)	(167.739.169)	7.991.198	(935.430)	(1.238.381.952)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(176.170.561)	(97.020.040)	487.073	66.627	(272.636.901)	Port installation
Jalan dan bangunan	(388.168.692)	(73.417.432)	3.710.170	(683.804)	(458.559.758)	Roads and buildings
Peralatan	(389.480.308)	(3.158.773)	-	(1.018.561)	(393.657.642)	Equipment
Kendaraan	(41.378.812)	(3.632.369)	1.111.137	5.190.023	(38.710.021)	Vehicles
Emplasemen	(16.821.231)	(2.011.430)	-	(322.140)	(19.154.801)	Emplacement
Total	(3.967.299.032)	(549.460.076)	14.992.846	-	(4.501.766.262)	Total
Dikurangi:						Less:
Penyisihan penurunan nilai	(19.064.682)	(8.838.302)	-	-	(27.902.984)	Allowance for impairment
Nilai buku neto	11.325.850.596				12.628.997.433	Net book value

Beban penyusutan aset tetap dicatat sebagai bagian dari beban operasi.

Depreciation expense of fixed assets are recorded as part of operating expenses.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Kelompok Usaha mengasuransikan aset tetap terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya pada PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Bina Dana Arta, PT Asuransi FPG Indonesia, Asuransi Staco Mandiri, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Ramayana Unit Syariah, PT Asuransi Ramayana, PT Fistlight Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Jasindo, MS Amlin, dan Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association dengan total nilai pertanggungan seluruhnya masing-masing sebesar Rp6.125.510.242 dan USD571.000.000 pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp7.061.715.528 dan USD565.000.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang diasuransikan.

Reklasifikasi pada tahun 2019 termasuk reklasifikasi dari akun aset tetap ke akun aset kerjasama operasi dengan nilai perolehan sebesar Rp7.944.010, serta reklasifikasi akun aset properti investasi menjadi akun aset tetap sebesar Rp8.741.

Reklasifikasi pada tahun 2018 termasuk reklasifikasi dari akun aset tetap ke akun aset kerjasama operasi dengan nilai perolehan sebesar Rp4.562.783, serta reklasifikasi akun aset dalam penyelesaian menjadi akun aset takberwujud hak konsesi sebesar Rp313.150.

Penghapusan Aset Tetap

Perusahaan

Pada tahun 2019, Perusahaan menghapusbukan beberapa aset tetap dan telah disetujui oleh Menteri Negara BUMN berdasarkan surat No. S-69.MBU/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, S-647/MBU/11/2017 tanggal 14 November 2017, S-36/MBU/01/2018 tanggal 16 Januari 2016, S-712/MBU/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018, dan S-536/MBU/09/2016 tanggal 8 September 2016.

Total harga perolehan aset tetap yang dihapuskan pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp113.747.216 dan Rp2.396.484 dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp72.028.966 dan Rp183.492.

13. FIXED ASSETS (continued)

As of December 31, 2019 and 2018, the Company insured its fixed assets against losses from fire and other insurable risks to PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Bina Dana Arta, PT Asuransi FPG Indonesia, Asuransi Staco Mandiri, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Ramayana Unit Syariah, PT Asuransi Ramayana, PT Fistlight Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Jasindo, MS Amlin, and Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association with total insurance coverage amounting to Rp6,125,510,242 and USD571,000,000 as of December 31, 2019 and Rp7,061,715,528 and USD565,000,000 as of December 31, 2018. In management's opinion, the above insurance coverage is adequate to cover any possible losses that may arise from such risks.

Reclassification in 2019 included reclassification from fixed assets to joint operation assets amounted to Rp7,944,010, and reclassification of investment properties to fixed assets amounting to Rp8,741.

Reclassification in 2018 included reclassification from fixed assets to joint operation assets amounted to Rp4,562,783, and reclassification of assets under construction to concession rights assets on intangible assets amounting to Rp313,150.

Write-off of Fixed Assets

The Company

In 2019, the Company has written-off certain fixed assets and has been approved by the Minister of State Owned Enterprises based on letter No. S-69.MBU/02/2018 dated February 1, 2018, S-647/MBU/11/2017 dated November 14 2017, S-36/MBU/01/2018 dated January 16, 2016, S-712/MBU/10/2018 dated October 24, 2018, and S-536/MBU/09/2016 dated September 8, 2016.

Total acquisition cost of fixed assets written-off in 2019 and 2018 amounting to Rp113,747,216 and Rp2,396,484 respectively, with book value amounting to Rp72,028,966 and Rp183,492 respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Penghapusan Aset Tetap (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Atas penghapusan dan penjualan aset tetap yang telah dilakukan di 2019, Perusahaan mencatat rugi penjualan aset tetap sebesar Rp979.810 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian.

Rukindo

Berdasarkan keputusan pemegang saham tanpa melalui RUPS tanggal 16 Oktober 2019, Rukindo melakukan penghapusbukuan dan penjualan aset tetap berupa tiga kapal tidak produktif (Halmahera, KKC Tondano, dan KKC Danau Laut Tawar).

Total harga perolehan aset tetap yang dihapuskan pada tahun 2019 sebesar Rp41.145.060 dengan nilai buku sebesar nihil.

Berdasarkan risalah lelang tanggal 19 November 2019 dijelaskan bahwa Rukindo melelang aset tersebut pada tahun 2019 dan mencatat laba atas penjualan aset tetap sebesar Rp9.189.851 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian.

RSP

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 21 Oktober 2019, RSP menyetujui untuk penghapusbukuan aset tetap tertentu yaitu bangunan gedung Rumah Sakit di Boom Baru beserta emplasemennya.

Total harga perolehan aset tetap yang dihapuskan pada tahun 2019 sebesar Rp7.877.020 dengan nilai buku sebesar Rp5.835.381.

Aset tetap tersebut dirubuhkan dan tidak dijual oleh RSP. Atas penghapusan aset tersebut, RSP mencatat kerugian sebesar Rp5.835.381 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

13. FIXED ASSETS (continued)

Write-off of Fixed Assets (continued)

The Company (continued)

Due to write-off and sales of fixed asset which were already performed in 2019, the Company recorded gain on sale of fixed assets amounting to Rp979,810 on consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Rukindo

Based on the shareholders' decision without going through RUPS dated October 16, 2019, Rukindo carried out write off and sales of fixed assets in the form of three unproductive vessels (Halmahera, KKC Tondano, and KKC Danau Laut Tawar).

Total acquisition cost of fixed assets written-off in 2019 amounting to Rp41,145,060, with book value amounting to nil.

Based on the minutes of auction dated November 19, 2019 explained that Rukindo auctioned the assets in 2019 and recorded a gain on sales of fixed assets of Rp9,189,851 in the consolidated statement of profit or loss and comprehensive income.

RSP

Based on Shareholders Decision dated October 21, 2019, RSP agreed to write off certain fixed assets, i.e. named Hospital in Boom Baru, Palembang and its emplacements.

Total acquisition cost of fixed assets written-off in 2019 amounting to Rp7,877,020, with book value amounting to Rp5,835,381.

The fixed assets were demolished and not sold by RSP. Due to write-off of the fixed asset, RSP recorded loss amounting Rp5,835,381 on consolidated statement of profit loss and other comprehensive income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Penghapusan Aset Tetap (lanjutan)

MTI

Berdasarkan RUPS Sirkuler tanggal 29 April 2019, MTI menghapusbukkan aset tetap tertentu yaitu mobil operasional, top loader, bucket steel medium, grabe clamshell, conveyor part, potongan besi, tangga besi, dan workshop.

Total harga perolehan aset tetap yang dihapuskan pada tahun 2019 sebesar Rp694.380 dengan nilai buku sebesar Rp212.110.

MTI melelang aset tersebut di tahun 2019 dan mencatat laba penjualan aset tetap sebesar Rp178.734 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian.

Aset dalam Penyelesaian

Aset dalam penyelesaian terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Bangunan fasilitas pelabuhan	787.031.669	710.107.751
Peralatan	335.905.514	199.706.147
Alat fasilitas pelabuhan	92.417.481	146.352.194
Instalasi fasilitas pelabuhan	6.658.141	95.081.015
Jalan dan bangunan	448.717.217	89.772.941
Emplasemen	2.556.973	2.385.002
Kapal	150.815.147	28.920.356
Total	1.824.102.142	1.272.325.406

Biaya perolehan aset dalam penyelesaian tersebut di atas termasuk beban pinjaman yang dikapitalisasi sebesar Rp6.175.405 dan Rp5.734.460 masing-masing pada tahun 2019 dan 2018.

13. FIXED ASSETS (continued)

Write-off of Fixed Assets (continued)

MTI

Based on RUPS Circular dated April 29, 2019, MTI has written-off certain fixed assets, namely operational cars, top loader, medium bucket steel, clamshell grab, conveyor part, scrap of iron, iron ladder, and workshop.

Total acquisition cost of fixed assets written-off in 2019 amounting to Rp694,380 with book value amounting to Rp212,110.

MTI auctioned the goods in 2019 and recorded gain on sale of fixed assets amounting to Rp178,734 on consolidated statement of profit loss and other comprehensive income.

Construction in Progress

Construction in progress consists of:

31 Desember/December 31,		
2019	2018	
		Port facilities
		Equipment
		Port equipment
		Port installation
		Roads and buildings
		Emplacement
		Vessels
Total	Total	

Cost of construction in progress includes capitalized borrowing cost amounting to Rp6,175,405 and Rp5,734,460 in 2019 and 2018, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam Penyelesaian (lanjutan)

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ Percentage of Completion
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	15% - 94,99%
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	23,53% - 95%
Alat Fasilitas Pelabuhan	0,05% - 94,91%
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	16,04% - 76,04%

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ Percentage of Completion
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	1,5% - 87,18%
Pekerjaan pembangunan kapal	40%
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	51%
Alat Fasilitas Pelabuhan	63% - 95%
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	30% - 52,47%

13. FIXED ASSETS (continued)

Construction in Progress (continued)

The percentages of completion and estimated completion periods of significant construction in progress as of December 31, 2019 are as follows:

Target penyelesaian/ Target of completion	Type of assets
2020	Elevation, reinforcement and dredging of dock project
2020	Construction of yard
2020	Port Equipment Facilities
2020	Port Facility Installation

The percentages of completion and estimated completion periods of significant construction in progress as of December 31, 2018 are as follows:

Target penyelesaian/ Target of completion	Type of assets
2019	Elevation, reinforcement and dredging of dock project
2019	Construction of ship
2019	Construction of yard
2019	Port Equipment Facilities
2019	Port Facility Installation

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET KERJASAMA OPERASI

Aset kerjasama operasi merupakan aset yang diserahkan untuk dikelola oleh TPK Koja dan MKO MTKI masing-masing berdasarkan perjanjian kontraktual dengan PT Hutchison Ports Indonesia (Catatan 46a) dan PT Maspion Industrial Estate (Catatan 46n), sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2019	
Harga perolehan						Acquisition cost
Bangunan fasilitas pelabuhan	764.725.479	-	-	7.944.010	772.669.489	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	86.424.760	-	-	-	86.424.760	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	10.504.447	-	-	-	10.504.447	Port installation
Jalan dan bangunan	602.861	-	-	-	602.861	Roads and buildings
Peralatan	609.224	-	-	-	609.224	Equipment
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	Emplacement
Total	867.397.291	-	-	7.944.010	875.341.301	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(339.121.390)	(22.102.337)	-	-	(361.223.727)	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	(41.690.939)	(6.008.959)	-	-	(47.699.898)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(3.043.523)	(739.052)	-	-	(3.782.575)	Port installation
Jalan dan bangunan	(170.682)	(56.894)	-	-	(227.576)	Roads and buildings
Peralatan	(447.780)	(149.260)	-	-	(597.040)	Equipment
Emplasemen	(532.788)	(177.596)	-	-	(710.384)	Emplacement
Total	(385.007.102)	(29.234.098)	-	-	(414.241.200)	Total
Nilai buku neto	482.390.189				461.100.101	Net book value
	31 Desember/ December 31, 2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2018	
Harga perolehan						Acquisition cost
Bangunan fasilitas pelabuhan	764.768.859	-	-	(43.380)	764.725.479	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	86.424.760	-	-	-	86.424.760	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	5.898.284	-	-	4.606.163	10.504.447	Port installation
Jalan dan bangunan	602.861	-	-	-	602.861	Roads and buildings
Peralatan	609.224	-	-	-	609.224	Equipment
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	Emplacement
Total	862.834.508	-	-	4.562.783	867.397.291	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(319.669.018)	(19.452.372)	-	-	(339.121.390)	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	(33.046.147)	(8.644.792)	-	-	(41.690.939)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(1.791.447)	(1.252.076)	-	-	(3.043.523)	Port installation
Jalan dan bangunan	(113.788)	(56.894)	-	-	(170.682)	Roads and buildings
Peralatan	(298.520)	(149.260)	-	-	(447.780)	Equipment
Emplasemen	(355.192)	(177.596)	-	-	(532.788)	Emplacement
Total	(355.274.112)	(29.732.990)	-	-	(385.007.102)	Total
Nilai buku neto	507.560.396				482.390.189	Net book value

14. JOINT OPERATION ASSETS

Jointly controlled assets represent assets that are transferred to be managed by TPK Koja dan MKO MTKI based on contractual agreement with PT Hutchison Ports Indonesia (Note 46a) and PT Maspion Industrial Estate (Note 46n), respectively, as follow:

15. ASET TAKBERWUJUD

15. INTANGIBLE ASSETS

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Aset hak konsesi	11.073.294.718	9.150.801.841	Concession rights assets
Piranti lunak	369.777.904	284.412.704	Software application
Aset takberwujud lainnya	25.103.155	25.828.087	Other intangible assets
Subtotal	11.468.175.777	9.461.042.632	Sub-total
Akumulasi amortisasi dan penyisihan penurunan nilai	(649.904.297)	(422.093.488)	Accumulated amortization allowance for impairment
Neto	10.818.271.480	9.038.949.144	Net

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

15. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Aset hak konsesi

Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Pontianak kepada Perusahaan masing-masing untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok dan Terminal Kijing di Pelabuhan Pontianak berdasarkan Perjanjian Konsesi (Catatan 45a dan 46o), dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2019	
Biaya perolehan	9.150.801.841	1.930.151.065	(7.658.188)	-	11.073.294.718	Cost
Akumulasi amortisasi	(186.344.486)	(101.462.973)	-	-	(287.807.459)	Accumulated amortization
Nilai tercatat	8.964.457.355				10.785.487.259	Carrying amount
	31 Desember/ December 31, 2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2018	
Biaya perolehan	8.300.923.917	849.564.774	-	313.150	9.150.801.841	Cost
Akumulasi amortisasi	(92.626.304)	(93.718.182)	-	-	(186.344.486)	Accumulated amortization
Nilai tercatat	8.208.297.613				8.964.457.355	Carrying amount

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing persentase rata-rata penyelesaian pembangunan terminal Kalibaru masih dalam konstruksi sebesar 70,52% dan 62,57%, sedangkan persentase rata-rata penyelesaian pembangunan terminal Kijing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 43,66%.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam aset hak konsesi pembangunan terminal Kalibaru untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 and 2018 adalah sebesar Rp123.863.584 dan Rp57.835.654, sedangkan untuk terminal Kijing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp62.200.973.

Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset hak konsesi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

15. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Concession rights assets

Concession rights assets represent assets which were constructed based on the right granted by Main Port Authority Office of Tanjung Priok and Port Authority office of Class II Pontianak Port to the Company to develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port and Kijing Terminal at Pontianak Port, respectively, based on Concession Agreement (Notes 45a and 46o), with details as follows:

As of December 31, 2019 and 2018, the average percentage completion of construction of Kalibaru terminal under construction is 70.52% and 62.57%, respectively, while the average percentage construction for Kijing terminal for the year ended December 31, 2019 is 43.66%.

Borrowing costs capitalized for the concession assets of Kalibaru terminal for the year ended December 31, 2019 and 2018 amounting to Rp123,863,584 and Rp57,835,654 while for Kijing terminal for the year ended December 31 2019 is Rp62,200,973.

The Group's management believes that there was no impairment in the value of concession rights assets as of December 31, 2019 and 2018.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

15. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi *Port Wide Solution* untuk pelayanan *car terminal*, *container terminal* dan pergudangan beserta *Annual Technical Support (ATS)* dan *change request*, aplikasi piranti lunak yang berlisensi yang digunakan untuk proses pertukaran data secara elektronik (*electronic data interchange*), aplikasi bidang operasional, ERP (sistem informasi keuangan, personalia, teknik), pengembangan *Port Community System/Inaportnet*, aplikasi *dash board system* untuk menyajikan informasi mengenai performansi operasional, integrasi antar sistem, integrasi *autogate* dan VGM untuk sistem operasi terminal.

15. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Software

Software application represents cost incurred for the development of *Port Wide Solution* application for *car terminal services*, *container terminal services* and warehouse and *Annual Technical Support (ATS)* and *change request*, licensed software application used for electronic data interchange, operational application, ERP (finance, human resources, technical information system), development of *Port Community System/Inaportnet*, dash board system application to present information regarding operational performance, system integration, *autogate integration* and VGM for terminal operating system.

16. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

16. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pajak final dibayar di muka (Catatan 22g)	1.230.024.963	-	Prepaid final tax (Note 22g)
Piutang pemulihan investasi	269.245.974	30.145.691	Investment recovery receivables
Uang jaminan	45.012.519	47.922.193	Security deposits
Jaminan pelaksanaan	37.082.900	37.000.000	Performance bond
Uang muka aset tetap	13.287.219	60.439.650	Advance for fixed assets
Aset lain-lain - neto	116.546.231	74.386.384	Other assets - net
Total	1.711.199.806	249.893.918	Total

Uang muka aset tetap merupakan uang muka kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) terkait pembangunan Menara Maritim.

Advance for fixed assets represents advance to PT Pembangunan Perumahan (Persero) for construction of Maritim Tower.

Piutang pemulihan investasi adalah piutang atas laba neto TPK Koja yang belum didistribusikan ke Perusahaan.

Investment recovery receivables represents receivables from net income of TPK Koja which has not been distributed to the Company.

Jaminan pelaksanaan merupakan bank garansi kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sehubungan dengan jaminan pelaksanaan pembangunan terminal Kalibaru (Catatan 45a).

Performance bond represents bank guarantee to the Port Authority Tanjung Priok in relation to the development of Kalibaru terminal (Note 45a).

Uang jaminan diantaranya merupakan jaminan listrik di Tanjung Priok, bank garansi, telepon, jaringan internet dan mesin fotokopi.

Security deposits represents among others electricity deposits at Tanjung Priok, bank guarantee, deposits for telephone, internet connection and photocopy machine.

Aset lain-lain - lain-lain - neto terutama merupakan biaya yang ditangguhkan dari pengerukan kolam, peralatan *vessel traffic service*, perbaikan kapal keruk dan biaya konsultasi kegiatan *Basic Ship Management Fleet*.

Other assets - others - net mainly represents deferred charge for dredging, vessel traffic service equipment, dredges repairment and consultant fee of Basic Ship Management Fleet.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

Pinjaman bank jangka pendek terdiri dari:

	31 Desember/December 31	
	2019	2018
Rupiah		
Pihak Ketiga		
PT Bank OCBC NISP Tbk	6.000.000	-
Pihak berelasi (Catatan 41f)		
PT Bank Syariah Mandiri	28.193.914	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	4.000.000
Total	34.193.914	4.000.000

Berdasarkan akad pembiayaan tanggal 15 Februari 2019, Bank Syariah Mandiri ("BSM") menyetujui untuk menyediakan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah - pembiayaan dana berputar kepada RSP dengan limit maksimum pembiayaan sebesar Rp30.000.000. Fasilitas ini diberikan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja RSP. Nisbah bagi hasil untuk BSM dan RSP masing-masing sebesar 2,22% dan 97,78%. Jangka waktu pembiayaan adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penarikan oleh Perusahaan. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha senilai Rp30.000.000 dengan nilai pengikatan fidusia sebesar nilai piutang tersebut.

Fasilitas tersebut mensyaratkan RSP untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu sesuai dengan yang tertuang pada akad pembiayaan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo terutang dari fasilitas tersebut adalah sebesar Rp28.193.914.

17. SHORT-TERM BANK LOANS

Short-term bank loans consist of:

Rupiah	
Third parties	
PT Bank OCBC NISP Tbk	
Related parties (Note 41f)	
PT Bank Syariah Mandiri	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
Total	

Based on agreement dated February 15, 2019, Bank Syariah Mandiri ("BSM") agreed to provide financing facility based on musyarakah - revolving fund financing to RSP with maximum financing limit amounting to Rp30,000,000. This facility is provided for working capital of RSP. The Nisbah of profit sharing for BSM and RSP amounted to 2.22% and 97.78%, respectively. The facility period is 12 (twelve) months since the drawdown date by RSP. The facility is guaranteed by collateral in the form of trade receivables amounted Rp30,000,000 with fiduciary value amounting as the mentioned receivables.

The facility requires RSP to comply with certain covenants in accordance with the terms stipulated in the agreement.

As of December 31, 2019, the outstanding balance from the facility is amounting to Rp28,193,914.

18. UTANG USAHA

a. Berdasarkan pemasok

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Pihak ketiga Swasta	359.929.551	418.899.213
Pihak berelasi (Catatan 41g)	1.076.552.787	1.247.008.500
Total	1.436.482.338	1.665.907.713

18. TRADE PAYABLES

a. By supplier

Third parties	
Private	
Related parties (Note 41g)	
Total	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

18. UTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Rupiah	947.869.630	1.659.372.623
Dolar AS	488.488.004	6.535.090
Euro Eropa	124.704	-
Total	1.436.482.338	1.665.907.713

18. TRADE PAYABLES (continued)

b. By currency

Rupiah
US Dollar
European Euro
Total

**19. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA
PENDEK**

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Uang muka dari pelanggan untuk diperhitungkan		
Swasta	10.697.990	16.658.521
Pihak berelasi (Catatan 41h)	950.251	1.028.107
Lain-lain	7.132.428	11.283.684
Subtotal	18.780.669	28.970.312
Sewa kuartalan (Catatan 45h dan 46a)	520.544.218	555.358.299
Pelayanan jasa perusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	156.088.555	101.043.778
Lain-lain	3.078.074	1.727.923
Subtotal	679.710.847	658.130.000
Bagian lancar pendapatan diterima di muka jangka panjang (Catatan 25)	146.997.708	146.997.709
Total	845.489.224	834.098.021

Advances from customers
Private
Related parties (Note 41h)
Others
Sub-total

Quarterly rent (Notes 45h and 46a)
Land, building, water and electricity
services
Others

Sub-total
Current portion of long-term unearned
revenue (Note 25)

Total

Uang untuk diperhitungkan merupakan penerimaan uang di muka dari pelanggan yang akan memperoleh pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik dari Kelompok Usaha.

Advances from customers represents advances received from customers who will receive ship services, goods services, container services and logistic services from the Group.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

20. BEBAN AKRUAL

20. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Umum	897.590.232	843.328.993	General
Pegawai	537.340.813	623.923.785	Employees
Kerjasama mitra usaha	264.259.150	248.805.652	Partnership
Bunga	159.205.064	163.363.780	Interest
Bahan bakar dan bahan habis pakai	103.074.299	80.085.854	Fuels and supplies
Pemeliharaan	72.828.363	77.873.897	Maintenance
Provisi atas pembangunan aset Pemda DKI	39.089.633	39.089.633	Provision for construction of Pemda DKI assets
Biaya konsesi	32.077.764	41.676.724	Concession fee
Lain-lain	169.261.308	176.684.298	Others
Total	2.274.726.626	2.290.832.616	Total

Beban akrual - umum terutama merupakan akrual beban pembelian dan pembangunan aset tetap.

Accrued expenses - general mainly represents accrued expenses for purchase and construction of fixed assets.

Beban akrual - pegawai terutama merupakan beban akrual untuk biaya bonus dan tantiem.

Accrued expenses - employees mainly represents accrued expenses for employee's bonus and directors' tantiem.

Beban akrual - kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi atas kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan serta beban pegawai nonorganik.

Accrued expenses - the partnership expenses mainly represents the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners for providing loading and unloading activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports and outsourcing expenses.

Beban akrual - biaya konsesi merupakan biaya konsesi yang harus dibayarkan kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan Perjanjian Konsesi tanggal 11 November 2015 (Catatan 46m).

Accrued expenses - concession fee represents concession fee to be paid to Port Authority in accordance with Concession Agreement dated November 11, 2015 (Note 46m).

Provisi atas pembangunan aset Pemda DKI merupakan kewajiban Perusahaan untuk membangun dermaga dan stadion olahraga berdasarkan Memorandum of Understanding tanggal 26 Mei 1995 antara Gubernur DKI Jakarta dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub) dan Surat dari Menhub kepada Perusahaan No. PL.407/3/1Phb.96 tanggal 21 November 1996 mengenai pengalihan kewajiban pembangunan kepada Perusahaan.

Provision of construction of Pemda DKI assets represents the Company's obligation to construct dock and sport stadium under the Memorandum of Understanding dated May 26, 1995 between Governor of DKI Jakarta with Minister of Transportation of the Republic of Indonesia (Menhub) and the letter from Menhub to the Company No. PL.407/3/1Phb.96 dated November 21, 1996 regarding the transfer of construction liability to the Company.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

21. OTHER CURRENT LIABILITIES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pihak ketiga	206.170.895	185.350.553	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 41i dan 41j)	91.743.873	90.237.622	Related parties (Note 41i and 41j)
Total	297.914.768	275.588.175	Total

Rincian liabilitas jangka pendek lainnya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Details of other current liabilities as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Uang titipan dari pelanggan			Deposit from customers
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Swasta	85.926.856	120.764.703	Private
Lain-lain	87.820.980	40.054.582	Others
Pihak berelasi (Catatan 41i)	18.382.047	14.748.481	Related parties (Note 41i)
Subtotal	192.129.883	175.567.766	Sub-total
Pihak ketiga	32.423.059	24.531.268	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 41j)			Related parties (Note 41j)
JICT (Catatan 46f)	38.980.725	38.980.725	JICT (Note 46f)
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (DKB)	31.666.118	31.666.118	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (DKB)
Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	2.714.983	4.842.298	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)
Subtotal	105.784.885	100.020.409	Sub-total
Total	297.914.768	275.588.175	Total

Uang titipan - swasta terutama merupakan sisa uang pengguna jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik yang belum dibayarkan kembali kepada pelanggan atau akan diperhitungkan dengan pelayanan berikutnya.

Deposit from customers - private mainly represents remaining deposits from customers for ship services, goods services, container services and logistic services which have not been settled with the customer or will be taken into account with subsequent services.

Uang titipan - lain-lain terutama merupakan uang titipan yang berasal dari gaji bulanan pegawai untuk iuran jamsostek, asuransi dan koperasi pegawai.

Deposit from customers - others mainly represents deposit from employee monthly salary for jamsostek contribution, insurance and employee co-operatives.

Liabilitas jangka pendek lainnya - pihak ketiga terutama merupakan utang yang timbul dari penerimaan uang jaminan penyediaan listrik dan cadangan klaim pelayanan kesehatan.

Other current liabilities - third party mainly represents payables from deposits received for electricity provision and claim reserves for health services.

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada DKB merupakan kekurangan pembayaran kompensasi atas pemindahan dan pengosongan Galangan III DKB ke Pulau Batam berdasarkan Surat Perjanjian No.HK.566/27/11/PI.II-11 dan No.024/Kontr/I/DKB/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

Other current liabilities to DKB represents a shortage of payment of compensation to DKB for the removal and emptying of Galangan III in Batam Island based on Letter Agreement No.HK.566/27/11/PI.II-11 and No.024/Kontr/I/DKB/2011 dated August 15, 2011.

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada DP4 merupakan kewajiban pembayaran pokok angsuran dan denda atas program pensiun Rukindo.

Other current liabilities to DP4 represents an obligation on the principal installments and penalties for pension program of Rukindo.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN

22. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Perusahaan			The Company
Pajak Pertambahan Nilai	197.084.038	235.183.098	Value Added Tax
Pajak penghasilan lainnya	27.232.934	8.436.907	Other income taxes
Pajak penghasilan pasal 19 - Penilaian kembali aset tetap	-	32.438.878	Income taxes article 19 - Revaluation of fixed assets
Subtotal	224.316.972	276.058.883	Sub-total
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak Pertambahan Nilai	107.873.791	171.572.101	Value Added Tax
Pajak penghasilan lainnya	348.414.304	304.159.014	Other income taxes
Subtotal	456.288.095	475.731.115	Sub-total
Total	680.605.067	751.789.998	Total

Taksiran tagihan restitusi pajak

Estimated claims for tax refund

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Perusahaan			The Company
Pajak penghasilan			Income tax
2014	-	14.423.973	2014
2015	381.563.183	377.958.339	2015
2017	-	153.078.948	2017
2018	171.961.012	171.450.559	2018
2019	152.258.584	-	2019
Subtotal	705.782.779	716.911.819	Sub-total
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak Pertambahan Nilai			Value Added Tax
2017	-	7.620.728	2017
2018	16.158.615	10.278.804	2018
Pajak penghasilan			Income tax
2014	-	10.193.276	2014
2015	14.502.241	18.226.979	2015
2016	7.658.230	7.658.230	2016
2017	3.215.362	13.455.592	2017
2018	39.084.807	57.586.139	2018
2019	172.515.120	-	2018
Subtotal	253.134.375	125.019.748	Sub-total
Total	958.917.154	841.931.567	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Perusahaan			<i>The Company</i>
Pajak Pertambahan Nilai	202.732.042	150.325.249	<i>Value Added Tax</i>
Pajak penghasilan			<i>Income taxes</i>
Pasal 4(2)	21.706.567	684.648	<i>Article 4(2)</i>
Pasal 21	27.131.331	33.022.872	<i>Article 21</i>
Pasal 22	210.893	86.239	<i>Article 22</i>
Pasal 23	21.611.655	12.547.108	<i>Article 23</i>
Pasal 25	9.750.759	9.750.759	<i>Article 25</i>
Lainnya	133.561	12.560	<i>Others</i>
Subtotal	283.276.808	206.429.435	<i>Sub-total</i>
Entitas anak			<i>Subsidiaries</i>
Pajak Pertambahan Nilai	32.457.179	22.365.260	<i>Value Added Tax</i>
Pajak penghasilan			<i>Income taxes</i>
Pasal 4(2)	56.121.269	51.780.203	<i>Article 4(2)</i>
Pasal 21	33.397.029	37.631.713	<i>Article 21</i>
Pasal 23	6.699.520	7.932.378	<i>Article 23</i>
Pasal 25	20.445.076	23.950.376	<i>Article 25</i>
Pasal 29	8.651.061	36.423.783	<i>Article 29</i>
Lainnya	3.968.052	2.982.527	<i>Others</i>
Subtotal	161.739.186	183.066.240	<i>Sub-total</i>
Total	445.015.994	389.495.675	Total

c. Pajak penghasilan badan

c. Corporate income tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran rugi pajak pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before corporate income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated tax loss in 2019 and 2018 are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.705.407.941	2.775.005.156	<i>Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan badan	1.039.668.216	1.415.927.072	<i>Income before corporate income tax of subsidiaries</i>
Pendapatan kena pajak final	2.672.426.763	3.009.884.361	<i>Income subject to final tax</i>
Rugi sebelum pajak penghasilan badan - Perusahaan	(1.006.687.037)	(1.650.806.277)	<i>Loss before corporate income tax expenses - the Company</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

c. Corporate income tax (continued)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Beda temporer:			Temporary differences:
Penyisihan imbalan kerja karyawan	56.169.583	28.254.134	Provision for employee benefits
Penyisihan penurunan nilai piutang	(30.917.268)	(12.477.994)	Provision for impairment of receivables
Amortisasi aset lain-lain	35.952.965	19.282.281	Amortization of other assets
Penyusutan aset tetap	(131.897.568)	(133.260.394)	Depreciation of fixed assets
Beda permanen:			Permanent differences:
Beban bunga	684.009.132	692.220.214	Interest expenses
Beban umum	143.300.705	77.737.103	General expenses
Beban kesejahteraan karyawan	98.491.347	121.208.223	Employees social welfare expenses
Beban promosi	29.245.190	39.206.898	Promotion expenses
Bagian laba entitas asosiasi	(154.095.482)	(201.379.233)	Income portion from associates
Lainnya	(179.430.708)	365.002.332	Others
Subtotal	550.827.896	995.793.564	Sub-total
Taksiran rugi pajak	(455.859.141)	(655.012.713)	Estimated tax loss

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan badan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan badan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Reconciliation between corporate income tax expenses and the theoretical tax amount on profit before corporate income tax using the applicable tax rate is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Laba sebelum pajak penghasilan			Income before corporate income tax
Badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.705.407.942	2.775.005.156	as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi:			Less:
Pendapatan kena pajak final	2.672.426.763	3.009.884.361	Income subject to final tax
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan badan	32.981.179	(234.879.205)	Income (Loss) before corporate income tax expenses
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	8.245.295	(58.719.801)	Income tax calculated at applicable rate
Dampak perbedaan permanen:			Effect of permanent differences:
Beban bunga	171.002.283	173.055.054	Interest expenses
Beban umum	37.227.356	74.772.199	General expenses
Beban kesejahteraan karyawan	31.049.556	52.436.444	Employees social welfare expenses
Beban promosi	15.026.686	19.296.561	Promotion expenses
Bagian laba entitas asosiasi	(38.523.871)	(50.344.808)	Income portion from associates
Lainnya	35.889.749	143.486.119	Others
Beban pajak penghasilan badan	259.917.054	353.981.768	Corporate income tax expense

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

c. Corporate income tax (continued)

Perhitungan taksiran rugi pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 di atas akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2019.

The above calculation of estimated fiscal loss for the year ended December 31, 2019 will be used as a basis in filling the 2019 annual corporate income tax return.

d. Rincian beban pajak penghasilan dan final adalah sebagai berikut:

d. The details of Income tax expenses and final tax expenses are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Beban pajak final			Final tax expense
Perusahaan	417.964.858	249.720.243	The Company
Entitas anak	91.727.633	107.392.979	Subsidiaries
Subtotal	509.692.491	357.113.222	Sub-total
Beban pajak penghasilan badan Kini			Corporate income tax expense Current
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	259.917.054	353.981.768	Subsidiaries
Subtotal	259.917.054	353.981.768	Sub-total
Tanggungan			Deferred
Perusahaan	(35.356.767)	7.195.030	The Company
Entitas anak	(22.962.694)	(16.881.497)	Subsidiaries
Subtotal	(58.319.461)	(9.686.467)	Sub-total
Total	201.597.593	344.295.301	Total

e. Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

e. The calculation of current income tax expense - current year and estimated overpayment and underpayment of corporate income tax are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Taksiran penghasilan kena pajak			Estimated taxable income
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	1.039.668.216	1.415.927.072	Subsidiaries
Jumlah taksiran penghasilan kena pajak	1.039.668.216	1.415.927.072	Total estimated taxable income
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan			Corporate income tax expense - current
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	259.917.054	353.981.768	Subsidiaries
Jumlah beban pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	259.917.054	353.981.768	Corporate income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

- e. Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka			
Perusahaan	152.258.584	171.450.559	Less prepaid income tax The Company
Entitas anak	348.414.304	375.144.124	Subsidiaries
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka	500.672.888	546.594.683	Total prepaid income tax
Taksiran hutang pajak penghasilan - Pasal 29			Estimated income tax payable - Article 29
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	8.651.061	36.423.783	Subsidiaries
Total	8.651.061	36.423.783	Total
Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan			Estimated claims for tax refund
Perusahaan	152.258.584	171.450.559	The Company
Entitas anak	172.515.119	57.586.139	Subsidiaries
Total	324.773.703	229.036.698	Total

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam Kelompok Usaha menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, entities within the Group calculates and pays tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

f. Pajak tangguhan

f. *Deferred taxes*

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets (liabilities) are as follows:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019/Year Ended December 31, 2019						
Dibebankan pada/Charged to						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive income	Ekuitas/ Equity	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset Pajak Tangguhan						Deferred Tax Assets
Entitas anak	47.498.765	22.880.166	3.494.883	-	73.873.814	Subsidiaries
Liabilitas Pajak Tangguhan						Deferred Tax Liabilities
Perusahaan						The Company
Penyusutan	(687.207.680)	(29.860.048)	-	-	(717.067.728)	Depreciation
Amortisasi	(18.595.544)	55.612.743	-	-	37.017.200	Amortization
Penyisihan penurunan nilai piutang	60.653.106	1.534.711	-	-	62.187.817	Provision for impairment of receivables
Penyisihan imbalan kerja karyawan	369.242.847	8.069.361	22.848.469	-	400.160.676	Provision for employee benefits
Subtotal	(275.907.271)	35.356.767	22.848.469	-	(217.702.035)	Sub-total
Entitas anak	(31.939.536)	82.528	702.878	(5.432.904)	(36.587.034)	Subsidiaries
Total	(307.846.807)	35.439.295	23.551.347	(5.432.904)	(254.289.069)	Total
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018/Year Ended December 31, 2018						
Dibebankan pada/Charged to						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive income	Ekuitas/ Equity	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset Pajak Tangguhan						Deferred Tax Assets
Entitas anak	44.644.534	10.322.756	(2.528.584)	(4.939.941)	47.498.765	Subsidiaries
Liabilitas Pajak Tangguhan						Deferred Tax Liabilities
Perusahaan						The Company
Penyusutan	(638.937.738)	(48.269.942)	-	-	(687.207.680)	Depreciation
Amortisasi	(6.026.402)	(12.569.142)	-	-	(18.595.544)	Amortization
Penyisihan penurunan nilai piutang	73.546.366	(12.893.260)	-	-	60.653.106	Provision for impairment of receivables
Penyisihan imbalan kerja karyawan	313.112.199	45.723.981	10.406.667	-	369.242.847	Provision for employee benefits
Subtotal	(258.305.575)	(28.008.363)	10.406.667	-	(275.907.271)	Sub-total
Entitas anak	(42.993.909)	5.493.923	3.431.362	2.129.088	(31.939.536)	Subsidiaries
Total	(301.299.484)	(22.514.440)	13.838.029	2.129.088	(307.846.807)	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak

Perusahaan

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2015

Pada tanggal 20 April 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pajak penghasilan badan tahun 2015 sebesar Rp805.287.733.

Pada tanggal 18 Juli 2017, Perusahaan mengajukan keberatan ke DJP atas SKPKB tersebut.

Sebagai hasil keberatan Perusahaan tersebut, pada tanggal 22 Desember 2017, diterbitkan SKPKB revisi sebesar Rp614.304.124.

Pada tanggal 20 Maret 2018, Perusahaan mengajukan banding ke pengadilan pajak atas SKPKB tersebut.

Pada tanggal 26 Juli 2019, pengadilan pajak menolak pengajuan banding yang diajukan oleh Perusahaan. Pada tanggal 22 Agustus 2019 dan 5 Desember 2019, Perusahaan melakukan pembayaran masing-masing sebesar Rp614.304.124 dan mencatatnya sebagai aset tidak lancar lainnya.

Pada tanggal 17 Oktober 2019, Perusahaan mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, proses peninjauan kembali masih berlangsung.

IPC TPK

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2015

Pada tanggal 24 Mei 2017, IPC TPK menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan badan tahun 2015 berupa pokok dan bunga masing-masing sebesar Rp14.788.285 dan Rp5.028.017. IPC TPK membayar sebagian tagihan pajak tersebut sebesar Rp3.063.854 dengan rincian jumlah pajak penghasilan terutang Rp2.438.761, koreksi atas restitusi pajak tahun 2015 yang dilaporkan sebesar Rp152.302 dan sanksi pajak Rp777.395 pada 16 Juni 2017. Selisih dengan hasil pemeriksaan pajak tersebut sebesar Rp317.627 telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tahun berjalan.

22. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter

The Company

Tax assessment for fiscal year 2015

On April 20, 2017, the Company received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on corporate income tax for 2015 amounting to Rp805,287,733.

On July 18, 2017, the Company has filed an objection to the DJP for the SKPKB.

As a result of the Company's objection, on December 22, 2017, the Company received a revised SKPKB amounting to Rp614,304,124.

On March 20, 2018, the Company has filed an appeal to the tax court for the SKPKB.

On July 26, 2019, the tax court rejected Company's appeal. As a result, on August 22, 2019 and December 5, 2019, the company made payments of Rp614,304,124, respectively and recorded as other non-current assets.

On October 17, 2019, the Company filed a judicial review to the Supreme Court.

Until the date of the completion of this consolidated financial statement, judicial review is still in process.

IPC TPK

Tax assessment for fiscal year 2015

On May 24, 2017, IPC TPK received a Tax Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) for 2015 corporate income tax in the form of principal and fine amounting to Rp14,788,285 and Rp5,028,017, respectively. IPC TPK paid a portion of the tax bill amounting to Rp3,063,854 with details of the amount of outstanding income tax Rp2,438,761, correction of reported 2015 tax refunds amounting to Rp152,302 and tax penalty of Rp777,395 on June 16, 2017. Difference with the results of the tax audit amounting to Rp317,627 has been charged to the statement of profit or loss and comprehensive income for the year.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

IPC TPK (lanjutan)

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2015 (lanjutan)

Pada tanggal 22 Agustus 2017, IPC TPK mengajukan keberatan atas SKPKB pajak penghasilan badan tahun 2015. Pada tanggal 20 Juli 2018, keberatan untuk kekurangan pembayaran pajak penghasilan badan tahun 2015 ditolak oleh Kantor Pajak.

Pada tanggal 19 Oktober 2018, IPC TPK mengajukan banding untuk pajak penghasilan badan tahun 2015 ke Pengadilan Pajak. IPC TPK membayar kekurangan tagihan pajak tersebut sebesar Rp15.938.774 pada 23 Oktober 2018. Pada tanggal 21 Desember 2018, Pengadilan Pajak menolak banding atas pajak penghasilan badan tahun 2015. Selisih atas kekurangan pembayaran ketetapan pajak penghasilan badan tahun 2015 telah dibebankan dan dicatat sebagai bagian dari pajak kini sebesar Rp12.501.828, denda pajak sebesar Rp4.250.621 dan utang pajak lainnya sebesar Rp813.675.

Surat Tagihan Pajak

Pada tanggal 7 Mei 2018, IPC TPK menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPN dari Kantor pajak untuk masa pajak Juni, September - Desember 2016 sebesar Rp2.662.188 dan telah dibayar oleh IPC TPK pada tanggal 6 Juni 2018 serta telah dicatat sebagai bagian dari denda pajak pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 26 November 2018, IPC TPK menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Kantor pajak untuk masa pajak Desember 2017 - Juni 2018 dan Agustus 2018 sebesar Rp1.689.698 dan telah dicatat sebagai bagian dari denda pajak dan utang pajak lainnya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

22. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

IPC TPK (continued)

Tax assessment for fiscal year 2015 (continued)

On August 22, 2017, IPC TPK has filed an objection of the underpayment assesment of 2015 corporate income tax. On July 20, 2018, the objection of the underpayment assesment of 2015 corporate income tax was rejected by the Tax Office.

On October 19, 2018, IPC TPK filed an appeal for the 2015 corporate income tax to the Tax Court. IPC TPK paid for the remaining tax bill in the amount of Rp15,938,774 on October 23, 2018. On December 21, 2018, the Tax Court rejected the appeal of the 2015 corporate income tax. The difference in the underpayment of the 2015 corporate income tax assesment has been charged and recorded as part of the current tax of Rp12,501,828, tax penalties amounting to Rp4,250,621 and other tax payable of Rp813,675.

Tax Collection Letters

On May 7, 2018, IPC TPK receive a Tax Collection Letter (STP) for VAT from the Tax Office for the tax period of June, September - December 2016 amounting to Rp2,662,188 and was paid by IPC TPK on June 6, 2018 and has been recorded as part of tax penalty on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

On November 26, 2018, IPC TPK received a Tax Collection Letter (STP) for Income Tax Article 25 from the Tax Office for the period of December 2017 - June 2018 and August 2018 amounting to Rp1,689,698 and has been recorded as part from tax penalties and other tax debts in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

MTI

Pada tanggal 25 April 2016, MTI menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas PPh 23 dan PPh 25 tahun 2014 sebesar Rp10.691.727 dari yang dilaporkan pada surat pemberitahuan pajak tahun 2014 sebesar Rp20.888.914. Pada tanggal 26 Mei 2016, MTI telah menerima pengembalian lebih bayar tersebut. Pada tanggal 22 Juli 2016, MTI mengajukan keberatan atas sisa lebih bayar tersebut. Pada tanggal 11 Juli 2017, MTI menerima surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berisi tambahan lebih bayar yang akan dikembalikan kepada MTI sebesar Rp11.861. Pada tanggal 10 Oktober 2017, MTI mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

Pada tanggal 4 Februari 2019, MTI menerima Surat Putusan Pengadilan Pajak atas banding Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh 25 Tahun 2014 yang berisi tambahan lebih bayar yang akan dikembalikan kepada MTI sebesar Rp6.073.151.

Pada tanggal 2 Maret 2019, MTI mengajukan permohonan transfer bank untuk pembayaran imbalan bunga PPh badan tahun 2014 atas keterlambatan sebesar Rp4.350.672

Pada tanggal 30 April 2019, MTI telah menerima pengembalian lebih bayar sebesar Rp3.552.891 setelah dikompensasikan dengan utang pajak PPN, PPh 21 dan PPh 23 sebesar Rp2.520.260.

Pada tanggal 9 Mei 2017, MTI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN tahun 2013 berupa pokok dan bunga sebesar Rp2.795.914. Pada tanggal 7 Agustus 2017, MTI mengajukan keberatan atas sisa kurang bayar tersebut. Pada tanggal 19 Juli 2018, MTI menerima surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak keberatan wajib pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp2.795.914. Pada tanggal 11 Oktober 2018, MTI mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, MTI belum menerima hasil keputusan atas banding tersebut.

22. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

MTI

On April 25, 2016, MTI received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") on income tax article 23 and 25 for 2014 amounting to Rp10,691,727 against the overpayment reported in tax return of Rp20,888,914. On May 26, 2016, MTI has received the overpayment. On July 22, 2016, MTI filled an objection on the remaining overpayment. On July 11, 2017, MTI received the Decree of the Director General of Taxation which contains additional overpayment to be returned to MTI amounting Rp11,861. On October 10, 2017, MTI appealed against the Decree of the Director General of Taxation.

On February 4, 2019, MTI received a Tax Court Decree on the appeal of the Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") on income tax article 25 for 2014 which contains additional overpayment to be returned to MTI amounting Rp6,073,151.

On March 2, 2019, MTI submitted a bank transfer request for interest compensation of 2014 corporate income tax for a delay payment amounting to Rp4,350,672.

On April 30, 2019, MTI has received this overpayment assessment amounting to Rp3,552,891 after being compensated with income tax payable of VAT, article 21 and article 23 amounting to Rp2,520,260.

On May 9, 2017, MTI received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on PPN for 2013 in the form of principal and interest amounting to Rp2,795,914. On August 7, 2017, MTI filled an objection on the remaining underpayment. On July 19, 2018, MTI received the Decree of the Director General of Taxation which rejected the objection and maintained the amount of tax that has to be paid amounting Rp2,795,914. On October 11, 2018, MTI appealed against the Decree of the Director General of Taxation. Until the completion date of the consolidated financial statements, MTI has not yet received the decision on the appeal.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

MTI (lanjutan)

Pada tanggal 9 Mei 2017, MTI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Badan tahun 2013 berupa pokok dan bunga sebesar Rp37.746.806 dan telah dibayar sebesar Rp4.485.294 pada tanggal 7 Agustus 2017 serta telah dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pada tanggal 7 Agustus 2017, MTI mengajukan keberatan atas sisa kurang bayar tersebut. Pada tanggal 19 Juli 2018, MTI menerima surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dan mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp6.029.244. Pada tanggal 15 Oktober 2018, MTI mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, MTI belum menerima hasil keputusan atas banding tersebut.

Pada tanggal 20 Juni 2017, MTI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Badan tahun 2015 sebesar Rp2.792.602 dari yang dilaporkan pada surat pemberitahuan pajak tahun 2015 dengan posisi lebih bayar sebesar Rp14.570.141. Pada tanggal 15 September 2017, MTI mengajukan keberatan atas sisa lebih bayar tersebut. Pada tanggal 24 Agustus 2018, MTI menerima surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dan mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp14.502.241. Pada tanggal 21 November 2018, MTI mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, MTI belum menerima hasil keputusan atas banding tersebut.

22. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

MTI (continued)

On May 9, 2017, MTI received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on corporate income tax for 2013 in the form of principal and interest amounting to Rp37,746,806 and have been paid by MTI amounting to Rp4,485,294 on August 7, 2017 and was recorded as part of "Current Tax Expense" in statement of profit or loss and other comprehensive income. On August 7, 2017, MTI filled an objection on the remaining underpayment. On July 19, 2018, MTI received the Decree of the Director General of Taxation which granted the objection and reduced the amount of tax that has to be paid amounting to Rp6,029,244. On October 15, 2018, MTI appealed against the Decree of the Director General of Taxation. Until the completion date of the consolidated financial statements, MTI has not yet received the decision on the appeal.

On June 20, 2017, MTI received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on corporate income tax for 2015 amounting to Rp2,792,602 against the overpayment reported in tax return of Rp14,570,141. On September 15, 2017, MTI filled an objection on the remaining overpayment. On August 24, 2018, MTI received the Decree of the Director General of Taxation which granted the objection and reduced the amount of tax to be overpayment amounting to Rp14,502,241. On November 21, 2018, MTI appealed against the Decree of the Director General of Taxation. Until the completion date of the consolidated financial statements, MTI has not yet received the decision on the appeal.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

MTI (lanjutan)

Pada tanggal 24 Agustus 2018, MTI menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berisi menolak keberatan wajib pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp16.748.687. Pada tanggal 21 November 2018, MTI mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan konsolidasian keuangan ini, MTI belum menerima hasil keputusan atas banding tersebut.

Pada tanggal 16 April 2019, MTI menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas PPh 25 tahun 2017 sebesar Rp8.578.787 dari yang dilaporkan pada surat pemberitahuan pajak tahun 2017 sebesar Rp8.697.320. Pada tanggal 13 Mei 2019, MTI telah menerima pengembalian lebih bayar tersebut sebesar Rp8.578.787.

JAI

Pada tanggal 23 Februari 2018, JAI menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2016 sebesar Rp15.098.395 Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan JAI sebesar Rp10.268.107 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini. Pada tanggal 5 Juli 2018, JAI telah menerima pengembalian lebih bayar sebesar Rp6.316.452 setelah dikompensasikan dengan utang pajak penghasilan pasal 21, 23, 26 dan PPN sebesar Rp8.781.943.

Pada tanggal 9 Mei 2018, JAI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan badan tahun 2014 sebesar Rp18.326.999. JAI telah membayar atas kurang bayar tersebut beserta utang pajak penghasilan pasal 15, 21, 23 dan PPN sebesar Rp23.845.304. JAI masih dalam proses pengajuan keberatan atas SKPKB tersebut dan mencatatnya sebagai pajak dibayar di muka.

22. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

MTI (continued)

On August 24, 2018, MTI received the Decree of the Director General of Taxation which rejected the objection and maintained the amount of tax that has to be paid amounting to Rp16,748,687. On November 21, 2018, MTI appealed against the Decree of the Director General of Taxation. Until the completion date of the consolidated financial statements, MTI has not yet received the decision on the appeal.

On April 16, 2019, MTI received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") on income tax article 25 for 2017 amounting to Rp8,578,787 against the overpayment reported in tax return of Rp8,697,320. On May 13, 2019, MTI has received the overpayment amounting to Rp8,578,787.

JAI

On February 23, 2018, JAI received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") on Corporate Income Tax ("CIT") for fiscal year 2016 amounting to Rp15,098,395. The difference of the tax assessment with the JAI's record amounting to Rp10,268,107 has been recorded as part of current tax expense. On July 5, 2018, JAI has received this overpayment assessment amounting to Rp6,316,452 after being compensated with income tax payable of articles 21, 23, 26 dan VAT amounting to Rp8,781,943.

On May 9, 2018, JAI received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on Corporate Income Tax ("CIT") for fiscal year 2014 amounting to Rp18,326,999. JAI has paid this underpayment assessment and income tax payable of articles 15, 21, 23 and VAT amounting to Rp23,845,304. JAI is still in the process of filing an objection of the SKPB and recorded it as prepaid tax.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

- g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

RUKINDO

Pada tanggal 10 September 2018, Rukindo menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun fiskal 2014 dan 2015 sebesar Rp7.201.615. Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan Rukindo sebesar Rp7.591.762 telah dicatat sebagai bagian dari beban operasi lainnya. Pada tanggal 30 Oktober 2018, Rukindo telah menerima pengembalian lebih bayar sebesar Rp6.161.936 setelah dikompensasikan dengan utang pajak PPN sebesar Rp1.039.839.

22. TAXATION (continued)

- g. Tax Assessment Letter (continued)

RUKINDO

On September 10, 2018, Rukindo received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") on Value Added Tax ("VAT") for fiscal years 2014 and 2015 amounting to Rp7,201,615. The difference of the tax assessment with Rukindo's record amounting to Rp7,591,762 has been recorded as part of current tax expense. On October 30, 2018, Rukindo has received this overpayment assessment amounting to Rp6,161,936 after being compensated with income tax payable of VAT amounting Rp1,039,839.

23. UTANG BANK JANGKA PANJANG

23. LONG-TERM BANK LOANS

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pihak berelasi (Catatan 41k)			Related party (Note 41k)
PT Bank Syariah Mandiri	114.990.000	-	PT Bank Syariah Mandiri
Bagian lancar jangka panjang	(12.000)	-	Current maturities of long-term bank loans
Total bagian jangka panjang	114.978.000	-	Total long-term portion

PT Bank Syariah Mandiri

RSP

Berdasarkan akad pembiayaan tanggal 15 Februari 2019, BSM menyetujui untuk menyediakan fasilitas pembiayaan investasi berdasarkan prinsip musyarakah mutanaqishah kepada RSP dengan limit maksimum pembiayaan sebesar Rp115.000.000. Fasilitas ini diberikan terutama untuk membiayai kebutuhan investasi dan pembangunan rumah sakit baru di cabang RSP Palembang. Nisbah bagi hasil untuk BSM dan RSP masing-masing sebesar 38,29% dan 61,71%, dengan besaran ujroh sebesar Rp186.366.230. Jangka waktu pembiayaan adalah 120 (seratus dua puluh) bulan sejak tanggal penarikan oleh RSP. Fasilitas ini dijamin dengan agunan berupa tanah dan bangunan seluas 21.330 m² di RSP Cabang Jakarta yang terletak di Jl. Kramat Jaya, Jakarta Utara dengan nilai pengikatan hak tanggungan sebesar Rp181.250.000.

Fasilitas tersebut mensyaratkan RSP untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu sesuai dengan yang tertuang pada akad pembiayaan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo terutang dari fasilitas tersebut adalah sebesar Rp114.990.000.

PT Bank Syariah Mandiri

RSP

Based on agreement dated February 15, 2019, BSM agreed to provide investment financing facility based on musyarakah mutanaqishah principle to RSP with maximum financing limit amounting to Rp115,000,000. This facility is provided to fund the investment to build a new hospital in RSP Palembang branch. The Nisbah of profit sharing for BSM and RSP each amounted at 38.29% and 61.71%, with amount of ujroh amounting to Rp186,366,230. The facility period is 120 (one hundred twenty) months since the drawdown date by RSP. The facility is guaranteed by collateral in the form of land and building with area of 21,330 m² in RSP Jakarta branch, which located in Jl. Kramat Jaya, North Jakarta with mortgage value amounting to Rp181,250,000.

The facility requires RSP to comply with certain covenants in accordance with the terms stipulated in the agreement.

As of December 31, 2019, the outstanding balance from the facility is amounting to Rp114,990,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. UTANG OBLIGASI

24. BONDS PAYABLE

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Senior Notes penerbitan tahun 2015 USD1.100.000.000 USD500.000.000	15.291.100.000 6.950.500.000	15.929.100.000 7.240.500.000	Senior Notes issued in 2015 USD1,100,000,000 USD500,000,000
Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(194.965.370) (62.456.436)	(210.621.288) (68.811.743)	Less: Unamortized discount Unamortized transaction cost
Utang obligasi - neto	21.984.178.194	22.890.166.969	Bonds payable - net

Obligasi/Bonds	Pokok Utang/Debt Principal	Penerbit/Issuer	Tempat Pencatatan/Listed	Tanggal Terbit/Issue Date	Jatuh Tempo/Due Date	Periode Pembayaran Bunga/Interest Payment Period	Tingkat Bunga per Tahun/Interest Rate per Annum
Senior Notes due 2025	USD1.100.000.000	Perusahaan/the Company	Singapore Exchange Securities Trading Limited	5 Mei 2015/ May 5, 2015	5 Mei 2025/ May 5, 2025	Setengah tahunan/Semi-Annually	4,250%
Senior Notes due 2045	USD500.000.000	Perusahaan/the Company	Singapore Exchange Securities Trading Limited	5 Mei 2015/ May 5, 2015	5 Mei 2045/ May 5, 2045	Setengah tahunan/Semi-Annually	5,375%

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus.

The obligation is not guaranteed by any special collateral.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah The Development Bank of Singapore Limited (dahulunya Australia and New Zealand Banking Company Limited), BNP Paribas, Citicompny Global Markets Inc., PT Bahana Securities dan PT Danareksa Sekuritas. Sedangkan yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah The Bank of New York Mellon Corporation.

Acting as the joint bookrunners are The Development Bank of Singapore Limited (previously Australia and New Zealand Banking Company Limited), BNP Paribas, Citicompny Global Markets Inc., PT Bahana Securities and PT Danareksa Sekuritas. Whereas, acting as the trustee is The Bank of New York Mellon Corporation.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi telah dipergunakan untuk melunasi pinjaman sindikasi dan akan digunakan untuk rencana ekspansi Perusahaan serta tujuan umum Perusahaan.

Proceeds from the bond offering were used to refinance syndicated loan and will be used for Company's expansion plan and general Corporate purposes.

Pada tanggal 31 Desember 2019, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh Moody's Investors Service, Inc., Standard and Poor's Ratings Company dan Fitch Ratings Ltd. masing-masing adalah Baa2, BBB dan BBB.

On December 31, 2019, the Company's bond rating by Moody's Investors Service, Inc., Standard and Poor's Ratings Company and Fitch Ratings Ltd. are Baa2, BBB and BBB, respectively.

Berdasarkan Offering Circular, Perusahaan tidak diperbolehkan menjaminkan seluruh atau sebagian aset, dan memastikan entitas anaknya untuk tidak menjaminkan seluruh atau sebagian asetnya.

Based on the Offering Circular, the Company is not allowed to lien all or any part of its assets, and should ensure that its subsidiaries do not lien all or any part of their assets.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PANJANG

25. LONG-TERM UNEARNED REVENUE

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Premium JICT (Catatan 46e)	2.325.614.688	2.444.876.979	JICT Premium (Note 46e)
Sewa diterima di muka - NPCT1 (Catatan 45h)	771.175.595	809.528.380	Advance rental fee - NPCT1 (Note 45h)
Premium TPK Koja (Catatan 46a)	540.840.625	568.576.042	TPK Koja Premium (Note 46a)
Sewa tanah dan/atau bangunan: PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Catatan 46j)	276.168.033	517.584.342	Land rental and/or building: PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Note 46j)
PT Jakarta Tank Terminal (Catatan 46k)	34.634.861	34.634.861	PT Jakarta Tank Terminal (Note 46k)
PT Tunas Baru Lampung	23.378.016	23.378.016	PT Tunas Baru Lampung
PT Bogasari Sentra Flour Mills	5.978.898	5.978.898	PT Bogasari Sentra Flour Mills
PT Wilmar Nabati Indonesia	4.488.750	4.488.750	PT Wilmar Nabati Indonesia
PT Intiboga Sejahtera	3.772.473	3.772.473	PT Intiboga Sejahtera
PT Dok Duasatu Nusantara	3.723.693	3.723.693	PT Dok Duasatu Nusantara
PT Indokarya Internusa	3.467.415	3.467.415	PT Indokarya Internusa
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	159.385.918	17.880.776	Others (each below Rp2 billion)
Total	4.152.628.965	4.437.890.625	Total
Bagian lancar (Catatan 19)	(146.997.708)	(146.997.708)	Current portion (Note 19)
Total bagian jangka panjang	4.005.631.257	4.290.892.916	Total long-term portion

26. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA

26. OTHER LONG-TERM LIABILITIES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
<u>Pihak ketiga</u> Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura	225.013.928	234.402.238	<u>Third party</u> Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapore
<u>Pihak berelasi (Catatan 41i)</u> PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	27.137.737 3.000.000	29.349.280 8.923.000	<u>Related parties (Note 41i)</u> PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Subtotal	30.137.737	38.272.280	Sub-total
Total	255.151.665	272.674.518	Total
Bagian lancar	(19.887.737)	(38.272.280)	Current portion
Bagian jangka panjang	235.263.928	234.402.238	Long-term portion

Utang kepada Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., merupakan pinjaman sebesar USD15.096.000 yang diperoleh dan digunakan untuk setoran modal IPC TPK di NPCT1 berikut bunga terutang (Catatan 45e).

Payable to Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., represents loan amounting to USD15,096,000 which was obtained and used by IPC TPK for acquisition of share capital in NPCT1 including the interest payable (Note 45e).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**26. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 13 Agustus 2007 dari Notaris Kartono, S.H., Rukindo memperoleh pinjaman modal kerja sebesar Rp16.000.000.000, Rp24.000.000.000 dan Rp8.000.000.000 masing-masing dari PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) ("Pelindo I"), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("Pelindo III") dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ("Pelindo IV"), dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dikenakan suku bunga sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito bank pemerintah dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, yang ditetapkan pada setiap awal tahun.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Berdasarkan Surat Perjanjian No 14/12/3/DIRUT-2018 dan No PKS.55/HK.05018/P.III-2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang restrukturisasi pinjaman modal kerja kepada Pelindo III, disepakati bahwa utang pokok Rukindo tetap sebesar Rp24.000.000 sedangkan utang bunga dan denda yang semula sebesar Rp16.595.467 menjadi sebesar Rp6.267.150. Atas selisih pencatatan utang bunga dan denda dengan hasil kesepakatan, Rukindo mencatat laba sebesar Rp10.328.467 pada pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018.

Berdasarkan kesepakatan di atas, Rukindo akan membayar utang pokok sebesar Rp10.000.000 setelah memperoleh tambahan penyertaan modal dari Perusahaan dan/atau sumber dana lainnya yang diperoleh Rukindo. Sedangkan sisa utang pokok sebesar Rp14.000.000.000 akan diangsur selama 7 tahun dengan dikenakan bunga sebesar rata-rata suku bunga *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) mata uang Rupiah tenor 6 bulan. Sedangkan utang bunga sebesar Rp6.267.150.000 akan diusulkan untuk dihapus maksimal 50% dari total utang bunga dan sisanya dibayarkan secara proposional selama 7 (tujuh) tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp27.137.737 dan Rp29.349.279.

26. OTHER LONG-TERM LIABILITIES (continued)

Based on Deed No. 22 dated August 13, 2007, of Notary Kartono, S.H., the Company obtained working capital loans amounting to Rp16,000,000,000, Rp24,000,000,000 and Rp8,000,000,000 from PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) ("Pelindo I"), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("Pelindo III") and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ("Pelindo IV"), respectively, with repayment term of 5 (five) years and bears interest at the rate equal to the average interest rate on 1-year time deposits of government-owned banks, which shall be determined at the beginning of each year.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Based on the Agreement No. 14/12/3/DIRUT-2018 and No. PKS.55/HK.05018/P.III-2018 dated December 14, 2018 concerning the capital loan restructuring to Pelindo III, it was agreed that the Rukindo's principal debt still same which is amounted Rp24,000,000 while interest debts and penalties originally amounted Rp16,595,467 became Rp6,267,150. For the difference between recording of the interest payable and penalties resulting from the agreement, Rukindo recorded gain amounting Rp10,328,467 to the 2018 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Based on the agreement above, Rukindo will pay the principal loan amounting Rp10,000,000 after obtaining additional capital injection from the Company and/or other sources of funds obtained from the Company. The remaining principal loan of Rp14,000,000,000 will be paid in installments for 7 years which bears interest at the average rate of Jakarta Interbank Interest Rate (JIBOR) in Rupiah currency with a tenor of 6 months. While the interest payable of Rp6,267,150,000 will be submitted to be written off with maximum of 50% of the total interest and the remaining will be paid proportionally for 7 (seven) years.

As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balances of this loan amounted to Rp27,137,737 and Rp29,349,279.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**26. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA
(lanjutan)**

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No 10/12/1/DIRUT-2018 dan No 8.HK.301/12/DKU-2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal penyelesaian pinjaman modal kepada Pelindo IV, disepakati bahwa utang pokok Rukindo yang semula sebesar Rp10.923.000 menjadi sebesar Rp8.000.000 sedangkan utang bunga dan denda yang semuua sebesar Rp5.531.822 menjadi sebesar Rp2.932.000. Jangka waktu pelunasan utang pokok, bunga dan denda tersebut adalah selama 3 tahun. Atas selisih pencatatan utang bunga dan denda dengan hasil kesepakatan, Rukindo mencatat laba sebesar Rp2.608.822 pada pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018.

Berdasarkan kesepakatan pada bulan Desember 2019, Rukindo memperoleh persetujuan dari Pelindo IV untuk menghapus bunga dan denda sebesar Rp2.923.000. Jumlah tersebut di atas telah dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp3.000.000 dan Rp8.923.000. Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 9 Januari 2020.

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Kelompok Usaha mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen, PT Sentra Jasa Aktuaria, PT Towers Watson Purbajaga, PT Padma Radya Aktuaria, PT Pointera Aktuarial Strategis dan PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Berikut adalah asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam laporan aktuaris independen:

	2019	2018
Tingkat diskonto	7,04% - 8,11%	8,39% - 8,77%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	6,00% - 10,00%	7,00% - 10,00%
Tingkat mortalitas	TMI 2011 & TMI 2019	TMI 2011
Tingkat cacat tetap (dari tabel mortalitas)	5% - 10%	1% - 10%
Tingkat pengunduran diri	1,00% - 10,00%	1,00% - 5,00%
Usia pensiun normal	55 - 56 tahun/years	55 - 56 tahun/years

26. OTHER LONG-TERM LIABILITIES (continued)

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

Based on the Minutes of Agreement No. 10/12/1/DIRUT-2018 and No.8.HK.301/12/DKU-2018 dated December 10, 2018 concerning the settlement of capital loans to Pelindo IV, it was agreed that the Rukindo's principal debt which originally amounted Rp10,923,000 became Rp8,000,000 while interest debts and penalties originally amounted Rp5,531,822 became Rp2,932,000. For the difference between recording of the interest payable and penalties resulting from the agreement, Rukindo recorded gain amounting Rp2,608,822 to the 2018 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Based on agreement on December 2019, Rukindo obtained approval from Pelindo IV to written off of interests and penalties amounting to Rp2,923,000. All amounts have been charged to the 2019 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balances of this loan amounted to Rp3,000,000 and Rp8,923,000. This loan was fully repaid on January 9, 2020.

27. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

As of December 31, 2019 and 2018, the Group recorded employee benefits liabilities based on actuarial computations performed by independent actuaries, PT Sentra Jasa Aktuaria, PT Towers Watson Purbajaga, PT Padma Radya Aktuaria, PT Pointera Aktuarial Strategis and PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa, using the "Projected Unit Credit" method.

The basic assumptions used by the independent actuaries are as follows:

Discount rate
Salary increase projection rate
Mortality rate
Permanent disability rate (from mortality table)
Level of resignation
Normal pension age

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Perusahaan		
Program pensiun	174.365.283	164.769.363
Program penghargaan masa bhakti	750.788.445	653.641.759
Program kesehatan pensiunan	646.466.873	634.268.491
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	29.042.101	24.291.771
Subtotal	1.600.642.702	1.476.971.384
Entitas anak		
Program pensiun, penghargaan masa bhakti dan imbalan pasca-kerja lainnya	365.683.206	299.945.910
Total	1.966.325.908	1.776.917.294

a. Program Pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan pensiun untuk karyawan tetap yang dipekerjakan pada tahun 2001 dan sebelumnya dan dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4).

Liabilitas imbalan kerja dan pencadangan biaya imbalan kerja atas program pensiun ini adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Nilai kini liabilitas	474.260.058	481.507.390
Nilai wajar aset program	(299.894.775)	(316.738.027)
Defisit program	174.365.283	164.769.363
Dampak batas atas aset	-	-
Liabilitas yang diakui	174.365.283	164.769.363

**Tahun yang Berakhir pada tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,**

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Biaya jasa kini	4.287.073	4.112.560
Biaya bunga	13.725.288	7.990.407
Beban yang diakui	18.012.361	12.102.967

27. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

The employee benefit liabilities are as follows:

	The Company
	<i>Pension program</i>
	<i>Gratuity and compensation benefits</i>
	<i>Pension healthcare program</i>
	<i>Other long-term employee benefits</i>
	<i>Sub-total</i>
	Subsidiaries
	<i>Pension program, gratuity and compensation benefits and other post-benefits program</i>
	Total

a. Pension Program

The Company has a pension benefit plan covering permanent employees hired in and before 2001 and managed by Dana Pensiun Pelabuhan dan Pengerukan (DP4).

Employee benefits liabilities and employee benefits expenses for the pension program are as follows:

Present value of liabilities	474.260.058
Fair value of plan assets	(299.894.775)
Deficit in plan	174.365.283
Effect of asset ceiling	-
Recognized liabilities	174.365.283

Current service cost	4.287.073
Interest cost	13.725.288
Recognized expense	18.012.361

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

27. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

a. Program Pensiun (lanjutan)

a. Pension Program (continued)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Liabilitas awal tahun	164.769.363	114.148.670	<i>Liabilities at beginning of year</i>
Beban yang diakui dalam laba rugi	18.012.361	12.102.967	<i>Expense recognized in profit or loss</i>
Penghasilan komprehensif lain	24.308.157	65.654.789	<i>Other comprehensive income</i>
luran pemberi kerja	(32.724.598)	(27.137.063)	<i>Employer's contributions</i>
Liabilitas akhir tahun	174.365.283	164.769.363	<i>Liabilities at end of year</i>

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	481.507.390	528.186.379	<i>Present value of liabilities - beginning of year</i>
Biaya jasa kini	4.287.073	4.112.560	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	40.109.567	36.973.047	<i>Interest cost</i>
luran peserta program	834.748	871.048	<i>Plan participants' contributions</i>
Ekspektasi pembayaran imbalan	(67.200.908)	(67.474.150)	<i>Expected benefit payments</i>
Kerugian (keuntungan) aktuarial	14.722.188	(21.161.494)	<i>Actuarial loss (gain)</i>
Nilai kini liabilitas akhir tahun	474.260.058	481.507.390	<i>Present value of liabilities - end of year</i>

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Nilai wajar aset program awal tahun	316.738.027	414.037.709	<i>Fair value of program assets - beginning of year</i>
Imbal hasil ekspektasian aset program	26.384.278	28.982.640	<i>Expected return from program assets</i>
luran pemberi kerja	32.724.598	27.137.062	<i>Employer's contributions</i>
luran peserta program	834.748	871.048	<i>Plan participants' contributions</i>
Imbalan yang dibayarkan	(67.200.908)	(67.474.150)	<i>Benefits paid</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(9.585.968)	(86.816.282)	<i>Actuarial gain (loss)</i>
Nilai wajar aset program akhir tahun	299.894.775	316.738.027	<i>Fair value of program assets - end of year</i>

Aset program yang dimiliki oleh Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

Plan assets owned by the Group is as follows:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| - Aset tetap 48,37% | - Fixed assets 48.37% |
| - Reksa dana 33,09% | - Mutual funds 33.09% |
| - Investasi saham 2,86% | - Investment in shares 2.86% |
| - Surat utang negara 9,54% | - State bonds 9.54% |
| - Deposito berjangka 0,19% | - Time deposits 0.19% |
| - Penyertaan langsung 5,95% | - Direct investment 5.95% |

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

27. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

a. Program Pensiun (lanjutan)

a. Pension Program (continued)

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The maturity of employee benefit liabilities as of December 31, 2019 and 2018 is as follows:

31 Desember/December 31,			
	2019	2018	
Jatuh tempo <= 1 tahun	386.268.990	15.928.821	<i>Maturity <= 1 year</i>
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	51.273.204	43.561.602	<i>Maturity > 1 year and <= 5 years</i>
Jatuh tempo > 5 tahun	178.812.694	196.405.395	<i>Maturity > 5 years</i>
Total	616.354.888	255.895.818	Total

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2019 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2019:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	14.219.199	(17.581.503)	<i>Present value of liabilities</i>
Biaya jasa kini	609.898	(755.684)	<i>Current service cost</i>

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2019 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2019:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	(6.650.413)	6.180.417	<i>Present value of liabilities</i>
Biaya jasa kini	(293.358)	272.006	<i>Current service cost</i>

Manfaat yang diperhitungkan dalam penghargaan masa bhakti mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Dana Pensiun. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan dengan definisi gaji yang meliputi gaji merit dan tunjangan perumahan. Program ini tidak didanai.

Benefits that are calculated in the gratuity and compensation benefits refer to the Collective Labor Agreement and the Regulations of the Pension Fund. Participants are all permanent employees of the company with the salary definition including merit pay and housing allowance. This program is not funded.

b. Penghargaan masa bhakti

b. Gratuity and compensation benefits

31 Desember/December 31,			
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas	750.788.445	653.641.759	<i>Present value of liabilities</i>
Nilai wajar aset program	-	-	<i>Fair value of plan assets</i>
Liabilitas yang diakui	750.788.445	653.641.759	Recognized liabilities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

27. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

b. Penghargaan masa bhakti (lanjutan)

b. Gratuity and compensation benefits (continued)

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
2019	2018	
Biaya jasa kini	52.314.545	45.360.904 <i>Current service cost</i>
Biaya bunga	54.448.359	46.929.958 <i>Interest cost</i>
Keuntungan aktuarial	(32.512)	(195.745) <i>Actuarial gain</i>
Beban imbalan kerja lain	292.156	- <i>Other employee benefit cost</i>
Beban yang diakui	107.022.548	92.095.117 Recognized expense

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
2019	2018	
Liabilitas awal tahun	653.641.759	670.427.967 <i>Liabilities at beginning of year</i>
Beban yang diakui dalam laba rugi	107.022.548	92.095.117 <i>Expense recognized in profit or loss</i>
Penghasilan komprehensif lain	34.382.820	(63.006.199) <i>Other comprehensive income</i>
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(44.258.682)	(45.875.126) <i>Current year benefit payment</i>
Liabilitas akhir tahun	750.788.445	653.641.759 Liabilities at end of year

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
2019	2018	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	653.641.759	670.427.967 <i>Present value of liabilities - beginning of year</i>
Biaya jasa kini	52.314.544	45.360.904 <i>Current service cost</i>
Biaya bunga	54.448.359	46.929.958 <i>Interest cost</i>
Ekspektasi pembayaran imbalan	(44.258.682)	(45.875.126) <i>Expected benefit payments</i>
Kerugian (keuntungan) aktuarial	34.350.308	(63.201.944) <i>Actuarial loss (gain)</i>
Biaya jasa lalu	292.157	- <i>Past service cost</i>
Nilai kini liabilitas akhir tahun	750.788.445	653.641.759 Present value of liabilities - end of year

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The maturity of employee benefit liabilities as of December 31, 2019 and 2018 is as follows:

31 Desember/December 31,		
2019	2018	
Jatuh tempo <= 1 tahun	27.438.107	38.409.724 <i>Maturity <= 1 year</i>
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	192.447.732	150.015.210 <i>Maturity > 1 year and <= 5 years</i>
Jatuh tempo > 5 tahun	5.227.027.064	4.987.064.913 <i>Maturity > 5 years</i>
Total	5.446.912.903	5.175.489.847 Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Penghargaan masa bhakti (lanjutan)

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2019 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase
Nilai kini liabilitas	63.989.315
Biaya jasa kini	5.871.567

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2019 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase
Nilai kini liabilitas	(72.934.913)
Biaya jasa kini	(6.878.900)

c. Program kesehatan pensiunan

Perusahaan memberikan imbalan kerja berupa program kesehatan pensiunan dan keluarga (termasuk anak dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang maksimal berumur 25 tahun). Program tersebut berupa bantuan pengobatan dari Perusahaan dalam jumlah tertentu dan telah terdaftar di Perusahaan. Program ini tidak didanai.

31 Desember/December 31,

	2019	2018	
Nilai kini liabilitas	646.446.873	634.268.491	<i>Present value of liabilities</i>
Nilai wajar aset program	-	-	<i>Fair value of plan assets</i>
Liabilitas yang diakui	646.446.873	634.268.491	Recognized liabilities

**Tahun yang Berakhir pada tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,**

	2019	2018	
Biaya jasa kini	10.164.223	9.104.564	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	52.834.565	48.911.666	<i>Interest cost</i>
Beban yang diakui	62.998.788	58.016.230	Recognized expense

27. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

b. Gratuity and compensation benefits (continued)

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2019:

	Penurunan/ Decrease	
	(74.507.015)	<i>Present value of liabilities</i>
	(7.026.401)	<i>Current service cost</i>

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2019:

	Penurunan/ Decrease	
	63.724.885	<i>Present value of liabilities</i>
	5.846.263	<i>Current service cost</i>

c. Pension healthcare program

The Company also provides long term post-employment benefits in form of healthcare program for pensioners and family (including up to 3 (three) children with maximum age of 25 years). The program is in the form of medical assistance from the Company in certain amounts and after registering with the Company. This program is not funded.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

27. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

c. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

c. Pension healthcare program (continued)

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,			
	2019	2018	
Liabilitas awal tahun	634.268.491	698.738.087	Liabilities at beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi	62.998.788	58.016.230	Expense recognized in profit or loss
Penghasilan komprehensif lain	32.702.718	(44.275.256)	Other comprehensive income
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(83.523.124)	(78.210.570)	Current year benefit payment
Liabilitas akhir tahun	646.446.873	634.268.491	Liabilities at end of year

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,			
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	634.268.491	698.738.087	Present value of liabilities - beginning of year
Biaya jasa kini	10.164.223	9.104.564	Current service cost
Biaya bunga	52.834.565	48.911.666	Interest cost
Ekspektasi pembayaran imbalan	(83.523.124)	(78.210.570)	Expected benefit payments
Kerugian (keuntungan) aktuarial	32.702.718	(44.275.256)	Actuarial loss (gain)
Nilai kini liabilitas akhir tahun	646.446.873	634.268.491	Present value of liabilities - end of year

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The maturity of employee benefit liabilities as of December 31, 2019 dan 2018 is as follows:

31 Desember/December 31,			
	2019	2018	
Jatuh tempo <= 1 tahun	66.532.257	70.202.653	Maturity <= 1 year
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	301.100.463	317.711.319	Maturity > 1 year and <= 5 years
Jatuh tempo > 5 tahun	756.298.637	704.691.488	Maturity > 5 years
Total	1.123.931.357	1.092.605.460	Total

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	51.114.024	(60.843.569)	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	1.714.145	(2.191.585)	Current service cost

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa imbalan cuti besar merupakan manfaat yang diperhitungkan mengacu kepada Peraturan Perusahaan. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus dan diberikan bantuan cuti besar sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap. Program ini tidak didanai.

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

27. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

d. Other long-term employee benefits

Other long-term permanent employee benefits are in the form of long service leave benefits that are calculated in reference to the Company's Regulation. Participants include all employees that have worked at least 6 (six) years of continuous service and given assistance amounting to 1 (one) time the regular income. This program is not funded.

d. Other long-term employee benefits (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas	29.042.101	24.291.771	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	-	-	Fair value of plan assets
Liabilitas yang diakui	29.042.101	24.291.771	Recognized liabilities
Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,			
	2019	2018	
Biaya jasa kini	4.022.673	3.886.261	Current service cost
Biaya bunga	2.023.505	1.905.647	Interest cost
Kerugian atau (keuntungan) aktuarial	448.046	(7.814.219)	Actuarial loss or (gain)
Beban imbalan kerja lain	(1.437.912)	-	Other employee benefit cost
Beban (keuntungan) yang diakui	5.056.312	(2.022.311)	Recognized expense (income)
Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,			
	2019	2018	
Liabilitas awal tahun	24.291.771	27.223.534	Liabilities at beginning of year
Beban (penghasilan) yang diakui dalam laba rugi	5.056.312	(2.022.311)	Expense (income) recognized in profit or loss
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(305.982)	(909.452)	Current year benefit payment
Liabilitas akhir tahun	29.042.101	24.291.771	Liabilities at end of year

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

27. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

d. Other long-term employee benefits (continued)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	24.291.771	27.223.534	Present value of liabilities - beginning of year
Biaya jasa kini	4.022.673	3.886.261	Current service cost
Biaya jasa lalu	(1.437.912)	-	Past service cost
Biaya bunga	2.023.505	1.905.647	Interest cost
Ekspektasi pembayaran imbalan	(305.982)	(909.451)	Expected benefit payments
Kerugian (keuntungan) aktuarial	448.046	(7.814.220)	Actuarial loss (gain)
Nilai kini liabilitas akhir tahun	29.042.101	24.291.771	Present value of liabilities - end of year

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The maturity of employee benefit liabilities as of December 31, 2019 and 2018 is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Jatuh tempo <= 1 tahun	3.604.833	4.716.702	Maturity <= 1 year
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	28.200.991	21.179.476	Maturity > 1 year and <= 5 years
Jatuh tempo > 5 tahun	213.737.684	147.505.843	Maturity > 5 years
Total	245.543.508	173.402.021	Total

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2019 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2019:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	1.697.089	(1.916.579)	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	225.807	(255.328)	Current service cost

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2019 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2019:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	(1.913.371)	1.724.657	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	(254.900)	229.472	Current service cost

e. Program pensiun iuran pasti

e. Defined contribution plan

Kelompok Usaha menyediakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sejak tahun 2002. Iuran program tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada tahun 2019 dan 2018, iuran program yang dibayarkan Kelompok Usaha masing-masing sebesar Rp5.357.565 dan Rp5.343.045.

The Group provides a defined contribution pension plan for employees hired with permanent status since 2002. The contribution plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. In 2019 and 2018, contribution plan paid by the Group amounted to Rp5,357,565 dan Rp5,343,045, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

28. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah:

Pemegang saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nominal/ Amount	Shareholders
Negara Republik Indonesia	1.444.029	100%	1.444.029.000	Republic of Indonesia

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang telah diaktakan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 dari Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., modal dasar Perusahaan sebesar Rp4.000.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.009.958.000 atau sebanyak 1.009.958 saham.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan sebagai berikut:

- 1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp7.652.976.
- 2) Penambahan penyertaan modal negara tersebut berasal dari pengalihan barang milik negara Kementerian Perhubungan berupa dermaga beton hasil kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan Sintete-Sambas, Kalimantan Barat, yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2011 tersebut di atas, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang tertuang dalam Risalah RUPSLB No. RIS-269/MBU/S/2012 tanggal 18 Juli 2012 dengan keputusan sebagai berikut:

- 1) menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (*portepel*) sebesar 7.653 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham sebesar Rp7.653.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.
- 2) menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan sebesar Rp7.653.000 melalui:

28. SHARE CAPITAL

The Shareholders of the Company as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

Based on General Meeting of Shareholders' held on August 15, 2008 that was notarized through Notarial Deed No. 2 of Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., the Company's authorized capital amounted to Rp4,000,000,000 divided into 4,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp1,009,958,000 divided into 1,009,958 shares.

Based on the Regulation of Government of The Republic of Indonesia No.58 Year 2011 dated December 22, 2011 about Additional Participation Capital of The Republic of Indonesia in the Company as follows:

- 1) The additional share capital of the government amounted to Rp7,652,976.
- 2) Additional share capital by the government came from the transfer of concrete jetty owned by Ministry of Transportation as a result of port development activities in Sintete-Sambas, West Kalimantan, provided by Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (State Revenue and Expenditure Budget) in 2005.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 Year 2011, the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company was conducted as stipulated in the Minutes of Meeting No. RIS-269/MBU/S/2012 dated July 18, 2012 with decision as follows:

- 1) approved the disbursement/placement of shares that were still in portfolio of 7,653 shares with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share amounting to Rp7,653,000, which was fully taken by the Republic of Indonesia.
- 2) approved additional paid-in capital of the Company owned by the Republic of Indonesia amounting to Rp7,653,000 through:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

28. MODAL SAHAM (lanjutan)

- a) sebesar Rp7.652.976 merupakan penambahan penyertaan modal negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan;
- b) sebesar Rp24 berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana dalam surat No. 020/LA-PL.II/V/12 tanggal 25 Mei 2012.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 03 tanggal 2 Agustus 2013, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000 yang berasal dari pengalihan seluruh modal saham milik Negara RI pada Rukindo dalam rangka restrukturisasi Rukindo.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut, maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar Rp1.017.611.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H. M.Kn. No. 09 tanggal 21 Agustus 2019, Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

Dengan adanya perubahan jenis saham tersebut, modal dasar perseroan adalah sebesar Rp4.000.000.000 yang terdiri dari 4.000.000 lembar saham dan terbagi atas satu lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 3.999.999 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh). Modal yang telah di ambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp1.444.029.000 yang terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 1.444.028 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

28. SHARE CAPITAL (continued)

- a) Rp7,652,976 as additional share capital of the government as stated in Government Regulation No. 58 Year 2011 regarding Additional Capital contribution by the Government of the Republic of Indonesia into the Company's share capital;
- b) Rp24 taken from the Company's reserve capitalization as stated in the 2011 financial statements audited by KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan through letter No. 020/LA-PL.II/V/12 dated May 25, 2012.

Based on the Deed of Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as notarized in the Notarial Deed No. 03 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated August 2, 2013, the Government of the Republic of Indonesia which in this case was represented by the Minister of SOEs increased its investment in the Company by Rp426,418,000 which was derived from the transfer of the entire share capital owned by the Republic of Indonesia in Rukindo for restructuring of Rukindo.

With the additional capital contribution by the Republic of Indonesia, the issued and fully paid capital of the Company changed from Rp1,017,611,000 to Rp1,444,029,000.

Based on Minister of SOEs Decree Statement as The General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which was notarized on Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No. 09 dated August 21, 2019, The Government of the Republic Indonesia, in this case represented by the Minister of SOEs, changed the types of shares that were originally without series became consisted of Series A Dwiwarna Shares and Series B shares.

With the changes in types of shares, Company's authorized capital of the company is Rp4,000,000,000 consisting of 4,000,000 shares and divided into one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 3,999,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount). The capital that has been taken part and fully paid by The Republic of Indonesia as much as Rp1,444,029,000 consisting of one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 1,444,028 Series B share, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. MODAL DONASI

Pada tahun 1997, Perusahaan memperoleh modal donasi berupa tanah dan gedung CDC dari Yayasan Sekar Laut masing-masing sebesar Rp1.820.092 dan Rp23.957.447.

Pada tahun 2009, Perusahaan memperoleh modal donasi berupa gedung stasiun pandu dari Pemerintah Daerah Cilegon sebesar Rp1.048.443.

29. DONATED CAPITAL

In 1997, the Company received donated capital in the form of land and CDC building from Yayasan Sekar Laut amounting to Rp1,820,092 and Rp23,957,447.

In 2009, the Company received donated capital in form of pilotage station building from the Local Government of Cilegon amounting to Rp1,048,443.

30. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

	Aset Neto/Net Assets		Laba (Rugi) Neto/ Net Income (Loss)		
	31 Desember/ December 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	2019	2018	
IKT	734.895.768	656.038.040	30.107.262	17.048.717	IKT
JAI	411.528.755	458.295.885	16.483.424	18.459.323	JAI
API	68.594.301	28.902.764	316.272	(911.689)	API
EPI	48.589.605	47.475.705	6.417.198	7.071.063	EPI
EDII	47.710.363	47.867.154	7.565.246	8.669.646	EDII
ILCS	31.094.899	44.028.484	(13.004.818)	622.252	ILCS
MTI	5.898.716	5.938.965	202.359	312.339	MTI
RSP	194.516	917.987	(94.703)	88.612	RSP
Rukindo	130.526	(4.276)	2.179	174	Rukindo
PTP	44.218	58.517	15.232	36.944	PTP
IPC TPK	26.039	25.576	30.555	35.894	IPC TPK
PPI	18.370	2.206	24.174	13.794	PPI
JPPI	(206)	(356)	150	501	JPPI
PMLI	(1.834)	(2.850)	1.016	819	PMLI
PII	(39.247)	(4.242)	(17.998)	(230)	PII
Total	1.348.684.789	1.289.539.559	48.047.548	51.448.159	Total

31. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

- a. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diaktakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 13 tanggal 29 April 2019 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain:
- penggunaan laba neto konsolidasian Perusahaan tahun buku 2018 sebagai berikut:
 - pembagian dividen tunai sebesar 35% dari laba neto atau sebesar Rp832.742.000.
 - penetapan cadangan sebesar 65% dari laba neto atau sebesar Rp1.546.519.695.

Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tanggal 27 Mei 2019.

31. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE

- a. Based on the General Meeting of Shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 13 on April 29, 2019 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn the shareholders approved, among others:
- utilization of 2018 consolidated net income of the Company as follows:
 - distribution of cash dividends 35% of net income or amounted to Rp832,742,000.
 - reserve 65% of net income or amounted to Rp1,546,519,695.

The Company has paid the above mentioned dividend on May 27, 2019.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

31. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM (lanjutan)

- b. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diaktakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 02 tanggal 3 April 2018 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain:
- penggunaan laba neto konsolidasian Perusahaan tahun buku 2017 sebagai berikut:
 - pembagian dividen tunai sebesar 30% dari laba neto atau sebesar Rp653.968.052.
 - penetapan cadangan sebesar 70% dari laba neto atau sebesar Rp1.525.925.454.

Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tanggal 30 April 2018.

31. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE (continued)

- b. Based on the General Meeting of Shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 02 on April 3, 2018 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., the shareholders approved, among others:

- utilization of 2017 consolidated net income of the Company as follows:
 - distribution of cash dividends 30% of net income or amounted to Rp653,968,052.
 - reserve 70% of net income or amounted to Rp1,525,925,454.

The Company has paid the above mentioned dividend on April 30, 2018.

32. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

32. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that wil not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(510.069.366)	(442.795.382)	Remeasurement of defined benefit plans
Pos yang akan direklasifikasi akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will be reclassified to profit or loss
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	620.425.512	373.526.146	Exchange difference due to financial statements translation
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	(215.365.006)	(45.328.052)	Changes in fair value of available-for-sale financial assets
Total	(105.008.860)	(114.597.288)	Total

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan merupakan penjabaran laporan keuangan JICT, NPCT1 dan TPK Koja yang mata uang fungsionalnya adalah Dolar Amerika Serikat.

Exchange difference due to financial statements translation represents translation of financial statements of JICT, NPCT1 and TPK Koja which functional currency is United States Dollar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR

33. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sependengali	(317.597.475)	(317.597.475)	<i>Difference in value of business combination transaction of entities under common control</i>
<p>Pada tanggal 2 Agustus 2013, Perusahaan menerima pengalihan seluruh saham Rukindo milik Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan nilai pengalihan sebesar Rp426.418.000 (Catatan 28). Atas pengalihan tersebut, Perusahaan memiliki 100% saham Rukindo.</p> <p>Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sependengali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:</p>			
Aset neto Rukindo pada tanggal pengalihan		108.820.525	<i>Net assets of Rukindo as of transfer date</i>
Nilai pengalihan		426.418.000	<i>Transfer amount</i>
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sependengali		(317.597.475)	<i>Difference in value of business combination transaction of entity under common control</i>

34. PENDAPATAN OPERASI

34. OPERATING REVENUES

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Pelayanan jasa terminal	3.267.617.624	3.242.900.495	<i>Terminal services</i>
Pelayanan terminal petikemas	2.603.524.300	2.706.288.702	<i>Container services</i>
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	2.852.740.624	2.873.048.549	<i>Land, building, water and electricity services</i>
Pelayanan jasa kapal	1.322.240.654	1.416.634.965	<i>Vessel services</i>
Jasa logistik	385.563.738	314.494.106	<i>Logistic services</i>
Pelayanan kesehatan	271.456.635	264.847.834	<i>Medical services</i>
Pelayanan jaringan dan konsultasi sistem informasi	126.790.040	137.146.663	<i>Network services and consultant of information system</i>
Pendapatan pas pelabuhan	109.219.182	86.651.881	<i>Port entry fee</i>
Pelayanan jasa barang	107.220.693	151.122.002	<i>Cargo services</i>
Pengusahaan peralatan	66.735.164	98.587.873	<i>Equipment services</i>
Pendapatan kebersihan	8.817.006	12.403.493	<i>Cleaning services</i>
Jasa keuangan	6.387.167	111.746.400	<i>Financial service</i>
Lain-lain	13.439.398	20.827.931	<i>Others</i>
Total	11.141.752.225	11.436.700.894	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

35. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan terminal Kalibaru dan Kijing. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

35. CONSTRUCTION REVENUES AND EXPENSES

Construction revenue is the compensation of the service recognized by the Company for construction of Kalibaru and Kijing terminal. Construction revenue is measured using cost method, where all costs are directly attributable to the acquiring cost of the assets.

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Pendapatan konstruksi	1.542.697.617	781.658.834	Construction revenues
Beban konstruksi	(1.542.697.617)	(781.658.834)	Construction expenses

36. BEBAN OPERASI

36. OPERATING EXPENSES

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Pegawai	2.639.837.009	2.355.638.314	Employee
Kerja sama mitra usaha Umum	2.568.723.277	2.561.594.144	Partnership General
Bahan bakar dan bahan habis pakai	1.211.702.460	1.050.157.293	Fuels and supplies
Penyusutan dan amortisasi	897.934.623	884.189.512	Depreciation and amortization
Pemeliharaan	863.705.620	773.359.280	Maintenance
Administrasi kantor	168.627.849	265.089.798	Office administration
Asuransi	104.292.888	98.934.022	Insurance
Lain-lain	64.907.607	52.834.385	Others
	626.340	758.072	
Total	8.520.357.673	8.042.554.820	Total

Kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi seperti perusahaan-perusahaan operator fasilitas pelabuhan yang menyediakan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan serta beban pegawai nonorganik.

The partnership expenses mainly represent the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners such as port facilities' management companies for providing loading and unloading activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports and outsourcing expenses.

Beban umum terutama merupakan beban konsesi, beban jasa konsultan, imbalan kerja, perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan dan pemasaran.

General expenses mainly consist of concession fee, consultants, employee benefits, business travelling, education and training and marketing expenses.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

37. PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAINNYA – NETO

37. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSE) - NET

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Laba (rugi) selisih kurs - neto	322.213.993	(672.041.473)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Amortisasi premium (Catatan 46a, 46b dan 46e)	146.997.708	146.997.708	Amortization of premium (Notes 46a, 46b and 46e)
Pendapatan atas pengalihan aset	67.101.548	535.961.600	Income from assets transfer
Laba (rugi) penjualan aset tetap	45.882.184	6.546.554	Gain (loss) on sale of fixed assets
Pendapatan denda	20.716.447	58.039.661	Income from penalties
Beban pajak penghasilan final	(144.760.388)	(121.554.898)	Final income tax expense
Beban denda	(105.916.793)	(219.167.681)	Expenses from penalties
Lain-lain - neto	364.879.815	68.857.955	Others - net
Total	717.114.514	(196.360.574)	Total

Pendapatan atas pengalihan aset merupakan perolehan aset tetap karena berakhirnya perjanjian kerjasama.

Income from assets transfer represents acquisition of fixed assets as a result of end of cooperation agreement.

Beban denda merupakan denda pajak.

Expense from penalties represents tax penalty.

38. PENDAPATAN KEUANGAN

38. FINANCE INCOME

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Pendapatan bunga deposito	771.045.247	580.413.469	Interest income from deposits
Pendapatan jasa giro	65.214.865	108.500.831	Interest income on current account
Total	836.260.112	688.914.300	Total

39. BEBAN KEUANGAN

39. FINANCE COSTS

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Beban bunga dan amortisasi diskonto dan biaya transaksi	1.197.098.875	1.128.468.251	Interest expenses and amortization of discount and transaction cost
Beban administrasi	3.138.214	2.313.765	Administration expenses
Total	1.200.237.089	1.130.782.016	Total

40. BAGIAN LABA ENTITAS ASOSIASI

40. EQUITY IN INCOME OF ASSOCIATES

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
JICT	138.210.596	202.616.584	JICT
NPCT1	101.023.133	171.964.086	NPCT1
CTP	1.894.058	2.857.275	CTP
TPI	(559.444)	(1.237.352)	TPI
Total	240.568.343	376.200.594	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, antara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Kelompok Usaha dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sepengendalian dengan Kelompok Usaha.

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan merupakan pihak berelasi.

Sifat hubungan berelasi

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Pemegang saham/ <i>Controlling Shareholder</i>	Negara Republik Indonesia	Jasa konsesi/ <i>Concession service</i>
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i>
	PT Bank Syariah Mandiri	Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i>
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank BNI Syariah	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT BRI Agroniaga Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>
	PT Pertamina (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>

41. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Group enters into transactions with related parties. Entities are considered to be related if, among these, the company has the ability, directly or indirectly, to control or jointly control or have significant influence over these entities in making financial and operating decisions. Entities are also considered to be related if they are under common control with the Group.

The Government of the Republic of Indonesia is the controlling shareholder of the Company. All entities that are owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia and also entities where the Republic of Indonesia has significant influence are related parties.

Nature of relationship with related parties

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**41. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**41. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity		
	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	Koperasi Pegawai Maritim	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	PT Multimedia Nusantara	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	PT Nusantara Regas	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	PT Pertamina Patra Niaga	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	Koperasi Karyawan TPK KOJA	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penjualan jasa/Sales
	PT Semen Padang	Penjualan jasa/Sales
	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Penjualan jasa/Sales
	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Dharma Lautan Nusantara	Penjualan jasa/Sales
	Tentara Nasional Indonesia	Penjualan jasa/Sales
	Instansi Pemerintah	Penjualan jasa/Sales
	BPJS Kesehatan	Penjualan jasa/Sales
	PT Pupuk Indonesia Logistik	Penjualan jasa/Sales

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**41. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**41. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	PT Graha Sarana Duta	Penjualan jasa/Sales
	PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT BNI Life Insurance	Penjualan jasa/Sales
	PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Pertamina Trans Kontinental (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Bukit Asam Tbk	Penjualan jasa/Sales
	PT Perkebunan Nusantara VII	Penjualan jasa/Sales
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa pembangunan/ Construction services
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Jasa pembangunan/ Construction services
	PT Utama Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ Construction services
	PT Wijaya Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ Construction services
	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan (DP4)	Jasa pension/ Pension services
	Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta	Pinjaman/Loan
Entitas asosiasi/Associate entities	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Pinjaman/Loan
	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Pinjaman/Loan
	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Pinjaman/Loan
	JICT	Sewa dan Royalti/ Rental and Royalty
Operasi bersama/Joint operation	NPCT1	Investasi/Investment
	TPK Koja	Sewa dan Royalti Rental and Royalty

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**41. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**41. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi

Transactions with related parties

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows:

a. Kas dan setara kas (Catatan 4)

a. Cash and cash equivalent (Note 4)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019		31 Desember 2018/ December 31, 2018		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
Bank					Cash in banks
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	516.127.675	0,99	873.774.196	1,75	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	140.963.425	0,27	767.519.280	1,49	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	19.976.271	0,04	32.711.087	0,06	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	10.386.922	0,02	2.814.711	0,01	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank BNI Syariah	9.671.050	0,02	7.222.415	0,01	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.244.179	0,00	802.805.464	1,56	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Total	698.369.522	1,34	2.486.847.153	4,88	Total
<u>Dolar AS</u>					<u>US Dollar</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	193.637.340	0,37	15.766.760	0,03	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	36.287.523	0,07	40.066.025	0,08	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	24.318.481	0,05	8.062.416	0,02	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total	254.243.344	0,49	63.895.201	0,13	Total
<u>Euro</u>					<u>Euro</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	44	0,00	320.652	0,00	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	44	0,00	320.652	0,00	Total
Deposito Berjangka					Time Deposits
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.073.096.983	2,05	854.768.648	1,66	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	583.240.758	1,11	930.074.000	1,81	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	548.297.580	1,05	557.631.769	1,08	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	275.290.490	0,53	25.000.000	0,05	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	131.816.463	0,25	10.535.860	0,02	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	19.500.000	0,04	-	0,00	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
Total	2.631.242.274	5,03	2.378.010.277	4,62	Total
<u>Dolar AS</u>					<u>US Dollar</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.144.937.050	11,73	3.673.467.675	7,14	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.906.696.846	9,37	5.032.416.814	9,78	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	67.167.619	0,13	-	0,00	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	11.118.801.515	21,23	8.705.884.489	16,92	Total
<u>Dolar Singapura</u>					<u>Singapore Dollar</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	0,00	471.954.525	0,92	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total	-	0,00	471.954.525	0,92	Total

*) dari total aset

*) from total assets

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**41. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**41. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

b. Investasi jangka pendek (Catatan 5)

b. Short-term investment (Note 5)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019		31 Desember 2018/ December 31, 2018		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
Deposito berjangka					Time deposits
<i>Rupiah</i>					<i>Rupiah</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	104.642.400	0,20	-	0,00	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	0,00	203.053.994	0,39	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	0,00	4.000.000	0,01	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
<i>Dolar AS</i>					<i>US Dollar</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.154.655.000	4,11	-	0,00	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	0,00	2.099.745.000	4,08	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	0,00	796.455.000	1,55	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	2.259.297.400	4,31	3.103.253.994	6,03	Total

*) dari total aset

*) from total assets

c. Piutang usaha (Catatan 6)

c. Trade receivables (Note 6)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019		31 Desember 2018/ December 31, 2018		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
BPJS Kesehatan	67.589.555	0,13	46.293.536	0,09	BPJS Kesehatan
PT Djakarta Lloyd (Persero)	63.483.316	0,12	5.294.060	0,05	PT Djakarta Lloyd (Persero)
PT Semen Padang	17.401.269	0,03	12.849.176	0,02	PT Semen Padang
Tentara Nasional Indonesia	13.197.544	0,03	19.839.702	0,04	Indonesian Armed Forces
PT Pertamina Trans Kontinental	12.776.013	0,02	27.555.316	0,02	PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertamina (Persero)	9.830.300	0,02	10.441.787	0,02	PT Pertamina (Persero)
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	5.896.327	0,01	7.619.639	0,01	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	5.569.386	0,01	5.752.618	0,01	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
PT Dharma Lautan Nusantara	4.797.674	0,01	5.391.534	0,01	PT Dharma Lautan Nusantara
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	4.723.761	0,01	3.360.219	0,01	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	1.448.414	0,00	399.723	0,00	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.024.346	0,00	12.605.742	0,00	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Bukit Asam	606.642	0,00	363.661	0,00	PT Bukit Asam
Instansi Pemerintah	190.719	0,00	2.290.123	0,41	Government Institutions
Lain-lain	136.857.151	0,26	50.115.601	0,04	Others
Subtotal	345.392.417	0,65	210.172.437	0,73	Sub-total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(210.193.679)	(0,41)	(54.297.115)	(0,11)	Less: Allowance for impairment
Total	135.198.738	0,24	155.875.322	0,62	Total

*) dari total aset

*) from total assets

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**41. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

d. Piutang lain-lain (Catatan 7)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019		31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
JICT	659.701.914	1,26	617.883.980	1,20
CTP	111.545.526	0,22	-	0,00
Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta	11.989.210	0,02	11.989.210	0,02
Instansi Pemerintah	2.688.218	0,01	2.359.080	0,00
PT Hutama Karya (Persero)	1.550.567	0,00	1.550.567	0,00
NPCT1	1.391.404	0,00	1.171.307	0,00
Tentara Nasional Indonesia PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	934.500	0,00	934.500	0,00
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	336.006	0,00	336.006	0,00
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	234.199	0,00	234.199	0,00
Lain-lain	230.455	0,00	230.455	0,00
	30.616.705	0,05	31.317.306	0,07
Subtotal	821.218.704	1,56	672.932.848	1,29
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(36.267.285)	(0,07)	(32.764.117)	(0,06)
Total	784.951.419	1,49	640.168.731	1,23

*) dari total aset

**41. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

d. Other receivables (Note 7)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019		31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
JICT	659.701.914	1,26	617.883.980	1,20
CTP	111.545.526	0,22	-	0,00
Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta	11.989.210	0,02	11.989.210	0,02
Government Institutions	2.688.218	0,01	2.359.080	0,00
PT Hutama Karya (Persero)	1.550.567	0,00	1.550.567	0,00
NPCT1	1.391.404	0,00	1.171.307	0,00
Indonesia Armed Forces PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	934.500	0,00	934.500	0,00
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	336.006	0,00	336.006	0,00
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	234.199	0,00	234.199	0,00
Lain-lain	230.455	0,00	230.455	0,00
	30.616.705	0,05	31.317.306	0,07
Subtotal	821.218.704	1,56	672.932.848	1,29
Dikurangi: Allowance for impairment	(36.267.285)	(0,07)	(32.764.117)	(0,06)
Total	784.951.419	1,49	640.168.731	1,23

*) from total assets

e. Pendapatan masih akan diterima (Catatan 9)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019		31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
BPJS Kesehatan	40.512.903	0,08	48.952.082	0,10
JICT	2.600.380	0,00	7.757.513	0,00
NPCT1	1.730.516	0,00	1.860.619	0,00
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	560.228	0,00	3.673.517	0,01
PT Graha Sarana Duta	-	-	1.798.307	0,00
PT Pupuk Indonesia Logistik	-	-	1.469.544	0,00
Lainnya	1.182.464	0,00	442.227	0,00
Total	46.586.491	0,08	65.953.809	0,11

*) dari total aset

e. Accrued revenues (Note 9)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019		31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
BPJS Kesehatan	40.512.903	0,08	48.952.082	0,10
JICT	2.600.380	0,00	7.757.513	0,00
NPCT1	1.730.516	0,00	1.860.619	0,00
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	560.228	0,00	3.673.517	0,01
PT Graha Sarana Duta	-	-	1.798.307	0,00
PT Pupuk Indonesia Logistik	-	-	1.469.544	0,00
Lainnya	1.182.464	0,00	442.227	0,00
Total	46.586.491	0,08	65.953.809	0,11

*) from total assets

f. Pinjaman bank jangka pendek (Catatan 17)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019		31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT Bank Syariah Mandiri	28.193.914	0,08	-	0,00
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	0,00	4.000.000	0,00
Total	28.193.914	0,08	4.000.000	0,00

**) dari total liabilitas

f. Short-term bank loans (Note 17)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019		31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT Bank Syariah Mandiri	28.193.914	0,08	-	0,00
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	0,00	4.000.000	0,00
Total	28.193.914	0,08	4.000.000	0,00

**) from total liabilities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**41. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

g. Utang usaha (Catatan 18)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	573.631.158	1,69
PT Multimedia Nusantara	12.207.051	0,04
PT Wijaya Karya (Persero)	9.570.900	0,03
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	6.607.716	0,02
Koperasi Pegawai Maritim	4.772.648	0,01
PT Pertamina Patra Niaga	3.869.484	0,01
PT Nusantara Regas	1.366.406	0,00
PT Waskita Karya (Persero)	630.558	0,00
Koperasi Karyawan TPK KOJA	478.459	0,00
PT Pertamina (Persero)	240.739	0,00
PT Jakarta Internasional Container Terminal	30.369	0,00
PT Hutama Karya (Persero)	-	0,00
PT PLN (Persero)	-	0,00
Lain-lain	463.147.299	1,37
Total	1.076.552.787	3,17

**) dari total liabilitas

h. Uang untuk diperhitungkan (Catatan 19)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
Tentara Nasional Indonesia	708.865	0,00
PT. Pertamina Trans Kontinental	55.036	0,00
PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)	49.603	0,00
Instansi Pemerintah	18.512	0,00
PT. Semen Padang	1.448	0,00
PT Pertamina (Persero)	-	0,00
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	-	0,00
Lain-lain	116.787	0,00
Total	950.251	0,00

**) dari total liabilitas

i. Uang titipan pelanggan (Catatan 21)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT BNI Life Insurance	5.833.813	0,02
Instansi Pemerintah	1.682.618	0,00
PT Bhanda Ghara Reksa	1.211.447	0,00
BPJS Kesehatan	344.708	0,01
Lain-lain	9.309.461	0,01
Total	18.382.047	0,04

**) dari total liabilitas

**41. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

g. Trade payables (Note 18)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	981.127.161	2,80
PT Multimedia Nusantara	7.150.728	0,02
PT Wijaya Karya (Persero)	9.569.863	0,03
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	31.091.334	0,09
Koperasi Pegawai Maritim	15.967.235	0,05
PT Pertamina Patra Niaga	1.930.142	0,01
PT Nusantara Regas	5.023.508	0,01
PT Waskita Karya (Persero)	19.640.664	0,06
Koperasi Karyawan TPK KOJA	1.715.265	0,00
PT Pertamina (Persero)	4.699.556	0,01
PT Jakarta Internasional Container Terminal	18.982.268	0,05
PT Hutama Karya (Persero)	45.800.631	0,13
PT PLN (Persero)	1.612.737	0,00
Others	102.697.408	0,29
Total	1.247.008.500	3,55

**) from total liabilities

h. Advances from customer (Note 19)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
Indonesian Armed Forces	8	0,00
PT. Pertamina Trans Kontinental	38.799	0,00
PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)	74.770	0,00
Government Institutions	19.194	0,00
PT. Semen Padang	169.011	0,00
PT Pertamina (Persero)	14.230	0,00
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.995	0,00
Others	710.100	0,00
Total	1.028.107	0,00

**) from total liabilities

i. Deposits from customer (Note 21)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT BNI Life Insurance	4.351.784	0,01
Government Institutions	2.918.247	0,01
PT Bhanda Ghara Reksa	1.211.447	0,00
BPJS Kesehatan	2.336.222	0,01
Others	3.930.781	0,01
Total	14.748.481	0,04

**) from total liabilities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**41. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

j. Liabilitas jangka pendek lainnya dan liabilitas jangka panjang lainnya (Catatan 21 and 26)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
Jangka pendek (Catatan 21)		
JICT	38.980.725	0,11
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	31.666.118	0,09
Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	2.714.983	0,00
Total	73.361.826	0,20
Jangka panjang (Catatan 26)		
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	27.137.737	0,08
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	3.000.000	0,01
Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	-	0,01
Total	30.137.737	0,10

**) dari total liabilitas

k. Utang bank jangka panjang (Catatan 23)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT Bank Syariah Mandiri	114.990.000	0,00

**) dari total liabilitas

l. Remunerasi personal manajemen kunci

Total gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya yang dibayar atau diakru untuk Dewan Komisaris dan Direksi Kelompok Usaha adalah sebesar Rp220.171.759 dan Rp169.747.210, masing-masing untuk tahun 2019 dan 2018.

**41. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

j. Other short-term liabilities and other long-term liabilities (Note 21 and 26)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
			Short-term (Note 20)
	38.980.725	0,11	JICT
	31.666.118	0,09	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
	4.842.298	0,01	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)
	75.489.141	0,21	Total
			Long-term (Note 26)
	29.349.280	0,08	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
	8.923.000	0,03	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
	-	0,00	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)
	38.272.280	0,11	Total

**) from total liabilities

k. Long-term bank loan (Note 23)

	31 Desember 2018/ December 31, 2018		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
	-	0,00	PT Bank Syariah Mandiri

**) from total liabilities

l. Key management personnel remuneration

Total salaries and other short-term benefits paid to or accrued for the Group's Boards of Commissioners and Directors amounted to Rp222,171,759 and Rp169,747,210 for 2019 and 2018, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**42. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING**

**42. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

		31 Desember 2019/ December 31, 2019			
		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ In foreign currencies (full amount)	Setara dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah		
Aset				Assets	
Kas dan setara kas	USD	824.640.189	11.463.323.271	Cash and cash equivalents	
	EUR	3	44		
Investasi jangka pendek	USD	155.000.000	2.154.655.000	Short-term investments	
Piutang usaha	USD	3.968.641	55.168.077	Trade receivables	
	SGD	7.645	78.902		
Piutang lain-lain	USD	863.760	12.007.121	Other receivables	
Total aset			13.685.232.415	Total assets	
Liabilitas				Liabilities	
Utang obligasi	USD	1.600.000.000	22.241.600.000	Bonds payables	
Utang usaha	USD	35.140.494	488.488.004	Trade payables	
	EUR	8.000	124.704		
Liabilitas jangka pendek lainnya	USD	2.804.167	38.980.725	Other short-term liabilities	
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.186.888	225.013.928	Other long-term liabilities	
Total liabilitas			22.994.207.361	Total liabilities	
Liabilitas neto			9.308.974.946	Net liabilities	

		31 Desember 2018/ December 31, 2018			
		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ In foreign currencies (full amount)	Setara dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah		
Aset				Assets	
Kas dan setara kas	USD	811.587.784	11.752.602.695	Cash and cash equivalents	
	EUR	19.363	320.652		
	SGD	44.511.540	471.954.525		
Investasi jangka pendek	USD	200.000.000	2.896.200.000	Short-term investments	
Piutang usaha	USD	6.316.900	91.475.032	Trade receivables	
	SGD	3.059.518	32.439.975		
Piutang lain-lain	USD	299.916	4.343.080	Other receivables	
Total aset			15.249.335.959	Total assets	
Liabilitas				Liabilities	
Utang obligasi	USD	1.600.000.000	22.890.166.969	Bonds payables	
Utang usaha	USD	384.978	6.535.090	Trade payables	
Liabilitas jangka pendek lainnya	USD	2.691.853	38.980.725	Other short-term liabilities	
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.186.882	234.402.238	Other long-term liabilities	
Total liabilitas			23.170.085.022	Total liabilities	
Liabilitas neto			7.920.749.063	Net liabilities	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

43. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

43. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

**31 Desember 2019/
December 31, 2019**

	Nilai Tercatat/ Carrying Values	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan setara kas	15.603.553.329	15.603.553.329	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	2.596.701.126	2.596.701.126	Short-term investments
Piutang usaha - neto	848.025.482	848.025.482	Trade receivables - net
Piutang lain-lain - neto	830.069.397	860.069.397	Other receivables - net
Pendapatan masih akan diterima	305.452.354	305.452.354	Accrued revenues
Aset lancar lainnya	10.253.126	10.253.126	Other current assets
Investasi jangka panjang	3.211.023.600	3.211.023.600	Long term investment
Aset tidak lancar lainnya	306.328.874	306.328.874	Other non-current assets
Total	23.741.407.288	23.741.407.288	Total
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	34.193.914	34.193.914	Short-term bank loans
Utang usaha	1.436.482.338	1.436.482.338	Trade payables
Beban akrual	2.274.726.626	2.274.726.626	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	295.199.785	295.199.785	Other current liabilities
Utang obligasi	21.984.178.194	21.984.178.194	Bonds payable
Pinjaman bank jangka panjang	114.990.000	114.990.000	Long-term bank loans
Liabilitas jangka panjang lainnya	257.866.648	257.866.648	Other non-current liabilities
Total	26.397.637.505	26.397.637.505	Total

**31 Desember 2018/
December 31, 2018**

	Nilai Tercatat/ Carrying Values	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan setara kas	18.018.671.479	18.018.671.479	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	3.836.007.289	3.836.007.289	Short-term investments
Piutang usaha - neto	789.953.354	789.953.354	Trade receivables - net
Piutang lain-lain - neto	649.698.814	649.698.814	Other receivables - net
Pendapatan masih akan diterima	322.868.072	322.868.072	Accrued revenues
Aset lancar lainnya	6.139.521	6.139.521	Other current assets
Investasi jangka panjang	3.211.737.431	3.211.737.431	Long term investment
Aset tidak lancar lainnya	67.145.691	67.145.691	Other non-current assets
Total	26.902.221.651	26.902.221.651	Total
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	4.000.000	4.000.000	Short-term bank loans
Utang usaha	1.665.907.713	1.665.907.713	Trade payables
Beban akrual	2.316.108.053	2.316.108.053	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	275.588.175	275.588.175	Other current liabilities
Utang obligasi	22.890.166.969	22.890.166.969	Bonds payable
Liabilitas jangka panjang lainnya	272.674.518	272.674.518	Other non-current liabilities
Total	27.424.445.428	27.424.445.428	Total

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi.

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced or liquidation sale.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat, baik karena jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Kelompok Usaha menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek yang mencakup, antara lain, kas dan setara kas, investasi jangka pendek - deposito berjangka, investasi jangka pendek - aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, investasi jangka panjang - entitas asosiasi, pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual dan liabilitas jangka pendek lainnya, dianggap mendekati jumlah tercatatnya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.
- Investasi jangka pendek - efek yang diperdagangkan dan investasi jangka panjang - penyertaan saham dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar. Investasi jangka panjang - surat utang dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.
- Aset keuangan tersedia untuk dijual yang terdiri dari investasi pada saham dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dicatat pada biaya perolehan karena investasi pada instrumen ekuitas tersebut tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.
- Nilai wajar aset keuangan tidak lancar lainnya dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari aset tersebut karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**43. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

The Group determined the fair value measurement for disclosure purposes of each financial asset and financial liability based on the following methods and assumptions:

- *The fair value of current financial assets and current financial liabilities which includes, among others, cash and cash equivalents, short-term investments - time deposits, short-term investments – financial assets measured at fair value through profit or losses, trade receivables, other receivables, accrued revenues, long-term investments - associates, short-term bank loans, trade payables, accrued expenses and other current liabilities, are considered to approximate their carrying amounts as a result of insignificant discounting.*
- *Short-term investments - marketable securities and long-term investments - investment in share of stocks are presented at fair value using market price quotation. Long-term investments - bonds are presented at fair value by reference to similar bond price at reporting date.*
- *Available-for-sale financial assets that comprised investments in shares with percentage of ownership interest less than 20% are recognized at cost due to such investments in equity instruments have no quoted market price in an active market and their fair value cannot be reliably measureable.*
- *The fair values of other non-current financial assets are carried at historical cost because their fair values cannot be reliably measured. It is not practical to estimate the fair values of such assets because there are no fixed repayment terms although these are not expected to be settled within 12 months after the consolidated statement of financial position date.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Kelompok Usaha menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut: (lanjutan)

- Estimasi nilai wajar utang obligasi, utang bank dan liabilitas jangka panjang lainnya ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk instrumen dengan syarat, risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Estimasi nilai wajar bersifat judgmental dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Kelompok Usaha akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.
- Tingkat 1 : Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
- Tingkat 3 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.

**43. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

The Group determined the fair value measurement for disclosure purposes of each financial asset and financial liability based on the following methods and assumptions: (continued)

- The estimated fair values of bonds payable, bank loans and other long-term liabilities are determined by discounting the future cash flows using market interest rates for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

Fair value estimation is judgmental and involving various boundaries, including:

- Fair value presented are not considering the impact of future currency fluctuation.
- Fair value estimation are not always indicating value that the Group will record at the time of sales/termination of financial assets and liabilities.
- Level 1 : Fair value measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2 : Fair value measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.
- Level 3 : Fair value measured based on valuation techniques for which any inputs which have a significant effect on the recorded fair values that are not based on observable market data (unobservable inputs).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, hirarki nilai wajar Kelompok Usaha untuk aset yang nilai wajarnya diungkapkan adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019/December 31, 2019					
	Total/ Total	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					<i>Assets for which fair value are disclosed</i>
Aset tidak lancar					<i>Non-current Assets</i>
Properti investasi	11.139.878.868	-	11.139.878.868	-	<i>Investment properties</i>
31 Desember 2018/December 31, 2018					
	Total/ Total	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					<i>Assets for which fair value are disclosed</i>
Aset tidak lancar					<i>Non-current Assets</i>
Properti investasi	10.035.926.908	-	10.035.926.908	-	<i>Investment properties</i>

Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pengalihan antara pengukuran nilai wajar Tingkat 1 dan Tingkat 2 dan tidak ada pengalihan dari Tingkat 3 pengukuran nilai wajar.

Tidak terdapat aset dan liabilitas lain yang diukur dan diungkapkan berdasarkan nilai wajar selain yang telah dijelaskan di atas.

44. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kelompok Usaha terpengaruh terhadap risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga atas arus kas, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kelompok Usaha menerapkan manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut dengan melakukan evaluasi atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Kelompok Usaha. Pengelolaan risiko tersebut memberikan keyakinan kepada Kelompok Usaha bahwa aktivitas keuangan dikelola secara pruden sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

Kelompok Usaha menerapkan kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

**43. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

As of December 31, 2019 and 2018, fair value hierarchy of the Group for assets which fair value were disclosed are as follows:

As of December 31, 2019, there is no transfer between measurement of fair value of Level 1 and Level 2 and no transfer from Level 3 fair value measurements.

No other assets and liabilities have been measured and disclosed based on fair value other than above explained.

44. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group is exposed to foreign exchange risk, interest rate risk of cashflow, credit risk and liquidity risk. The Group applies risk management for such risks by evaluating the financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Group. Such risk management provides assurance to the Group that prudent financial activities are managed according to appropriate policies and procedures and financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and *risk appetite*.

The Group applies policies for managing each of these risks which is summarized below.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Kelompok Usaha. Eksposur Kelompok Usaha terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang obligasi dalam mata uang USD.

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing yang ada pada saat ini diungkapkan pada Catatan 42. Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 1% perubahan kurs mata uang asing terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:

	(Kenaikan) penurunan nilai tukar mata uang/ (Increases) decreases on foreign exchange rates
Perubahan kurs mata uang asing 2019	(+100bps -100bps)
Perubahan kurs mata uang asing 2018	(+100bps -100bps)

Risiko suku bunga atas arus kas

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas.

**44. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Foreign currency risk

Foreign currency risk is a risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in foreign currency exchange rates used by the Group. Exposure of the Group against exchange rate fluctuations is mainly derived from debt arising from bonds payable denominated in USD.

The current exposure to the foreign currency risk is disclosed in Note 42. Sensitivity analysis of a 1% fluctuation in the foreign exchange rates to profit after tax with other variance considered as constant is as follow:

	Dampak/ Effect	
	(93.089.749)	Fluctuation in the foreign exchange rates 2019
	93.089.749	
	(79.207.490)	Fluctuation in the foreign exchange rates 2018
	79.207.490	

Cash flows interest rate risk

Cash flows interest rate risk is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Loans at variable rates are exposed to cash flows risk.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko suku bunga atas arus kas (lanjutan)

Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survei di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat berdasarkan jatuh tempo dari aset dan liabilitas Kelompok Usaha yang terekspos terhadap risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2019.

	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate		Suku bunga tetap/ Fixed interest rate		Total
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	
Aset					
Kas dan setara kas	15.603.533.329	-	-	-	15.603.533.329
Investasi jangka pendek	-	-	2.259.297.400	-	2.259.297.400
Total aset	15.603.533.329	-	2.259.297.400	-	17.862.830.729
Liabilitas					
Pinjaman bank jangka pendek	-	-	34.193.914	-	34.193.914
Pinjaman bank jangka panjang	-	-	12.000	114.978.000	114.990.000
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	-	1.757.192	256.109.456	257.866.648
Obligasi	-	-	-	21.984.178.194	21.984.178.194
Total liabilitas	-	-	35.963.106	22.355.265.650	22.391.228.756

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Kelompok Usaha akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

**44. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Cash flows interest rate risk (continued)

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures. Measures taken by management in anticipation of interest rate risk is to evaluate by periodically comparing fixed rates to floating interest rates in line with relevant changes in interest rates in the market. Management also conducts a survey on banks to obtain an estimate of the relevant interest rates.

The following table presents the carrying amount by maturity of the Group's assets and liabilities exposed to interest rate risk as of December 31, 2019.

	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate		Suku bunga tetap/ Fixed interest rate		Total
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	
Assets					
Cash and cash equivalent	15.603.533.329	-	-	-	15.603.533.329
Short-term investments	-	-	2.259.297.400	-	2.259.297.400
Total assets	15.603.533.329	-	2.259.297.400	-	17.862.830.729
Liabilities					
Short-term bank loan	-	-	34.193.914	-	34.193.914
Long-term bank loan	-	-	12.000	114.978.000	114.990.000
Other long-term liabilities	-	-	1.757.192	256.109.456	257.866.648
Bonds	-	-	-	21.984.178.194	21.984.178.194
Total liabilities	-	-	35.963.106	22.355.265.650	22.391.228.756

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko Kredit (lanjutan)

Kelompok Usaha mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Kelompok Usaha dan melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur.

Kelompok Usaha memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, investasi jangka pendek, piutang usaha dan piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset lain-lain.

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018
Aset Keuangan		
Kas dan setara kas	15.603.553.329	18.018.671.479
Investasi jangka pendek	2.596.701.126	3.836.007.289
Piutang usaha - neto	848.025.482	789.953.354
Piutang lain-lain - neto	860.069.397	649.698.814
Pendapatan masih akan diterima	305.452.354	322.868.072
Aset lancar lainnya	10.253.126	6.139.521
Investasi jangka panjang	3.211.023.600	3.211.737.431
Aset tidak lancar lainnya	306.328.874	67.145.691
Total	23.741.407.288	26.902.221.651

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dapat terjadi dimana pendapatan jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek.

Mengingat bahwa kebutuhan dana Kelompok Usaha saat ini cukup signifikan sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, Kelompok Usaha terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai kebutuhan operasional Kelompok Usaha.

Selain itu, Kelompok Usaha juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penempatan dan penggalangan dana yang meliputi pinjaman bank, penerbitan ekuitas pasar modal dan ekuitas utang.

**44. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Credit Risk (continued)

The Group manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, providing limits or ceiling to a third party who will engage in credit trade with the Group and monitoring the outstanding trade receivables on a regular basis.

The Group is exposed to credit risk primarily from deposits with banks, short-term investments, trade and other receivables, accrued revenues and other assets.

Credit risk exposure relating to assets in the consolidated statements of financial position is as follow:

Financial Assets
Cash and cash equivalents
Short-term investments
Trade receivables - net
Other receivables - net
Accrued revenues
Other current assets
Long-term investment
Other non-current assets

Total

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk that occurs when short-term revenue cannot cover short-term expenditure.

Given that funding requirements of the Group are currently significant as a result of increased activity in development or expansion of business, in managing liquidity risk, the Group continues to monitor and maintain levels of adequacy of cash and cash equivalents to finance the operational needs of the Group.

In addition, the Group also regularly evaluates cash flow projections and actual cash to cope with the impact of fluctuations in cash flow, including the maturity schedule of long-term liabilities and continue to examine the condition of financial markets for placement and fund-raising initiatives, including bank loans, issuance of equity and debt securities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko Likuiditas

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Kelompok Usaha berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

	2019					
	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Jumlah/ Total	
Pinjaman bank jangka pendek	34.193.914	-	-	-	34.193.914	Short-term bank loan
Utang usaha	1.436.482.338	-	-	-	1.436.482.338	Trade payables
Beban akrual	2.274.726.626	-	-	-	2.274.726.626	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	295.199.785	-	-	-	295.199.785	Other short-term liabilities
Utang obligasi	-	-	-	22.241.600.000	22.241.600.000	Bonds payable
Pinjaman bank jangka panjang	12.000	114.978.000	-	-	114.990.000	Long-term bank loan
Liabilitas jangka panjang lainnya	1.757.192	256.109.456	-	-	257.866.648	Other Long-term liabilities
Total	4.042.371.855	371.087.456	-	22.241.600.000	26.655.059.311	Total

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Kelompok Usaha adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Kelompok Usaha mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimalkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Kelompok Usaha dan berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

Struktur permodalan Kelompok Usaha terdiri dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (terdiri dari modal saham, modal donasi, tambahan modal disetor, dan saldo laba dan penghasilan komprehensif lainnya).

**44. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Liquidity Risk

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments.

Capital management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Group manages its capital to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain a balance between the level of borrowing and the equity position to ensure optimal capital structure to reduce the cost of capital.

The capital structure of the Group consists of equity attributable to owners of the Parent (consisting of share capital, additional paid-in capital, retained earnings and other comprehensive income).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

**a) Perjanjian Konsesi - Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Penugasan kepada Perusahaan untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok, pada tanggal 31 Agustus 2012, Perusahaan mengadakan Perjanjian Pemberian Konsesi untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (Otoritas Pelabuhan) No. PP.001/1/1/OP.TPK-12 dan No. HK.566/15/11/PI.II-12 (Perjanjian Konsesi) dimana Otoritas Pelabuhan memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak Otoritas Pelabuhan dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku. Ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian Konsesi adalah sebagai berikut:

- Perjanjian Konsesi berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal dipenuhinya persyaratan dokumen teknis, dokumen finansial serta jaminan pelaksanaan oleh para pihak.
- Berdasarkan Perjanjian Konsesi, Perusahaan diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan pembangunan terminal Kalibaru kepada Otoritas Pelabuhan berupa bank garansi sebesar Rp37.000.000 dan berlaku sampai dengan 15 Januari 2019. Yang kemudian diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2027. Jaminan pelaksanaan tersebut dicatat oleh Perusahaan sebagai bagian dari akun "Aset tidak lancar lainnya" (Catatan 16).

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT**

**a) Concession Agreement - Tanjung Priok
Main Port Authority Office**

Based on Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 36 Tahun 2012 dated April 5, 2012 regarding Assignment to the Company to Build and Operate Kalibaru Terminal Tanjung Priok Port, on August 31, 2012, the Company entered into a Concession Agreement to Build and Operate Kalibaru Terminal Tanjung Priok Port with the Office of Tanjung Priok Main Port Authority (Port Authority) No. PP.001/1/1/OP.TPK-12 and No. HK.566/15/11/PI.II-12 (Concession Agreement) in which the Port Authority granted rights to the Company, including the right to execute the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of executing the project without limiting the right of Port Authority in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law. Important conditions in the Concession Agreement are as follows:

- *Concession Agreement is valid for 70 (seventy) years from the date of fulfillment of the required technical documents, financial documents, and performance bonds by the parties.*
- *Under the Concession Agreement, the Company is required to submit a performance bond for development of Kalibaru terminal to the Port Authority in the form of bank guarantee amounting to Rp37,000,000 and is valid until January 15, 2019. Which was extended until December 31, 2027. The performance bond is recorded by the Company as part of "Other non-current assets" (Note 16).*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**a) Perjanjian Konsesi - Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok (lanjutan)**

**a) Concession Agreement - Tanjung Priok
Main Port Authority Office (continued)**

- Perusahaan diwajibkan untuk membayar kepada Otoritas Pelabuhan berupa pendapatan konsesi sebesar 0,5% per tahun dari pendapatan kotor yang berasal dari operasi komersial terminal Kalibaru.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Konsesi, Perusahaan diharuskan untuk membangun:
 - Infrastruktur, termasuk pekerjaan pemecah gelombang, pekerjaan pengerukan, jalan akses, reklamasi dan dermaga.
 - Suprastruktur, termasuk *container terminal equipment, product terminal equipment, electrical mechanical dan information communications technology.*
 - Kapal dan fasilitas pendukung lainnya.
- Perusahaan berhak mengadakan kerjasama kemitraan, sewa dan perjanjian serupa lainnya dengan kontraktor, mitra kerjasama dan anak perusahaan yang didirikan serta pihak ketiga lainnya.
- Tarif awal yang akan diterapkan dalam area konsesi ditetapkan oleh Perusahaan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Penyesuaian tarif yang diterapkan dalam area konsesi dapat dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Perusahaan akan berkonsultasi dengan Otoritas Pelabuhan sehubungan dengan tarif sebelum diterapkan kepada pengguna jasa agar dapat memberikan kesempatan bagi Otoritas Pelabuhan untuk memberikan masukan.
- Perusahaan berhak atas kebijakannya sendiri untuk mengenakan dan memungut tarif area konsesi di dalam area konsesi.

- *The Company is required to pay to Port Authority, in form of concession revenues, 0.5% per annum of the gross revenue derived from the commercial operations in Kalibaru terminal.*
- *In accordance with the conditions of the Concession Agreement, the Company is required to build:*
 - *Infrastructure, including breakwater works, dredging works, access roads, reclamation and piers.*
 - *Superstructure, including container terminal equipment, product terminal equipment, electrical mechanical and information communications technology.*
 - *Vessels and other supporting facilities.*
- *The Company has the rights to enter into partnership cooperation, rental and similar agreements with contractors, partners and subsidiaries established as well as with other third parties.*
- *The initial rate applied in the concession area is set by the Company based on the type, structure and classification of rates set by the Minister.*
- *Adjustment on rate applied in the concession area can be made by the Company based on the type, structure and classification of rate set by the Minister.*
- *The Company will consult with the Port Authority regarding the rate before being applied to service users in order to provide opportunity for the Port Authority to provide advice.*
- *The Company by its own discretion has the right to impose and levy concession rate within the concession area.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**a) Perjanjian Konsesi - Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok (lanjutan)**

**a) Concession Agreement - Tanjung Priok
Main Port Authority Office (continued)**

- Perusahaan dapat memberikan wewenang kepada mitra kerjasama sehubungan dengan tarif area konsesi, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh Perusahaan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Pada akhir jangka waktu konsesi, Otoritas Pelabuhan akan mengadakan kerjasama pemanfaatan dan pengoperasian dengan Perusahaan selama 25 tahun yang akan dimulai segera setelah berakhirnya jangka waktu konsesi.
- Pada akhir jangka waktu konsesi, Perusahaan wajib:
 - Menyerahkan penguasaannya atas tanah reklamasi secara damai dan dalam keadaan kosong bersamaan dengan area konsesi dan infrastruktur area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan dan bebas dari setiap bentuk pembebanan.
 - Menyerahkan penguasaannya atas aset tidak bergerak yang dimiliki Perusahaan secara damai di dalam area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan dan bebas dari setiap bentuk pembebanan.
 - Aset bergerak dalam area konsesi yang dimiliki oleh Perusahaan, Perusahaan dapat memilih dengan kebijaksanaannya sendiri, untuk mempertahankan hak, kepemilikan dan kepentingan atas aset bergerak dengan memindahkan atau mengeluarkan aset bergerak tersebut dari area konsesi, atau dapat menawarkan aset bergerak tersebut untuk dibeli oleh Otoritas Pelabuhan dengan harga buku atau nilai wajar, yang mana lebih rendah.
 - Menyerahkan kepada Otoritas Pelabuhan seluruh dokumen terkait pengoperasian proyek.

- *The Company may authorize cooperation partners in connection with the rate within the concession area, with condition that the implementation of such authority must be approved by the Company and in accordance with applicable legislation.*
- *At the end of the concession period, the Port Authority will enter into a cooperation and operation with the Company for 25 years, which will begin immediately after the expiration of the concession.*
- *At the end of the concession period, the Company is obliged to:*
 - *Transfer the authorization of the reclamation land to the Port Authority in an empty condition and free of encumbrance, along with the concession area and concession area infrastructure free of any form of charges.*
 - *Transfer the authorization of the intangible assets of the Company to the Port Authority free of encumbrance within the concession area and free of any form of charges.*
 - *For movable assets owned by the Company within the concession area, the Company may choose with its own discretion, to retain the rights, title and interest in movable assets by moving or removing the movable assets from the concession area, or may offer the movable assets to be purchased by the Port Authority with book value or fair value, whichever is lower.*
 - *Transfer all documents related to the operation of the project to the Port Authority.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**a) Perjanjian Konsesi - Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok (lanjutan)**

**a) Concession Agreement - Tanjung Priok
Main Port Authority Office (continued)**

- Pada akhir jangka waktu konsesi, Perusahaan wajib: (lanjutan)
 - Mengalihkan atau menyebabkan dialihkannya kepada Otoritas Pelabuhan, kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.
 - Memindahkan atau mengeluarkan dari area konsesi semua aset bergerak yang ingin dipindahkan atau dikeluarkan oleh Perusahaan.

- At the end of the concession period, the Company is obliged to: (continued)
 - Transfer or effectively cause transfer of contracts made with third parties to the Port Authority.
 - Move or take out from the concession area all current assets which the Company decides to move or take out.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah melakukan pengeluaran (termasuk kapitalisasi biaya pinjaman) terkait pembangunan terminal Kalibaru tersebut masing-masing sebesar Rp8.905.704.192 dan Rp8.489.070.748 dan dicatat sebagai bagian dari akun "Aset takberwujud - aset hak konsesi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan (Catatan 15).

As of December 31, 2019 and 2018, the Company has made capital expenditures (including capitalization of borrowing cost) related to the construction of the Kalibaru terminal amounting to Rp8,905,704,192 and Rp8,489,070,748 and recorded them as part of "Intangible assets - concession rights assets" in the consolidated statements of financial position of the Company (Note 15).

**b) Perjanjian Pembangunan -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP)**

**b) Construction Agreement -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP)**

Pada tanggal 11 September 2012, Perusahaan mengadakan Perjanjian Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/17/2/PI.II-12, dengan PP yang kemudian diperpanjang dengan Perjanjian No. HK.566/19/11/PI.II-13 tanggal 6 Desember 2013. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

On September 11, 2012, the Company entered into Agreement of Constructing North Kalibaru Container Terminal Phase I Tanjung Priok Port No. HK.566/17/2/PI.II-12 with PP which was extended with Agreement No. HK.566/19/11/PI.II-13 dated December 6, 2013. The period of construction work is as follows:

- Pekerjaan Tahap 1A1 (0-450 meter) selama 27 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1A2 (451-850 meter), termasuk pekerjaan pengerukan untuk Dermaga 1A dan pengerukan Kolam A dan Kolam B sampai dengan -14 MLWS selama 34 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1B selama 50 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.

- Construction Phase 1A1 (0-450 meters) for 27 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.
- Construction Phase 1A2 (451-850 meters), including dredging work for Quay 1A and dredging Basin A and B up to -14 MLWS for 34 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.
- Construction Phase 1B for 50 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**b) Perjanjian Pembangunan -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (lanjutan)**

**b) Construction Agreement -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (continued)**

Pada tanggal 23 November 2015, Perusahaan dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II No. HK.566/23/11/1/PI.II-15 dimana mengatur perubahan diantaranya mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya seluruh pekerjaan menjadi sebagai berikut:

On November 23, 2015, the Company and PP agreed to enter into Additional Agreement (Addendum) II No. HK.566/23/11/1/PI.II-15 which changed among others period of work activities and total project cost to become as follows:

- Pekerjaan Tahap 1A1 (0-450 meter) selama 39 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1A2 (451-850 meter), termasuk pekerjaan pengerukan untuk Dermaga 1A dan pengerukan Kolam A dan Kolam B sampai dengan -14 MLWS selama 45 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Biaya seluruh pekerjaan menjadi sebesar Rp7.075.138.987 dan USD265.973.774 termasuk pajak pertambahan nilai.

- *Construction Phase 1A1 (0-450 meters) for 39 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.*
- *Construction Phase 1A2 (451-850 meters), including dredging work for Quay 1A and dredging Basin A and B up to -14 MLWS for 45 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.*
- *Total project cost to amount to Rp7,075,138,987 and USD265,973,774 including value added tax.*

Pada tanggal 28 November 2016, Perusahaan dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III No. HK.566/28/11/1/PI.II-16 dimana mengatur perubahan diantaranya mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi sebagai berikut:

On November 28, 2016, the Company and PP agreed to enter into Additional Agreement (Addendum) III No. HK.566/28/11/1/PI.II-16 which changed among others regarding period of work activities and total project cost to become as follows:

- Pekerjaan Tahap 1A1 (0-450 meter) ditetapkan selama 39 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1A2 (451-850 meter) ditetapkan selama 45 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan. Disamping itu, pekerjaan pengerukan untuk Dermaga 1A dan pengerukan Kolam A dan Kolam B sampai dengan -14 MLWS harus dilakukan pada tahap 1A, tetapi serah terima pekerjaan pengerukan tersebut dilakukan bersamaan dengan serah terima seluruh pekerjaan pengerukan.

- *Construction Phase 1A1 (0-450 meters) for 39 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.*
- *Construction Phase 1A2 (451-850 meters) for 45 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields. In addition, dredging work for Quay 1A and dredging Basin A and B up to -14 MLWS should be conducted on phase 1A, however the handover of dredging should be conducted simultaneously with the handover of whole dredging.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**b) Perjanjian Pembangunan -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (lanjutan)**

**b) Construction Agreement -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (continued)**

- Pekerjaan Tahap 1B ditetapkan selama 64 bulan sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) III ini berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.

- Construction Phase 1B for 64 months from the Minutes of Handover of Locations/Fields.
- The Additional Agreement (Addendum) III is effective from the day and date it is signed.

c) Perjanjian Asuransi Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kalibaru

c) Insurance Agreement on Construction and Development of Kalibaru Terminal

PPI telah mengadakan polis-polis asuransi sebagai berikut atas seluruh pekerjaan yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok yang berlaku selama masa konstruksi sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan 31 Mei 2019:

PPI has arranged the following insurance policies in respect of all works in connection with the construction and development of the infrastructures of the Kalibaru Terminal of the Tanjung Priok Port during the whole construction period from September 30, 2013 until May 31, 2019:

- Polis *Construction All Risks* dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ("Jasindo"), pihak berelasi, sebagai *insurer* utama dan batas pertanggungan sebesar USD2.425.000.000.
- Polis *Third Party Liability* dengan Jasindo sebagai *insurer* dan batas pertanggungan sebesar USD10.000.000 per peristiwa.
- Polis *Excess Third Party Liability* dengan PT Asuransi Astra Buana ("AAB") sebagai *insurer* dan batas pertanggungan sebesar USD40.000.000 per peristiwa atas kelebihan dari USD10.000.000 per peristiwa.
- Polis *Excess Third Party Liability* dengan AAB sebagai *insurer* dan batas pertanggungan sebesar USD40.000.000 per peristiwa atas kelebihan dari USD50.000.000 per peristiwa.

- *Construction All Risks* policy with PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ("Jasindo"), a related party, as the main insurer and limit of indemnity of USD2,425,000,000.
- *Third Party Liability* policy with Jasindo as the insurer and limit of indemnity of USD10,000,000 per one event.
- *Excess Third Party Liability* policy with PT Asuransi Astra Buana ("AAB") as the insurer and limit of indemnity of USD40,000,000 per one event in excess of the USD10,000,000 per one event.
- *Excess Third Party Liability* policy with AAB as the insurer and limit of indemnity of USD40,000,000 per one event in excess of the USD50,000,000 per one event.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**d) Perjanjian Pemegang Saham IPC TPK dan
STMS**

**d) Shareholders Agreement IPC TPK and
STMS**

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura (STMS) menandatangani Perjanjian Pemegang Saham untuk Terminal Petikemas 1 dan Perjanjian Perubahannya pada tanggal 11 September 2014 dimana IPC TPK dan STMS akan mendirikan perusahaan dengan jumlah saham sebesar 1.000 saham yang terbagi menjadi 510 saham seri A yang dimiliki IPC TPK dan 490 saham seri B yang dimiliki STMS. Perusahaan tersebut didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian sehubungan dengan pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas 1 dan kegiatan lain sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana disetujui oleh IPC TPK dan STMS.

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapore (STMS) signed a Shareholders Agreement for Container Terminal 1 and the Amendment Agreement on September 11, 2014, wherein IPC TPK and STMS will establish a company with total shares amounting to 1,000 shares comprising of 510 series A Shares held by IPC TPK and 490 series B Shares held by STMS. The company was set up to operate based on the Construction and Operation Agreement in connection with the operation and development of Container Terminal 1 and other activities in accordance with applicable law as agreed by IPC TPK and STMS.

Jika dalam suatu tahun buku, perusahaan tersebut memiliki laba yang tersedia untuk didistribusikan maka distribusi akan dilakukan pertama untuk STMS hingga pengembalian modal yang diperbolehkan telah tercapai dan kedua dibagikan secara proporsional kepada STMS dan IPC TPK sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing. Syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian.

If, in respect of any financial year, the company has profit available for distribution then distribution will be made first for STMS until permitted equity return has been achieved and secondly distributed proportionally to STMS and IPC TPK in accordance with their respective ownerships. Other term and conditions are stipulated in the agreement.

Kepemilikan saham IPC TPK pada perusahaan yang didirikan tidak diikuti dengan pengendalian dan karenanya laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan IPC TPK.

IPC TPK's ownership in the company established is not followed by control and therefore, the company's financial statements are not consolidated in the IPC TPK's financial statements.

Perusahaan yang didirikan sehubungan dengan perjanjian tersebut di atas bernama PT New Priok Container Terminal One berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014 (Catatan 1b).

The company established in relation to the above agreement namely PT New Priok Container Terminal One based on Deed No. 33 dated May 28, 2014 (Note 1b).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**e) Perjanjian Pinjaman - Sea Terminal
Management & Service Pte. Ltd., Singapura**

**e) Loan Agreement - Sea Terminal
Management & Services Pte. Ltd.,
Singapore**

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., (STMS) menandatangani Perjanjian Pinjaman dimana STMS memberikan fasilitas pinjaman kepada IPC TPK untuk kepentingan pembayaran Saham Seri A pada NPCT1 sebesar USD15.096.000 dengan tingkat bunga tahunan 7%.

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Services Pte. Ltd. (STMS) signed a Loan Agreement where STMS provides loan facilities to IPC TPK for the purpose of A Series Shares payments in NPCT1 amounting to USD15,096,000 with annual interest rate of 7%.

Fasilitas tersebut akan dibayarkan kembali melalui pengurangan modal pada NPCT1, dengan IPC TPK dan STMS sebagai pemegang sahamnya, dan dari dividen yang dapat dibagikan kepada IPC TPK. Seluruh bunga akan dibayarkan dari dividen IPC TPK.

The amount of the facility will be paid back through a reduction of capital in NPCT1, with IPC TPK and STMS as shareholders, and of dividends that can be distributed to IPC TPK. All interest will be paid from IPC TPK dividends.

Pada tanggal 11 September 2014, IPC TPK dan STMS menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman tertanggal 19 April 2014 untuk mengatur mengenai dilakukannya pembebanan bunga setiap tahun.

On September 11, 2014, IPC TPK and STMS signed the Agreement Amendments to the Loan Agreement dated April 19, 2014 regarding interests that was to be charged per annum.

Pada tanggal 10 November 2016, IPC TPK dan STMS menandatangani kesepakatan untuk merevisi tingkat bunga periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018 menjadi 0%.

On November 10, 2016, IPC TPK and STMS signed an agreement to revise interest rate for period from January 1, 2016 to December 31, 2018 to become 0%.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo pokok pinjaman ke STMS masing-masing sebesar USD15.096.000 dan dicatat sebagai bagian dari liabilitas jangka panjang lainnya.

As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding loan principal to STMS amounted to USD15,096,000 and recorded as part of other long-term liabilities account.

Pada tanggal 31 Desember 2018, IPC TPK dan STMS menandatangani kesepakatan untuk memperpanjang revisi tingkat bunga periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 menjadi 0%.

As of December 31, 2018, IPC TPK and STMS signed an agreement to revise interest rate for period from January 1, 2019 to December 31, 2020 to become 0%.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

f) Perjanjian Pelaksanaan Proyek - PPI

Perusahaan mendirikan PPI pada tanggal 5 November 2012 (Catatan 1b). Berdasarkan Surat Perusahaan No. TS.12/1/11/PI.II-13 tanggal 22 Februari 2013, Perusahaan menginstruksikan PPI untuk mempersiapkan dokumen perjanjian pengalihan (novasi) pekerjaan pembangunan Terminal Kalibaru dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku kontraktor dari Perusahaan kepada PPI. PPI juga diminta untuk menunjuk konsultan yang diperlukan dan pelaksanaan *advisory* yang saat ini dilaksanakan oleh Perusahaan akan dialihkan kepada PPI dimana pembebanan seluruh biaya konsultan diambil dari *proceed* yang akan diterima dari mitra Terminal Kalibaru. Perusahaan kemudian juga mengirimkan Surat No. KU.26/26/13/PI.II-13 tanggal 16 April 2013 yang menginstruksikan PPI agar segera memproses pekerjaan *Technical, Legal, Financial, Tax dan Insurance Advisor*.

Pada tanggal 30 Mei 2013, Perusahaan dan PPI menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Proyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 dan No. HK.566/5/20/PPI-13 ("PIA"), dimana Perusahaan memberikan kepada PPI hak untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok.

PIA berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Konsesi tertanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Perusahaan dengan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, yaitu selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal dipenuhinya persyaratan dokumen teknis, dokumen finansial serta jaminan pelaksanaan oleh Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Inilah yang menjadi dasar hukum PPI menandatangani COA (Catatan 45h).

f) Project Implementation Agreement - PPI

The Company established PPI on November 5, 2012 (Note 1b). Based on Letter of the Company No. TS.12/1/11/PI.II-13 dated February 22, 2013, the Company instructed PPI to prepare the documents for the assignment (novation) agreement on the construction work of Kalibaru Terminal from PT Pembangunan Perumahan (Persero) as the Company's contractor to PPI. PPI was also asked to appoint consultants as required and the implementation of advisory services which is currently under contracts with the Company shall be assigned to PPI in which the consultants' fees shall be taken from proceeds that will be received from the partner of Kalibaru Terminal. The Company then sent Letter No. KU.26/26/13/PI.II-13 dated April 16, 2013 in which it instructed PPI to process the *Technical, Legal, Financial, Tax and Insurance Advisor* works.

On May 30, 2013, the Company and PPI signed Project Implementation Agreement for Kalibaru Terminal, Tanjung Priok Port, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 and No. HK.566/5/20/PPI-13 ("PIA"), in which the Company granted to PPI the rights to develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port.

The PIA is valid until the expiration of the term of the Concession Agreement dated August 31, 2012 entered into between the Company and the Port Authority of Tanjung Priok Port, which is 70 (seventy) years from the date of fulfillment of the requirement on technical documents, financial documents and implementation guarantee by the Company and the Port Authority of Tanjung Priok Port. This is the legal basis on which PPI entered into the COA (Note 45h).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**f) Perjanjian Pelaksanaan Proyek - PPI
(lanjutan)**

Sesuai dengan PIA, Perusahaan dan PPI selanjutnya harus mengidentifikasi perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perusahaan dan pihak ketiga sehubungan dengan proyek untuk dinovasikan kepada PPI. Seluruh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian yang ada akan dinovasikan kepada PPI. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, proses novasi perjanjian tersebut masih belum terjadi.

**f) Project Implementation Agreement - PPI
(continued)**

In accordance with the PIA, the Company and PPI shall then identify the existing agreements signed by the Company and the third parties concerning the project implementation for assignment (novation) to PPI. All rights and obligations under the existing agreements will be novated to PPI. As of the date of completion of the consolidated financial statements, the novation process of these agreements have not yet occurred.

g) Perjanjian Pengelolaan Proyek - PPI

Pada tanggal 24 Februari 2014, Perusahaan dan PPI menandatangani Perjanjian Manajemen Proyek untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap 1 Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/24/2/PI.II-14 dan No. PPI-06-1-000495 ("PMA"), dimana Perusahaan menunjuk PPI untuk menangani manajemen proyek yang akan melaksanakan kontrak-kontrak pekerjaan pembangunan terminal Kalibaru, diantaranya manajemen proyek atas kontrak-kontrak pekerjaan konstruksi serta verifikasi dan evaluasi atas pembayaran pekerjaan konstruksi dan pengawasan. PMA berlaku sampai dengan selesainya proyek. Tidak ada keuntungan untuk PPI atas penyediaan jasa ini.

g) Project Management Agreement - PPI

On February 24, 2014, the Company and PPI signed Project Management Agreement on the Construction Work for the Kalibaru Utara Container Terminal Phase 1 at the Port of Tanjung Priok No. HK.566/24/2/PI.II-14 and No. PPI-06-1-000495 ("PMA"), in which the Company appointed PPI as a project management company to carry out the contractual works of Kalibaru terminal development, among others, the project management of construction works contracts and verification and evaluation on payment of construction and supervision works. The PMA is valid until the end of the project. There is no profit for PPI for providing this service.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1**

Berdasarkan PIA (Catatan 45f), pada tanggal 9 Juni 2014, PPI dan NPCT1, menandatangani Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas 1, Pelabuhan Priok Baru (COA) dimana PPI menunjuk NPCT1 untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Petikemas 1 selama jangka waktu sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah beroperasinya dermaga 850 meter dan NPCT1 harus melakukan pembayaran sewa di muka dan biaya sewa kuartalan kepada PPI.

Based on PIA (Note 45f), on June 9, 2014, PPI and NPCT1, entered into Construction and Operation Agreement - Container Terminal 1, New Priok Port (COA) through which PPI appointed NPCT1 to develop and operate Container Terminal 1 for the period of 25 (twenty five) years after the commencement of operation of 850 meters quay and NPCT1 shall pay advance site rent and quarterly site rent to PPI.

Pembayaran sewa di muka sebesar USD100.000.000 harus dibayarkan dalam beberapa tahap, yaitu USD30.000.000 setelah tanggal mulai COA, USD40.000.000 setelah penyerahan dermaga 450 meter dan USD30.000.000 setelah penyerahan dermaga 850 meter. Berdasarkan Perjanjian Perubahan Kedua terhadap COA tanggal 24 Desember 2014 ("SAA"), USD30.000.000 akan dibayarkan setelah penyelesaian area lapangan tambahan. PPI harus melakukan penyerahan dermaga 450 meter dan dermaga 850 meter kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 31 Juli 2015 dan 31 Desember 2015.

The advance rental fee of USD100,000,000 shall be paid in several stages, which consist of USD30,000,000 after the commencement date, USD40,000,000 after the handover of 450 meters quay and USD30,000,000 after the handover of 850 meters quay. Based on the Second Amendment Agreement to the COA dated December 24, 2014 ("SAA"), the final USD30,000,000 will be paid after the completion of additional yard area. PPI shall handover the 450 meters quay and the 850 meters quay to NPCT1 on July 31, 2015 and December 31, 2015, respectively.

Biaya sewa kuartalan harus dibayarkan pada awal setiap kuartal, yaitu sejumlah USD7.000.000 per kuartal untuk periode beroperasinya dermaga 450 meter sampai dengan beroperasinya dermaga 850 meter dan USD14.000.000 per kuartal untuk periode setelahnya.

The quarterly site rent shall be paid at the beginning of each quarter amounting to USD7,000,000 each quarter for the period after the commencement of operation of 450 meters quay up to the commencement of operation of 850 meters quay and USD14,000,000 each quarter for the period thereafter.

Pada tanggal 17 September 2014, PPI menerima pembayaran pertama atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD30.000.000 dari NPCT1.

On September 17, 2014, PPI received the first payment of advance rental fee amounting to USD30,000,000 from NPCT1.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

Penyerahan dermaga 450 meter tidak terjadi pada tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana tercantum dalam SAA. Pada tanggal 1 Agustus 2015, PPI menerima *Liquidated Damages Notice* dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan ini. Melalui surat tanggal 26 Agustus 2015, PPI menyampaikan bahwa keterlambatan penyerahan tidak mengakibatkan NPCT1 mengalami keterlambatan dalam melakukan konstruksinya sehingga hal tersebut bukan merupakan *Liquidated Damage Event*.

The handover of 450 meters quay did not occur on July 31, 2015 as stated in the SAA. On August 1, 2015, PPI received a Liquidated Damages Notice from NPCT1 in relation to the delay. Through a letter dated August 26, 2015, PPI responded by stating that the delay in handover did not cause a delay to NPCT1's construction hence it is not a Liquidated Damage Event.

Selain itu, penyerahan dermaga 850 meter yang seharusnya dilakukan pada tanggal 31 Desember 2015 dan pekerjaan pengerukan tertentu yang seharusnya diselesaikan PPI pada tanggal 31 Januari 2016, juga tidak terjadi. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, PPI tidak menerima *Liquidated Damages Notice* dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan tersebut.

In addition, the handover of 850 meters quay which should have occurred on December 31, 2015 and certain dredging works which should have been completed by PPI on January 31, 2016, did not occur as well. As of the date of completion of the consolidated financial statements, PPI has not received any Liquidated Damages Notice from NPCT1 in relation to these delays.

Dermaga 450 meter dan 850 meter telah diserahkan oleh PPI kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 23 Juni 2016 dan 16 Oktober 2016.

450 meters and 850 meters quays have been handed over by PPI to NPCT1 on June 23, 2016 and October 16, 2016, respectively.

Pada tanggal 24 Juni 2016, PPI menerima pembayaran kedua atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD40.000.000 dari NPCT1. Pada tanggal 31 Desember 2016, dermaga 850 meter belum mulai beroperasi sehingga pembayaran pertama dan kedua atas sewa diterima di muka masing-masing sebesar USD30.000.000 dan USD40.000.000 tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

On June 24, 2016, PPI received the second payment of advance rental fee amounting to USD40,000,000 from NPCT1. As of December 31, 2016, commencement of operation of 850 meters quay has not yet occurred hence first and second payment of advance site rent amounting to USD30,000,000 and USD40,000,000, respectively, are recorded as unearned revenue in the consolidated statement of financial position.

Pada tanggal 18 Agustus 2016, dermaga 450 meter telah mulai beroperasi secara komersial. Dengan demikian, pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, PPI telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan sebesar USD10.347.826 (setara dengan Rp137.742.143).

On August 18, 2016, 450 meters quay has started its commercial operation. Therefore, for the year ended December 31, 2016, PPI has recorded the revenue from quarterly site rent amounting to USD10,347,826 (equivalent to Rp137,742,143).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

Pada tanggal 13 Desember 2016, PPI dan NPCT1 menandatangani Surat Persetujuan dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

On December 13, 2016, PPI and NPCT1 signed a Letter of Acceptance which regulates items as follows:

- Penyediaan akses oleh PPI kepada NPCT1 atas area tertentu pada dermaga 850 meter;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasi komersial dermaga 450 meter, yaitu tanggal 18 Agustus 2016;
- Pemberitahuan Konfirmasi Pekerjaan Lokasi untuk Dermaga 850 Meter diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2016 dengan beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan;
- PPI akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:
 - Perkuatan sisi utara tanggal 16 Maret 2017;
 - Penyediaan dan pemasangan *variable speed water drive* dan *pressure tank* dan peralatan terkait tanggal 16 Maret 2017;
 - Pengerukan hingga kedalaman -16m LWS tanggal 31 Mei 2017;
 - Penyelesaian fase kedua dari area *common gate* tanggal 16 Oktober 2017;
 - Penyelesaian hal-hal penting yang belum diselesaikan yang diidentifikasi oleh ahli teknik independen tanggal 16 Maret 2017.
- Kesepakatan bahwa tanggung jawab pemeliharaan area infrastruktur konsesi akan menyesuaikan dengan laporan ahli teknik independen;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasional dermaga 850 meter paling lambat tanggal 16 Maret 2017;
- Jika *PPI Undertaking* belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, NPCT1 akan memperhitungkan pengurangan 25% dari pembayaran sewa kuartalan USD14.000.000 pada pembayaran sewa kuartalan berikutnya;

- *Provision of access to certain areas within 850 meters quay from PPI to NPCT1;*
- *Agreement on the date of commencement of operations of 450 meters quay, which was August 18, 2016;*
- *Site Works Confirmation Notice for 850 meters quay was issued on October 16, 2016 with note on certain outstanding works;*
- *PPI will complete the following works within the time specified for each item:*
 - *Strengthening of north side by March 16, 2017;*
 - *Supplying and installing variable speed water drive and pressure tank and associated equipment by March 16, 2017;*
 - *Dredging to a depth of -16m LWS by May 31, 2017;*
 - *Completion of the second phase of the common gate area by October 16, 2017;*
 - *Completion of major outstanding items identified by the independent engineer by March 16, 2017.*
- *Agreement that the maintenance responsibility of concession area infrastructure will be in accordance with the independent engineer's report;*
- *Agreement that the date of commencement of operations of 850 meters quay will be no later than March 16, 2017;*
- *If PPI Undertakings have not been completed on the predetermined dates, NPCT1 will be credited with 25% of quarterly site rent USD14,000,000 on the next payment of quarterly site rent;*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

- Jika terdapat salah satu *PPI Undertaking* belum diselesaikan pada tanggal 16 Oktober 2017, NPCT1 hanya akan melakukan pembayaran atas sewa kuartalan dermaga 450 meter, yaitu USD7.000.000 sampai dengan tanggal dimana seluruh *PPI Undertaking* telah diselesaikan.

- *If any one of the PPI Undertakings has not been completed by October 16, 2017, NPCT1 will pay quarterly site rent only on the 450 meters quay, which is USD7,000,000 until the date that all PPI Undertakings have been completed.*

Pada tanggal 16 Januari 2018, PPI dan NPCT1 menandatangani Nota Kesepakatan dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

On January 16, 2018, PPI and NPCT1 signed Memorandum of Agreement which regulates items as follows:

- PPI akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:
 - Jalan akses keluar sisi timur area CGA tanggal 15 Desember 2017;
 - Pengoperasian Go-live atas sistem IT tanggal 31 Desember 2017;
 - Pengoperasian Go-live OCR di CGA tanggal 31 Januari 2018;
 - Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi selatan di CGA tanggal 31 Januari 2018;
 - Jalan akses masuk di sisi barat CGA tanggal 28 Februari 2018;
 - Tambahan area buffer untuk parkir truk di sisi barat CGA tanggal 30 April 2018;
 - Penyediaan fasilitas untuk petikemas *reefer dan cooling room* tanggal 30 April 2018;
 - Pekerjaan perbaikan jalan akses keluar (lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA) tanggal 30 April 2018;
 - Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA tanggal 31 Mei 2018;
 - Penyediaan fasilitas inspeksi untuk mendukung kegiatan bea dan cukai di CGA tanggal 31 Maret 2019.
- Jika pekerjaan tersebut di atas belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, PPI akan dikenakan pembayaran terhadap setiap pekerjaan sebesar USD5.000/hari kerja.

- *PPI will complete the following works within the time specified for each item:*
 - *East area exit access road of CGA by December 15, 2017;*
 - *Go-live IT system operation by December 31, 2017;*
 - *Go-live OCR operation at CGA by January 31, 2018;*
 - *Reparation of behandle south side dockyard at CGA by January 31, 2018;*
 - *Entry access road west side CGA by February 28, 2018;*
 - *Additional buffer area for trucks park at west side of CGA by April 30, 2018;*
 - *Facility provision for reefer container and cooling room by April 30, 2018;*
 - *Reparation work of exit access road (north side behandle dockyard at CGA) by April 30, 2018;*
 - *Reparation of north side behandle dockyard at CGA by May 31, 2018;*
 - *Inspection facilities provision to support custom activities at CGA March 31, 2019.*
- *If the above works have not been completed on the predetermined dates, PPI will pay USD5,000/day for each work.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**45. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**45. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

- Kesepakatan dalam Surat Keputusan mengenai pengurangan pembayaran sewa dicabut.

- Agreement on Letter of Acceptance regarding reduction of rental payment has been waived.

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA

46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja

**a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas
Koja**

Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Koja antara Perusahaan dan HPI (Catatan 1b) mengatur syarat-syarat yang menjadi dasar operasional Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja).

The Master Cooperation Agreement between the Company and HPI (Note 1b) sets out the terms and conditions under which Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja) is operating.

Aspek keuangan penting yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk amandemennya adalah sebagai berikut:

The principal financial aspects of this Agreement including its amendments are as follows:

- Bagian investasi dari Partisipan yang dicantumkan dalam Perjanjian yang telah diubah adalah sebagai berikut:

- *The investment proportion of the Participants is specified in the revised Agreement as follows:*

Perusahaan	52,12%	Company
HPI	47,88%	HPI

- Nilai investasi dari kedua Partisipan tergantung pada audit atas investasi yang dilakukan oleh auditor independen.
- Aset tetap yang diserahkan oleh Partisipan untuk dipergunakan dalam operasional terminal dimiliki secara langsung oleh Partisipan dan dicatat dalam masing-masing pembukuannya.
- Partisipan berhak atas pengembalian dana penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh masing-masing Partisipan yang digunakan dalam operasi dan berhak menerima laba sesuai dengan investasi dari Partisipan.

- *Investments by the Participants are subject to audit by an independent auditor.*
- *Fixed assets provided by the Participants for use in the operations of the terminal are owned directly by the Participants and are recorded in their respective accounting records.*
- *The Participants are entitled to reimburse depreciation funds from fixed assets owned by the respective Participants used in operation and shall receive profit based on the investments made by the Participants.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

- Laba yang dapat dibagikan kepada Partisipan ditentukan setelah pengurangan biaya operasional, royalti, biaya bank dan dana penyusutan aset tetap dari pendapatan.
- Royalti akan dibayarkan kepada Perusahaan apabila arus petikemas tahunan yang dihasilkan melebihi target minimum tahunan yang ditetapkan.
- Jika ada pengeluaran modal baru, kedua belah pihak sepakat untuk membiayai belanja modal sesuai dengan persentase investasi Partisipan berdasarkan audit investasi tahun sebelumnya.
- Partisipan berhak untuk menerima dana penyusutan dan pembagian laba berdasarkan hasil audit investasi yang berlaku.

Pada tanggal 3 Juni 2014, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang ada di KSO TPK Koja, sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2013.

Pada tanggal 17 November 2014, auditor independen selesai dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2013. Para Partisipan menyetujui dan mendistribusikan sisa hasil investasi dari rekening escrow KSO TPK Koja, untuk tahun 2013 sebesar USD23,66 juta atau setara dengan Rp247,29 miliar untuk Perusahaan dan USD23,54 juta atau setara dengan Rp245,98 miliar untuk HPI pada bulan Desember 2014 (setelah memperhitungkan distribusi interim sebesar USD13,73 juta atau setara dengan Rp143,47 miliar untuk Perusahaan dan USD11,27 juta atau setara dengan Rp117,81 miliar untuk HPI pada bulan Februari 2014). Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2013 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

- Profit distributable to the Participants is determined by deducting operating expenses, royalties, bank administration charges and depreciation funds from revenue.
- Royalties will be paid to the Company if the annual container throughput exceeds the minimum annual target.
- If there are new capital expenditures, both parties agreed to finance the capital expenditures in accordance with the investment percentages of the Participants based on the prior year investment audit.
- The Participants have the right to receive depreciation funds and distribution of profit based on prevailing investment audit result.

On June 3, 2014, the Participants appointed an independent auditor to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of KSO TPK Koja's fixed assets in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2013 net income.

On November 17, 2014, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2013. The Participants approved and distributed the above outstanding return of investment from KSO TPK Koja's escrow account for the year 2013 of USD23.66 million or equivalent to Rp247.29 billion to the Company and USD23.54 million or equivalent to Rp245.98 billion to HPI in December 2014 (after considering interim distribution of USD13.73 million or equivalent to Rp143.47 billion for the Company and USD11.27 million or equivalent to Rp117.81 billion for HPI in February 2014). The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2013 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Pada tanggal 11 Juni 2015, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba TPK Koja tahun 2014.

Pada tanggal 15 Desember 2015, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2014 dimana para Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2014 sebesar USD6,56 juta atau setara dengan Rp77,97 miliar untuk Perusahaan dan USD9,17 juta atau setara dengan Rp108,91 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2014 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Pada tanggal 22 Agustus 2016, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2015.

Pada tanggal 18 November 2016, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2015 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2015 sebesar USD10,78 juta atau setara dengan Rp143,60 miliar untuk Perusahaan dan USD12,74 juta atau setara dengan Rp169,74 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2015 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Pada tanggal 27 Maret 2018, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2017 dan 2016.

46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

On June 11, 2015, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of TPK Koja's 2014 net income.

On December 15, 2015, the independent auditors has completed and released the investment audit report for the year 2014 whereby the Participants approved the outstanding return on investment for the year 2014 of USD6.56 million or equivalent to Rp77.97 billion for the Company and USD9.17 million or equivalent to Rp108.91 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for year 2014 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

On August 22, 2016, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2015 net income.

On November 18, 2016, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2015 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2015 of USD10.78 million or equivalent to Rp143.60 billion for the Company and USD12.74 million or equivalent to Rp169.74 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2015 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

On March 27, 2018, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2017 and 2016 net income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Pada tanggal 30 April 2018, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2017 dan 2016 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2017 dan 2016 sebesar USD19,43 juta dan USD14,54 juta atau setara dengan Rp263,27 miliar dan Rp195,31 miliar untuk Perusahaan serta USD21,81 juta dan USD19,28 juta atau setara dengan Rp295,53 miliar dan Rp259,10 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2015 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Pada tanggal 2 April 2019, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2018.

Pada tanggal 16 Agustus, 2019, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2018 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2018 sebesar AS\$10,11 juta atau setara dengan Rp140,48 miliar untuk Perusahaan dan AS\$9,64 juta atau setara dengan Rp134 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2018 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan HPI mengadakan Revisi atas Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Terminal Petikemas III Tanjung Priok (Revisi Perjanjian) dimana Perusahaan dan HPI sepakat untuk memperpanjang kerjasama pengoperasian Terminal Petikemas III Tanjung Priok sampai dengan tanggal 26 Maret 2039. Revisi Perjanjian ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Revisi Perjanjian tersebut, TPK Koja akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD8.750.000, sedangkan royalti tidak lagi dibayarkan oleh TPK Koja kepada Perusahaan.

46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

On April 30, 2018, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2017 and 2016 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2017 and 2016 of USD19.43 million and USD14.54 million or equivalent to Rp263.27 billion and Rp195.31 billion for the Company and also USD21.81 million and USD19.28 million or equivalent to Rp295.53 billion and Rp259.10 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2015 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

On April 2, 2019, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and the remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2018 net income.

On August 16, 2019, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2018 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2018 of US\$10.11 million or equivalent to Rp140.48 billion for the Company and US\$9.64 million or equivalent to Rp134 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2018 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

On August 5, 2014, the Company and HPI entered into a Revised Cooperation Agreement for the Management of Tanjung Priok Container Terminal III (Revised Agreement), whereby the Company and HPI agreed to extend the cooperation for operating Terminal Petikemas III Tanjung Priok until March 26, 2039. The Revised Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Revised Agreement, TPK Koja will have to pay quarterly rent fee amounting to USD8,750,000, while royalty will no longer be paid by TPK Koja to the Company.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan HPI telah melakukan perubahan terhadap Revisi Perjanjian di atas dimana pada akhir masa perjanjian, seluruh aset yang dimiliki HPI dan bagian HPI dalam aset bersama serta pekerjaan modal akan dialihkan kepada Perusahaan tanpa adanya pembebanan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD35.171.561 (setara dengan Rp503,26 miliar) dan USD35.146.601 (setara dengan Rp494,61 miliar).

Dalam Revisi Perjanjian tersebut, Perusahaan berhak memperoleh pembayaran premium sebesar USD50.000.000 dari HPI sehubungan dengan dilanjutkannya kerjasama antara Perusahaan dan HPI untuk pengelolaan TPK Koja. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah mencatat pendapatan yang berasal dari amortisasi premium masing-masing sebesar Rp27.735.417. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo yang belum di amortisasi atas premium tersebut adalah sebesar Rp540.840.625 dan Rp568.576.042 dan dicatat sebagai bagian dari akun pendapatan diterima di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

On June 22, 2015, the Company and HPI has amended the Revised Agreement mentioned above where at the end of the agreement period, all of the HPI's assets and HPI's interest in the joint assets and the capital works will be transferred to the Company free of encumbrances.

For the year ended December 31, 2019 and 2018, the Company has recorded the revenue from quarterly rent fee amounting to USD35,171,561 (equivalent to Rp503.26 billion) and USD35,146,601 (equivalent to Rp494.61 billion), respectively.

In the Revised Agreement, the Company has the right to obtain payment of premium amounting to USD50,000,000 from HPI in relation to the continuing cooperation between the Company and HPI for the management of TPK Koja. For the year ended December 31, 2019 and 2018, the Company has recorded revenue from amortisation of premium amounting to Rp27,735,417. As of December 31, 2019 and 2018, the balance of unamortized premium amounted to Rp540,840,625 and Rp568,576,042 and was recorded as part of unearned revenue account in the consolidated statements of financial position.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok ("Perjanjian Pemberian Kuasa") dimana Perusahaan menunjuk dan memberikan kuasa pada JICT untuk pengoperasian dan pemeliharaan properti yang telah dikuasakan (mencakup terminal kontainer, fasilitas pendukung terminal kontainer dan utilitas) sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian. Periode perjanjian adalah 20 (dua puluh) tahun sejak 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Sehubungan dengan pemberian kuasa kepada JICT tersebut, JICT akan membayar royalti kepada Perusahaan sebesar 10% dari pendapatan kotor terminal kontainer secara bulanan. Disamping itu, JICT juga akan membayar kepada Perusahaan atas sewa peralatan dan tenaga kerja yang ditempatkan Perusahaan di JICT.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan JICT mengadakan Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa - Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok (Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa) dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Pemberian Kuasa sampai dengan tanggal 26 Maret 2039. Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, JICT akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD21.250.000 (Catatan 46c), sedangkan royalti, sewa peralatan berupa 4 (empat) RTGC dan penempatan tenaga kerja tidak lagi dibayarkan oleh JICT kepada Perusahaan. Perjanjian jasa dan teknis "know how" yang terdapat pada Perjanjian Pemberian Kuasa akan diakhiri. Berdasarkan Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, kegiatan usaha dan aset Terminal 2 akan dialihkan dari JICT kepada Perusahaan (Catatan 46f). Berdasarkan Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, Perusahaan akan menerima pembayaran premium sebesar USD200.000.000 dari HPJ (Catatan 46e).

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

b) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT

On March 27, 1999, the Company and JICT entered into Authorization Agreement for The Operation and Maintenance of Container Terminal in Tanjung Priok Seaport ("Authorization Agreement") whereby the Company appointed and conferred authorization on JICT for the operation and maintenance of the authorization property (including container terminal, container terminal support facilities and utilities) as defined in the agreement. The authorization period is 20 (twenty) years from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement. In consideration of the granting of the authorization to JICT, JICT will pay monthly royalties to the Company calculated at 10% of the preceding month container terminal gross revenue. Moreover, JICT will also pay to the Company for equipment rental and Company's employee secondment in JICT.

On August 5, 2014, the Company and JICT entered into an Amended Authorization Agreement - Jakarta International Container Terminal, Port of Tanjung Priok (Amended Authorization Agreement), whereby the Company and JICT agreed to extend the Authorization Agreement until March 26, 2039. The Amended Authorization Agreement will commence on the date of the fulfillment of the last condition precedent. In consideration to the Amended Authorization Agreement, JICT will have to pay quarterly rent fee amounting to USD21,250,000 (Note 46c), while royalty, equipment rental of 4 (four) RTGCs and secondment of employee will no longer be paid by JICT to the Company. As for the technical "know-how" and services agreement in Authorization Agreement, they will be terminated. Based on the Amended Authorization Agreement, Terminal 2 assets and business will be transferred from JICT to the Company (Note 46f). Based on the Amended Authorization Agreement, the Company will receive payment of premium from HPJ amounting to USD200,000,000 (Note 46e).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT (lanjutan)

Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Perubahan terhadap Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa dimana jumlah premium yang dibayarkan oleh HPJ kepada Perusahaan diubah menjadi sebesar USD215.000.000. Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa ini perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diatur dalam surat Menteri Badan Usaha Milik Negara dan surat Menteri Perhubungan di bawah.

Pada tanggal 9 Juni 2015, Perusahaan menerima surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Kerjasama Pengelolaan/Pengoperasian JICT dan TPK Koja dimana Menteri Badan Usaha Milik Negara secara prinsip menyetujui rencana kerjasama usaha pengelolaan/pengoperasian JICT dan TPK Koja, dengan kepemilikan minimal di JICT sebesar 51%, dengan persyaratan sebagai berikut:

- Memperhatikan surat Menteri Perhubungan No. HK.201/3/4 Phb 2014 tanggal 18 September 2014, terkait dengan pemisahan fungsi operator dan regulator sesuai UU No. 17 Tahun 2008.
- Melaksanakan surat Wakil Menteri BUMN kepada Direktur Utama BUMN No. S-645/MBU/WK/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014 hal penyampaian Hasil Panja Aset BUMN dan Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait kerjasama BUMN.

Berdasarkan Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara tanggal 7 Januari 2016, Perusahaan diharuskan melakukan revisi terhadap Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa dimana Perusahaan perlu melakukan penyesuaian agar sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, revisi atas Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa belum selesai dilakukan.

46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT (continued)

On June 22, 2015, the Company and JICT entered into Amendment Agreement to the Amended Authorization Agreement which changed the amount of premium to be paid by HPJ to the Company amounting to USD215,000,000. The Amended Authorization Agreement needs to have adjustments to be in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Shipping as regulated in the letter of the Minister of State Owned Enterprise and letter of the Minister of Transportation below.

On June 9, 2015, the Company received a letter from the Minister of State Owned Enterprise regarding Cooperation of Management/Operation of JICT and TPK Koja whereas the Minister of State Owned Enterprise principally agrees with the plan of cooperation of JICT and TPK Koja management/operation, with minimum percentage of ownership of 51%, with requirements as follows:

- *To comply with the letter from Minister of Transportation No. HK.201/3/4 Phb 2014 dated September 18, 2014, related to the separation of operator and regulator functions in accordance with UU No. 17 Year 2008.*
- *To execute letter of Vice Minister of State Owned Enterprise to President Director of State Owned Enterprises No. S-645/MBU/WK/10/2014 dated October 9, 2014 regarding result of Assets Working Committee of SOE and Decision of Constitutional Court, especially related to State Owned Enterprises cooperation.*

Based on the Letter of Minister of Transportation of the Republic of Indonesia to the Minister of State Owned Enterprises dated January 7, 2016, the Company was directed to revise the Amended Authorization Agreement where the Company needs to make adjustments to be in accordance with Law No. 17 Year 2008. Until the completion of the consolidated financial statements, the revision on Amended Authorization Agreement has not been finished.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas lainnya – JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas ("Perjanjian Penggunaan") dimana Perusahaan mengizinkan dan memberikan hak kepada JICT untuk menggunakan dan menyewa properti berikut dengan semua perbaikan yang telah dilakukan oleh JICT sejak tanggal efektif Perjanjian Pemanfaatan. Atas pemberian hak Penggunaan oleh Perusahaan, JICT setuju untuk membayar biaya bulanan yang ditetapkan dalam Perjanjian tersebut, dihitung sebesar 5% dari pendapatan kotor.

Perusahaan tetap memiliki hak kepemilikan properti tersebut. Jangka waktu perjanjian adalah dua puluh tahun dari 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan JICT mengadakan Amandemen Perjanjian Penggunaan dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Penggunaan sampai dengan tanggal berakhirnya Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa. Amandemen Perjanjian Penggunaan ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Amandemen Perjanjian Penggunaan tersebut, JICT akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD21.250.000 sedangkan kompensasi 5% dari pendapatan kotor JICT tidak lagi dibayarkan oleh JICT kepada Perusahaan. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut sebesar Rp1.224.063.750 dan Rp1.191.912.500.

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

c) Utilization Agreement of Land Under HPL Owned by the Company, Port Facilities Building and Other Container Port Supporting Facilities - JICT

On March 27, 1999, the Company and JICT entered into an Agreement on Utilization of The HPL Land, Port Buildings Facility, and The Container Terminal Support Facility ("Utilization Agreement") whereby the Company granted and conferred the right to utilize and rent to JICT the properties together with all improvements held by JICT commencing from the effective date of the Utilization Agreement. In consideration of the granting of the utilization right by the Company, JICT agreed to pay a monthly fee defined in these Agreement, calculated at 5% of gross revenue.

The Company retained the rights of the ownership of the properties. The utilization period is twenty years from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement.

On August 5, 2014, the Company and JICT entered into an Amended Utilization Agreement whereby the Company and JICT agreed to extend the Utilization Agreement until the date of termination of Amended Authorization Agreement. The Amended Utilization Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Amended Utilization Agreement, JICT will have to pay quarterly rent fee to the Company amounting to USD21,250,000 while compensation of 5% of JICT's gross revenue will no longer be paid by JICT to the Company. For the year ended December 31, 2019 and 2018, the Company has recorded revenue from quarterly rent fee amounting to Rp1,224,063,750 and Rp1,191,912,500, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Amandemen Perjanjian Pemegang Saham – JICT

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan, HPJ, JICT dan Kopegmar mengadakan Amandemen Perjanjian Pemegang Saham dimana para pihak sepakat untuk melakukan penyesuaian kepemilikan saham sebagai berikut:

- Modal Dasar JICT ditingkatkan sejumlah 18.077.584 saham Seri B.
- Tambahan 18.059.505 lembar saham Seri B untuk Perusahaan.
- Tambahan 18.079 lembar saham Seri B untuk Kopegmar.

Atas penyesuaian kepemilikan ini, kepemilikan saham Perusahaan di JICT meningkat menjadi sebesar 50,9%. Amandemen Perjanjian Pemegang Saham ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Peningkatan kepemilikan saham Perusahaan di JICT belum efektif pada tanggal 31 Desember 2015 karena Perusahaan belum melakukan penyetoran tambahan modal dan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh JICT belum memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JICT tanggal 24 November 2015, para pemegang saham JICT setuju antara lain:

- Bergantung pada persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk meningkatkan modal dasar JICT dari Rp221.450.406 yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A dan 442.900.812 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham masing-masing Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp230.489.198 yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A dan 460.978.396 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham masing-masing Rp500 (nilai penuh).

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

d) Amended Shareholders Agreement - JICT

On August 5, 2014, the Company, HPJ, JICT and Kopegmar entered into an Amended Shareholder Agreement, whereby all parties agreed to adjust the shares ownership as follows:

- *Authorised Share Capital of JICT is adjusted by increasing 18,077,584 B series shares.*
- *Additional 18,059,505 B series shares for the Company.*
- *Additional 18,079 B series shares for Kopegmar.*

In consideration to the ownership adjustment, the Company's share ownership in JICT increased to 50.9%. The Amended Shareholder Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. The increase of the Company's ownership in JICT has not become effective as of December 31, 2015 since the Company has not paid the additional paid-in capital and the increase of JICT's authorised capital, issued and fully paid capital has not been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Based on the Circular Resolution of Shareholders in Lieu of An Extraordinary General Meeting of Shareholders of JICT dated November 24, 2015, the shareholders of JICT agreed among others:

- *Subject to approval from the Capital Investment Coordinating Board (BKPM), to increase JICT's authorized capital from Rp221,450,406 divided into 1 (one) A Series share and 442,900,812 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) to become Rp230,489,198 divided into 1 (one) A Series share and 460,978,396 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount).*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Amandemen Perjanjian Pemegang Saham - JICT (lanjutan)

- Bergantung pada persetujuan BKPM, untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh JICT dari Rp221.450.406 yang terbagi atas 442.900.812 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp230.489.198 yang terbagi atas 460.978.396 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh).
- Untuk tujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh JICT, agar diterbitkan 18.077.583 lembar saham Seri B sebesar Rp9.038.792 dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh) per lembar saham dengan proporsi sebagai berikut:
 - 18.059.505 lembar saham Seri B sebesar Rp9.029.752 akan diambil oleh Perusahaan.
 - 18.079 lembar saham Seri B sebesar Rp9.039 akan diambil oleh Kopegmar.

Pada tanggal 7 Desember 2015, BKPM telah menyetujui perubahan modal JICT tersebut di atas.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum melakukan penyeteroran atas tambahan setoran modal tersebut di atas. Di samping itu, peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut di atas belum memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) Amended Shareholders Agreement - JICT (continued)

- Subject to approval from BKPM, to increase JICT's issued and paid-up capital from Rp221,450,406 divided into 442,900,812 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) to become Rp230,489,198 divided into 460,978,396 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount).
- For the purpose of the increase of JICT's authorized, issued and fully paid capital, to issue 18,077,583 B Series shares amounting to Rp9,038,792 with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) with proportion as follows:
 - 18,059,505 B Series shares amounting to Rp9,029,752 will be subscribed by the Company.
 - 18,079 B Series shares amounting to Rp9,039 will be subscribed by Kopegmar.

On December 7, 2015, BKPM has already approved the above mentioned JICT's capital changes.

Until the completion of the consolidated financial statements, the Company has not paid the additional paid-in capital as mentioned above. Moreover, the increase of authorized capital and issued and paid up capital has not received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Perjanjian Pembayaran Premium - JICT

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan HPJ mengadakan Perjanjian Pembayaran Premium dimana HPJ sepakat untuk melakukan pembayaran premium kepada Perusahaan sebesar USD200.000.000 sebagai imbalan atas tetap dilanjutkannya kerja sama usaha patungan Perusahaan dengan HPJ. Perjanjian ini berlaku efektif pada saat setiap dari persyaratan pendahuluan pada Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa telah dipenuhi (Catatan 45b). Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan HPJ mengadakan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pembayaran Premium dimana jumlah premium yang dibayarkan oleh HPJ diubah menjadi sebesar USD215.000.000. Dalam keadaan tertentu dimana terjadinya pengakhiran secara lebih awal atas Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa, maka premium harus dibayarkan kembali oleh Perusahaan kepada HPJ secara pro-rata. Pada tanggal 2 Juli 2015, Perusahaan telah menerima pembayaran premium tersebut. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah mencatat pendapatan yang berasal dari amortisasi premium masing-masing sebesar Rp119.262.292. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo yang belum di amortisasi atas premium tersebut adalah sebesar Rp2.325.614.688 dan Rp2.444.876.979 dan dicatat sebagai bagian dari akun pendapatan diterima di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

f) Perjanjian Pengalihan Aset - JICT

Pada tanggal 14 Desember 2015, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Pengalihan Aset Terminal 2 dari JICT kepada Perusahaan dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk melakukan pengalihan aset-aset milik JICT yang terdapat di Terminal 2 kepada Perusahaan pada tanggal perjanjian ini. Atas pengalihan aset-aset tersebut, Perusahaan diharuskan melakukan pembayaran sebesar USD2.816.526, yang akan dibayarkan kepada JICT menggunakan mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 November 2015, yaitu sebesar Rp38.980.720. Pada tanggal 31 Desember 2019 Perusahaan belum melakukan pembayaran tersebut dan kewajibannya dicatat sebagai bagian dari akun liabilitas jangka pendek lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan (Catatan 21).

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

e) Premium Payment Agreement - JICT

On August 5, 2014, the Company and HPJ entered into a Premium Payment Agreement, whereby HPJ agreed to pay premium to the Company amounting to USD200,000,000 as consideration for continuing the joint venture of the Company with HPJ. The Premium Payment Agreement will commence on the date on each of the condition precedent in the Authorization Agreement has been satisfied (Note 45b). On June 22, 2015, the Company and HPJ entered into Amendment Agreement to Premium Payment Agreement in which the amount of premium to be paid by HPJ was amended to USD215,000,000. In certain circumstances leading to early termination of the Amended Authorization Agreement, the premium shall be repaid by the Company to HPJ using a pro-rate basis. On July 2, 2015, the Company has received payment of the premium. For the years ended

December 31, 2019 and 2018, the Company has recorded revenue from amortisation of premium amounting to Rp119,262,292, each year. As of December 31, 2019 and 2018, the balance of unamortized premium amounted to Rp2,325,614,688 and Rp2,444,876,979 and was recorded as part of unearned revenue account in the consolidated statements of financial position.

f) Assets Transfer Agreement - JICT

On December 14, 2015, the Company and JICT entered into Terminal 2 Assets Transfer from JICT to The Company Agreement where the Company and JICT agreed to transfer assets owned by JICT at Terminal 2 to the Company on the date of this agreement. For the transfer of the assets, the Company is obliged to make payment amounting to USD2,816,526, which will be paid to JICT in Rupiah using BI middle rate as of November 30, 2015, amounted to Rp38,980,720. As of December 31, 2019, the Company has not made the payment and the liability was recorded as part of other current liabilities account in the consolidated financial position of the Company (Note 21).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

- g) Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama pengendalian operasi dengan bentuk *Build, Operate and Transfer* (BOT) berupa Dermaga Nusantara II dengan PT Prima Nur Panurjwan selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai 2029 dengan total nilai kontribusi sebesar Rp262,98 miliar.
- h) Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama dengan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) untuk pengelolaan dan pengoperasian terminal serbaguna untuk melayani kapal barang/petikemas milik IKPP. Perjanjian tersebut meliputi pembayaran pendapatan jasa kapal dan barang dengan persentase yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal pengelolaan dan pengoperasian terminal yaitu paling lambat tanggal 15 April 1999, Penggunaan hasil reklamasi dikenakan tarif minimal sebesar 30% dari besaran tarif sesuai Kelompok Usaha yaitu sebesar Rp111,54 juta per tahun.
- i) Perusahaan memiliki Perjanjian Kerjasama Operasi dalam bentuk BOT (*Build, Operate and Transfer*) berupa Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Curah Kering di Pelabuhan Panjang dengan PT Inti Sentosa Alam Bahtera (PT ISAB). Perjanjian tersebut berlaku sejak 14 Mei 1992 hingga 13 Mei 2017.

Pada tanggal 13 Oktober 2011, jangka waktu perjanjian tersebut diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2022.

Pada saat perjanjian berakhir seluruh fasilitas Terminal Curah Kering seperti dermaga, gudang dan peralatan pelabuhan menjadi milik Perusahaan. Selain itu, selama masa perjanjian Perusahaan juga mendapatkan bagian pendapatan atas pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa bongkar muat dan penumpukan barang berdasarkan persentase tertentu.

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

- g) *The Company has a joint control and operation agreement in the form of Build Operate and Transfer (BOT) for Dermaga Nusantara II with PT Prima Nur Panurjwan for the period of 25 (twenty five) years commencing from 2005 to 2029 with contribution value amounting to Rp262.98 billion.*
- h) *The Company entered into Joint control entity agreement with PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) for managing and operating a multipurpose terminal that serves vessels/containers owned by IKPP. The agreement covers revenue from vessels and cargo service payments with certain agreed percentage. This agreement is effective for 30 (thirty) years from the date of terminal management and operation. On April 15, 1999, The minimum rate from land reclamation usage is 30% based on the appropriate rate of the Company or amounting to Rp111.54 million per annum.*
- i) *The Company entered into a Joint control entity agreement in the form of BOT (Build, Operate and Transfer) on Construction & Operation of Bulk Terminal at Port of Panjang with PT Inti Sentosa Alam Bahtera (PT ISAB). The agreement commenced since May 14, 1992 until May 13, 2017.*

On October 13, 2011, the term of the agreement was extended until May 13, 2020.

At the end of the agreement, all facilities for Bulk Terminal, such as dock, warehouses and port equipment will be owned by the Company. In addition, during the period of the agreement the Company receives a portion of income on the vessel services, cargo services and loading services based on a certain percentage.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

- j) Pada tanggal 2 Maret 2012, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) atas penggunaan bagian tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik Perusahaan sesuai Surat Perjanjian No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. Perjanjian ini mencakup pengelolaan tanah seluas 329.833 m² berlokasi di Jl. Sindang laut dan Jl. Raya Cilincing, Jakarta Utara dan berlaku selama 22 (dua puluh dua) tahun sampai dengan 31 Desember 2033.

Perjanjian kerjasama tersebut telah disetujui oleh Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-505/MBU/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Persetujuan Optimalisasi Tanah Perusahaan yang digunakan oleh Indofood.

Pendapatan yang diperoleh Perusahaan atas penggunaan lahan tersebut adalah sebesar Rp1.041.059.197 yang dibayar secara periodik selama 5 (lima) kali pembayaran dan pelunasan pembayaran ke 5 (lima) selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan setelah perjanjian ditandatangani. Perusahaan juga memperoleh pendapatan tambahan atas pengoperasian dermaga/jetty sebesar Rp104.260 per tahun yang dibayarkan setiap awal tahun selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah nota tagihan diterima oleh Indofood. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, jumlah pembayaran yang telah diterima oleh Perusahaan adalah sebesar Rp1.041.059.197. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo yang belum di amortisasi atas penggunaan bagian tanah HPL masing-masing adalah sebesar Rp276.168.033 Rp517.584.342 (sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2)).

- k) Berdasarkan Surat Perjanjian No. HK.566/7/16/c.Tpk-04 tanggal 27 Mei 2004, Perusahaan dan PT AKR Corporindo Tbk mengadakan perjanjian penggunaan bagian tanah HPL milik Perusahaan seluas 130.000 m² untuk digunakan sebagai tangki timbun untuk pelayanan barang-barang termasuk barang curah cair mudah terbakar (*flammable*) dan pembangunan jaringan pipa bawah laut yang melintasi alur kolam pengasinan dan sebelah selatan *breakwater*. Perjanjian ini berlaku selama 18 tahun sampai dengan 17 Mei 2021.

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

- j) On March 2, 2012, the Company entered into an agreement with PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) for the use of a parcel of land under Rights to Manage (HPL) owned by the Company with Agreement No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. The Agreement included land management with area of 329,833 m² which located at Jl. Sindang Laut and Jl. Raya Cilincing, North Jakarta and is valid for 22 (twenty two) years until December 31, 2033.

The agreement has been approved by the Minister of State Owned Enterprise through the letter No. S-505/MBU/2011 dated October 5, 2011 regarding Approval of Optimization of the Company's Land which is used by Indofood.

Revenue earned by the Company from the usage of land amounted to Rp1,041,059,197 and paid periodically for 5 (five) terms, the fifth payment will be settled at the latest 36 (thirty six) months after the agreement was signed. The Company also earned an additional revenue from jetty operations amounting to Rp104,260 annually which will be paid at the latest 7 (seven) work days after the invoice is received by Indofood. As of the date of the financial statements, the payment received by the Company amounted to Rp1,041,059,197. As of December 31, 2019 and 2018, the balance of unamortized use of a parcel of HPL land amounted to Rp276,168,033 and Rp517,584,342 respectively (before deducted by final income tax article 4(2)).

- k) Based on Agreement No. HK/566/7/16/c.Tpk-04 dated May 27, 2004, the Company and PT AKR Corporindo Tbk entered into agreement of usage of land under the HPL owned by the Company with land area of 130,000 m² to be used as storage tank for goods including flammable liquid and the construction of undersea pipeline which passes the salting basin and south breakwater. The agreement is valid for 18 years until May 17, 2021.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

Berdasarkan surat dari AKR tanggal 22 Oktober 2007 dan surat Direksi Perusahaan tanggal 7 November 2007, kedua pihak sepakat untuk mengadakan pengalihan penggunaan lahan dari AKR kepada entitas anaknya yaitu PT Jakarta Tank Terminal (JTT).

Perjanjian ini telah diubah beberapa kali terakhir berdasarkan addendum No. HK.566/14/9/C.Tpk-10 mengenai penggunaan ruang di bawah dasar laut alur kolam pengasinan dan sebelah selatan *break water* seluas 1.400 m² serta perubahan luas lahan menjadi 130.004 m².

l) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat

Petikemas dan kargo

Pada tanggal 12 Juni 2012, PTP dan beberapa Perusahaan Bongkar Muat (PBM) terseleksi mengadakan Perjanjian Kesepakatan Tingkat Layanan (SLA) dimana para pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat petikemas dan kargo pada wilayah kerja PTP.

Atas pelayanan yang telah dilakukan, PTP dan PBM akan mendapatkan bagi hasil pendapatan masing-masing sebesar 40% dan 60%, kecuali dengan PT PBM Olah Jasa Andal masing-masing sebesar 50% dan 50%.

Jangka waktu perjanjian adalah 14 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2015.

Jangka waktu perjanjian telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 dan tidak diperpanjang kembali dengan rincian sebagai berikut:

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

Based on a letter from AKR dated October 22, 2007 and letter from the Company's Director dated November 7, 2007, both parties agreed to transfer the usage of land from AKR to its subsidiary, PT Jakarta Tank Terminal (JTT).

This agreement has been amended several times, most recently based on addendum No. HK.566/14/9/C.Tpk-10 in relation of the usage of undersea salting basin and south breakwater with area of 1,400 m² and change of land area to 130,004 m².

l) Loading and Unloading Activities Cooperation

Container and cargo

On June 12, 2012, PTP and several Stevedoring Companies (PBM) entered into Service Level Agreement (SLA) whereas the parties agreed to perform loading and unloading activities for container and cargo in PTP's working area.

For the activities that have been performed, PTP and PBM will receive revenue sharing of 40% and 60%, respectively, except with PT PBM Olah Jasa Andal which is 50% and 50%, respectively.

The term of the agreement is from September 14, 2011 until September 13, 2015.

The term of the agreement was extended until March 31, 2018 and were not extended with details as follow:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

I) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat (lanjutan)

**I) Loading and Unloading Activities
Cooperation (continued)**

Petikemas dan kargo (lanjutan)

Container and cargo (continued)

No	Perusahaan/ Company	No. Perjanjian / Agreement No.	Wilayah kerja/ Work location	Jangka waktu/ Time period	Thruput minimum/ Minimum throughput
1	PT Mitra Sentosa Abadi	HK.566/16/3/16/ PTP-2018	Terminal III	01/01/18 - 31/03/18	-
2	PT Adipurusa	HK.566/16/3/5/ PTP-2018	Terminal II	01/01/18 - 31/03/18	-
3	PT Kaluku Maritama Utama	HK.566/16/3/15/ PTP-2018	Terminal II	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
4	PT Sarana Bandar Nasional	HK.566/16/3/11/ PTP-2018	Terminal II	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
5	PT Mitra Karunia Samudera	HK.566/16/3/14/ PTP-2018	Terminal I	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
6	PT Dwipa Hasta Utamaduta	HK.566/16/3/19/ PTP-2018	Terminal II	01/01/18 - 31/03/18	-
7	PT Tangguh Samudera Jaya	HK.566/16/3/18/ PTP-2018	Terminal III	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
8	PT Sarana Ultra Layanan Kargo	HK.566/16/3/1/ PTP-2018	Terminal I	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
9	PT Prima Nur Panurjwan	HK.566/16/3/3/ PTP-2018	Terminal III	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
10	PT Mahardi Sarana Tama	HK.566/16/3/17/ PTP-2018	Terminal II	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
11	PT Andhika Andalan Tama	HK.566/16/3/6/ PTP-2018	Terminal III	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
12	PT Daisy Mutiara Samudera	HK.566/16/3/9/ PTP-2018	Terminal III	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
13	PT Escorindo Stevedoring	HK.566/16/3/10/ PTP-2018	Terminal I	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
14	PT PBM Olah Jasa Andal	HK.566/16/3/4/ PTP-2018	Terminal III	01/01/18 - 31/03/18	-
15	PT Srikreasi Unggul Persada	HK.566/16/3/13/ PTP-2018	Terminal II	01/01/18 - 31/03/18	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

I) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat (lanjutan)

**I) Loading and Unloading Activities
Cooperation (continued)**

Petikemas dan kargo (lanjutan)

Container and cargo (continued)

Pada berbagai tanggal dari tanggal 19 April 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, PTP dan PBM mengadakan Berita Acara Kesepakatan (BAK) tentang SLA kerjasama pelaksanaan kegiatan usaha terminal sebagai berikut:

On various dates from April 19, 2018 until December 31, 2018, PTP and PBM entered into Minutes of Agreement (BAK) regarding SLA cooperation of terminal operating activities as follows:

No	Perusahaan/ Company	No. BAK/ BAK No.	Tanggal BAK/ Date of BAK	Wilayah kerja/ Work location	Jangka waktu/ Time period
1	PT Antho Tama	UM.339/19/4/2 2/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
2	PT Daisy Mutiara Samudra	UM.339/19/4/2 6/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
3	PT Escorindo Mitra Setia	UM.339/19/4/1 3/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
4	PT Escorindo Stevedoring	UM.339/19/4/2 4/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
5	PT Jasa Anugerah Samudera	UM.339/19/4/3 0/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
6	PT Kaluku Maritima Utama	UM.339/19/4/1 6/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
7	PT Karya Abadi Luhur	UM.339/19/4/2 5/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
8	PT Lapaniga Lintas Buana	UM.339/19/4/1 4/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
9	PT Mahardi Saranatama	UM.339/19/4/2 3/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
10	PT Mitra Karunia Samudera	UM.339/19/4/2 1/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
11	PT Sinar Berlian Indrapura	UM.339/19/4/1 2/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
12	PT Sarana Bandar Nasional	UM.339/19/4/1 7/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
13	PT Sinatra Dewa Samudra	UM.339/19/4/1 5/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
14	PT Sarana Ultra Layanan Kargo	UM.339/19/4/1 9/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
15	PT Srikreasi Unggul Persada	UM.339/19/4/2 0/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
16	PT PBM Tao Abadi Jaya	UM.339/19/4/3 2/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
17	PT Tangguh Samudera Jaya	UM.339/19/4/1 1/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

I) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat (lanjutan)

**I) Loading and Unloading Activities
Cooperation (continued)**

Petikemas dan kargo (lanjutan)

Container and cargo (continued)

No	Perusahaan/ Company	No. BAK/ BAK No.	Tanggal BAK/ Date of BAK	Wilayah kerja/ Work location	Jangka waktu/ Time period
18	PT Tubagus Jaya Maritim	UM.339/19/4/3 1/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
19	PT Dharma Lautan Nusantara	UM.339/28/5/8/ PTP-18	28 Mei 2018	Terminal I & II	1 Mei 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/May 1, 2018 until released date of SLA
20	PT Hemprisa Karyasaksama	UM.339/28/5/1/ PTP-18	28 Mei 2018	Terminal I & II	1 Mei 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/May 1, 2018 until released date of SLA
21	PT Terminal Jasa Maritim	UM.339/28/5/1/ PTP-18	28 Mei 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
22	PT Andhika Andalantama	UM.339/19/4/2 8/PTP-18	19 April 2018	Terminal I & II	1 April 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/April 1, 2018 until released date of SLA
23	PT Prima Bandar Samudera	UM.339/31/10/ 9/PTP-18	31 Oktober 2018	Terminal I & II	1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/October 1, 2018 until released date of SLA
24	PT Maritim Polykarya Tama	UM.339/30/11/ 13/PTP-18	30 November 2018	Terminal I & II	1 November 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/November 1, 2018 until released date of SLA
25	PT Roswell Pasific Indonesia	UM.339/30/11/ 2/PTP-18	30 November 2018	Terminal I & II	1 November 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/November 1, 2018 until released date of SLA
26	PT Sinar Citra Lestari	UM.339/30/11/ 5/PTP-18	30 November 2018	Terminal I & II	1 November 2018 sampai dengan tanggal penerbitan SLA/November 1, 2018 until released date of SLA

BAK tentang SLA kerjasama pelaksanaan kegiatan usaha terminal tersebut di atas tidak diperpanjang.

BAK regarding SLA cooperation of terminal operating activities as mentioned above were not extended.

Pada tanggal 1 November 2019, perjanjian-perjanjian antara PTP dan PBM tentang SLA kerjasama pelaksanaan kegiatan usaha terminal telah diperpanjang:

On November 1, 2019, the agreements between PTP and PBM concerning SLA in cooperation with the implementation of terminal business activities have been extended:

No	Perusahaan/ Company	No. Perjanjian / Agreement No.	Wilayah kerja/ Work location	Jangka waktu/ Time period	Thruput minimum/ Minimum throughput
1	PT Andhika Adidaya Samudra	PR.102/1/11/1/ OPS.TGP.PTP -19	Terminal I & II	04/01/19 - 31/12/19	47.500 ton per sembilan bulan/ ton per nine months
2	PT Andhika Andalantama	PR.102/1/11/1/ 5/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	348.087 ton per tahun/ton per year
3	PT Anugrah Firdaus Mandiri	PR.102/1/11/4/ OPS.TGP.PTP -19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	236.882 ton per tahun/ ton per year
4	PT Atho Tama	PR.102/1/11/6/ OPS.TGP.PTP -19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	15.747 ton per tahun/ ton per year
5	PT Buena Daya	PR.102/1/11/1/ 8/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/10/19 - 31/03/18	10.373 ton untuk 3 bulan/ton for 3 months
6	PT Citra Dermaga Perkasa	PR.102/1/11/1/ 9/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	432.000 ton per tahun/ton per year

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

I) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat (lanjutan)

**I) Loading and Unloading Activities
Cooperation (continued)**

Petikemas dan kargo (lanjutan)

Container and cargo (continued)

No	Perusahaan/ Company	No. Perjanjian / Agreement No.	Wilayah kerja/ Work location	Jangka waktu/ Time period	Thruput minimum/ Minimum throughput
7	PT Escorindo Stevedoring	PR.102/1/11/1 6/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/01/18 - 31/03/18	343.742 ton per tahun/ ton per year
8	PT Global Trans Servindo	PR.102/1/11/1 4/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	11.460 ton per tahun/ ton per year
9	PT Jasa Anugerah Samudera	PR.102/1/11/1 1/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	720.000 ton per tahun/ ton per year
10	PT Karya Abdi Luhur	PR.102/1/11/9/ OPS.TGP.PTP -19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	516.000 ton per tahun/ ton per year
11	PT Lapaniga Lintas Buana	PR.102/1/11/2/ OPS.TGP.PTP -19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	315.386 ton per tahun/ ton per year
12	PT Maritim Polykarya Tama	PR.102/1/11/1 0/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	108.332 ton per tahun/ ton per year
13	PT Meraseti Maritim Indonesia	PR.102/1/11/1 2/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	76.354 ton per tahun/ ton per year
14	PT Mitra Karunia Samudera	PR.102/1/11/2 1/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	497.858 ton per tahun/ ton per year
15	PT Mitra Multiguna Globalindo	PR.102/1/11/7/ OPS.TGP.PTP -19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	194.057 ton per tahun/ ton per year
16	PT Roswell Pasific Indonesia	PR.102/1/11/3/ OPS.TGP.PTP -19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	342.511 ton per tahun/ ton per year
17	PT Sarana Bandar Nasional	PR.102/1/11/2 0/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	448.972 ton per year/ ton per year
18	PT Sinar Berlian Indrapura	PR.102/1/11/8/ OPS.TGP.PTP -19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	329.219 ton per year/ ton per year
19	PT Sinar Citra Lestari	PR.102/1/11/1 3/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	168.283 ton per tahun/ ton per year
20	PT Sinatra Dewa Samudra	PR.102/19/12/ 1/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	398.368 ton per tahun/ ton per year atau/or 16.647 ekor per tahun
21	PT Srikreasi Unggul Persada	PR.102/1/11/5/ OPS.TGP.PTP -19	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	1.181.505 ton per tahun/ ton per year
22	PT Tama Sarana Development	PR.102/1/11/1 7/OPS.TGP.PT P-19	Terminal I & II	01/07/19 - 31/12/19	216.000 ton for 6 bulan/ ton for 6 months
23	PT Tubagus Jaya Maritim	TJM/001/06/01 /2020	Terminal I & II	01/01/19 - 31/12/19	1.290.256 ton per tahun/ ton per year

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

l) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat (lanjutan)

**l) Loading and Unloading Activities
Cooperation (continued)**

Kendaraan dan alat berat

Vehicles and heavy equipment

Pada tanggal 7 November 2013, PTP dan PBM terseleksi mengadakan SLA. Berdasarkan kesepakatan tersebut, para pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat kendaraan dan alat berat pada wilayah kerja PTP. Jangka waktu perjanjian adalah 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015.

On November 7, 2013, PTP and several selected PBM entered into SLA whereas the parties agreed to perform loading and unloading activities for vehicles and heavy equipment in PTP's working area. The term of the agreement was from December 3, 2011 until December 3, 2015.

Jangka waktu perjanjian telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2018. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, perpanjangan atas perjanjian-perjanjian tersebut masih dalam proses penyelesaian.

The term of the agreement was extended until March 31, 2018. Until the completion date of the consolidated financial statements, those agreement extension is still in process of completion.

No	Perusahaan/ Company	No. Perjanjian / Agreement No.	Wilayah kerja/ Work location	Jangka waktu/ Time period	Thruput minimum/ Minimum throughput
1	PT Sapta Kencana Buana	HK.566/16/3/8/ PTP-18	All terminal	01/01/18 - 31/03/18	13.004 ton per tahun/ton per year
2	PT Adimas Bahtera Harapan	HK.566/16/3/2/ PTP-18	All terminal	01/01/18 - 31/03/18	95.000 unit kendaraan per tahun/vehicles per year
3	PT Jaya Cargo Gemilang Indonesia	HK.566/16/3/7/ PTP-2018	All terminal	01/01/18 - 31/03/18	57.775 ton per tahun/ton per year
4	PT Triutama Karuna Samudera	HK.566/16/3/12/ PTP-2018	All terminal	01/01/18 - 31/03/18	59.667 ton per tahun/ton per year

Kendaraan dan alat berat (lanjutan)

Vehicles and heavy equipment (continued)

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut di atas, PTP berkewajiban untuk menyediakan dermaga tambatan dan fasilitas pendukungnya, termasuk lapangan dan gudang dan PBM berkewajiban menyediakan alat-alat, tenaga kerja dan/atau alat bantu bongkar muat serta peralatan lain yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat.

Based on the above mentioned agreements, PTP has obligation to provide dock and supporting facilities, including yard and warehouse and PBM has an obligation to provide equipment, workers and/or supporting equipment and other equipment needed to perform the loading and unloading activities.

Dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat, PBM berkewajiban memberikan thruput minimal yang jumlahnya disepakati para pihak.

In performing the loading and unloading activities, PBM has an obligation to provide minimum throughput which was agreed by the parties.

Reward dan penalti akan diberikan kepada PBM atas pencapaian thruput minimal per tahun, sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian.

Reward and penalty will be given to PBM for the achievement of the minimum throughput per year, as stipulated in the agreement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

m) Perjanjian Konsesi

Pada tanggal 11 November 2015, Perusahaan dan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (Otoritas Pelabuhan) telah menandatangani Perjanjian Konsesi tentang Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan yang Diusahakan oleh Perusahaan (Perjanjian Konsesi), yang telah diadendum tanggal 15 Juli 2016, yang mencakup pemberian hak dari Otoritas Pelabuhan kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan di area konsesi yang diusahakan oleh Perusahaan sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan Perjanjian Konsesi tersebut, Perusahaan diharuskan untuk membayar pendapatan konsesi yang diperoleh dari kegiatan usaha kepelabuhanan di area konsesi pada masing-masing pelabuhan kepada Otoritas Pelabuhan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak setiap 3 (tiga) bulan sebesar 2,5% dari pendapatan kotor dari pelaksanaan kegiatan usaha kepelabuhanan di area konsesi. Pada saat berakhirnya Perjanjian Konsesi ini, seluruh aset Perusahaan di dalam area konsesi, termasuk tanah yang berstatus hak pengelolaan atas nama dan/atau tanah yang tercatat sebagai aset Perusahaan, tetap menjadi aset dan hak pengelolaan dan/atau tanah Perusahaan.

n) Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik Jawa Timur

Pada tanggal 9 April 2015, IKT mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik Jawa Timur dengan PT Maspion Industrial Estate (MIE) dengan membentuk manajemen kerjasama operasi (MKO) Maspion Terminal Kendaraan Indonesia. Jangka waktu perjanjian adalah 25 tahun dengan porsi pendanaan IKT dan MIE masing-masing sebesar 45% dan 55%.

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

m) Concession Agreement

On November 11, 2015, the Company and Tanjung Priok Main Port Authority Office (Port Authority) has signed Concession Agreement regarding Operational Activities at Port that was operated by the Company (Concession Agreement), which has been amended on July 15, 2016, which includes granting rights from the Port Authority to the Company to perform operation on providing and/or servicing of port services on operated concession area in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Shipping. Based on the Concession Agreement, the Company is obliged to pay concession revenue obtained from the port operation at concession area on each port to Port Authority as Non-tax State Revenue every 3 (three) months amounting to 2.5% of gross revenue from port operation at concession area. At the end of Concession Agreement, all the Company's assets in the concession area, including landrights and/or land recorded as the Company's assets, will remain assets and landrights and/or land of the Company.

n) Construction and Operation of Car Terminal in Gresik Jawa Timur

On April 9, 2015, IKT entered into an Agreement of Construction and Operation of Car Terminal in Gresik Jawa Timur with PT Maspion Industrial Estate (MIE) by establishing joint operation management (MKO) Maspion Terminal Kendaraan Indonesia. The period of agreement is 25 years with the funding portion for IKT and MIE amounting to 45% and 55%, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

o) Perjanjian Konsesi - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak

Pada tanggal 12 Juli 2018, Perusahaan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak (Otoritas Pelabuhan Pontianak) mengadakan Perjanjian Konsesi tentang Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (Perjanjian Konsesi Kijing) dimana Otoritas Pelabuhan Pontianak memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan pembangunan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak beserta fasilitas pendukungnya pada area konsesi. Ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian Konsesi Kijing adalah sebagai berikut:

- Perjanjian Konsesi Kijing berlaku selama 69 (enam puluh sembilan) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Konsesi Kijing.
- Perusahaan diwajibkan untuk membayar kepada Otoritas Pelabuhan Pontianak berupa pendapatan konsesi sebesar 2,5% per tahun dari pendapatan kotor yang berasal dari operasi komersial terminal Kijing.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Konsesi, Perusahaan diharuskan untuk membangun:
 - Infrastruktur, termasuk jalan akses, dermaga, *trestle*, lapangan penumpukan dan fasilitas lainnya.
 - Suprastruktur, termasuk peralatan di terminal multipurpose, terminal petikemas, terminal curah kering dan terminal curah cair, *electrical mechanical* serta *information communications technology*.
 - Penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan di terminal Kijing Pelabuhan Pontianak.
- Lahan pada area konsesi akan diterbitkan HPL atas nama Otoritas Pelabuhan Pontianak dan HGB atas nama Perusahaan.
- Perusahaan berhak mengadakan kerjasama kemitraan dengan mitra kerjasama dan entitas anak Perusahaan.

46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

o) Concession Agreement - Port Authority Office Class II Pontianak

On July 12, 2018, the Company and Port Authority Office Class II Pontianak (Pontianak Port Authority) entered into a Concession Agreement of Construction and Operation of Port Services of Terminal Kijing Pontianak Port, West Kalimantan Province (Kijing Concession Agreement) in which the Pontianak Port Authority granted rights to the Company, including the right to execute construction and operation of port services as well as development of Kijing Terminal Pontianak Port including its supporting facilities in the concession area. Important provisions in the Kijing Concession Agreement are as follows:

- *Kijing Concession Agreement is valid for 69 (sixty nine) years from the signing date of the Kijing Concession Agreement.*
- *The Company is required to pay to Pontianak Port Authority, in form of concession revenues, 2.5% per annum of the gross revenue derived from the commercial operations in Kijing terminal.*
- *In accordance with the conditions of the Concession Agreement, the Company is required to build:*
 - *Infrastructure, including access roads, piers, trestle, dock yard and other facilities.*
 - *Superstructure, including equipment in multipurpose terminal, container terminal, dry bulk terminal and liquid bulk terminal, electrical mechanical and information communications technology.*
 - *Provision and maintenance of shipping navigation channel and port basin at Kijing Terminal Pontianak Port.*
- *Land in the concession area will be issued HPL under Pontianak Port Authority and HGB under the Company.*
- *The Company has the rights to enter into partnership cooperation with partners and subsidiaries of the Company.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**p) Perjanjian Konsesi - Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Kelas II Pontianak (lanjutan)**

- Tarif awal yang akan diterapkan dalam area konsesi ditetapkan oleh Perusahaan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Penyesuaian tarif yang diterapkan dalam area konsesi dapat dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Perusahaan berhak mengenakan dan memungut tarif jasa kepelabuhan di dalam area konsesi.
- Pada akhir jangka waktu konsesi, Perusahaan wajib menyerahkan seluruh aset di atas area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan Pontianak.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah melakukan pengeluaran (termasuk kapitalisasi biaya pinjaman) terkait pembangunan terminal Kijing tersebut masing-masing sebesar Rp1.879.783.067 dan Rp417.550.953 dan dicatat sebagai bagian dari akun "Aset takberwujud - aset hak konsesi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan (Catatan 15).

47. PERKARA HUKUM

- a) Permasalahan gugatan dari PT Artha Sempana meminta pembatalan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.128/HPL/DA/86 pada tanggal 18 Desember 1986 yang berisi pemberian HPL kepada Perusahaan atas tanah seluas 592.771 m2 di Pelabuhan Sunda Kelapa.

PT Artha Sempana menggugat Perusahaan dan Badan Pertanahan Nasional serta beberapa perseorangan yang diregister dengan No. 650/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan pokok gugatan pembatalan HPL atas tanah seluas 592.771 m2 di Pelabuhan Sunda Kelapa, ganti rugi materiil Rp10.000.000, dan ganti rugi immateriil Rp10.000.000. Berdasarkan Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sudah ada putusan inkraht dengan Putusan (Niet Ontvankelijke) atau gugatan tidak dapat diterima.

**46. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**p) Concession Agreement - Port Authority
Office Class II Pontianak (continued)**

- The initial rate applied in the concession area is set by the Company based on the type, structure and classification of rates set by the Minister.
- Adjustment on rate applied in the concession area can be made by the Company based on the type, structure and classification of rate set by the Minister.
- The Company has the right to impose and levy port services rate within the concession area.
- At the end of the concession period, the Company is obliged to transfer all assets within concession area to the Pontianak Port Authority.

As of December 31, 2019 and 2018, the Company has made capital expenditures (including capitalization of borrowing cost) related to the construction of the Kijing terminal amounting to Rp1,879,783,067 and Rp417,550,953, respectively and recorded them as part of "Intangible assets – concession rights assets" in the consolidated statements of financial position of the company (Note 15).

47. LAWSUIT

- a) Lawsuit Issue of PT Artha Sempana requested for cancellation of Decree of the Minister of Home Affairs No. 128/HPL/DA/86 dated December 18, 1986 regarding the granting of the Right to Operate (HPL) the land to the Company with area of 592,771 m2 in Port of Sunda Kelapa.

PT Artha Sempana sued the Company and National Land Agency also individuals which are registered Number 650/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., in Jakarta Utara District Court, with the principal lawsuit of cancelation of HPL of land with area of 592,771 m2 in Pelabuhan Sunda Kelapa, the material compensation of Rp10,000,000, and immaterial compensation of Rp10,000,000. Based on Jakarta Utara District Court Decision, the verdict stated *Niet Ontvankelijke* or rejecting the lawsuit from PT Artha Sempana.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

47. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- a) Permasalahan gugatan dari PT Artha Sempana meminta pembatalan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.128/HPL/DA/86 pada tanggal 18 Desember 1986 yang berisi pemberian HPL kepada Perusahaan atas tanah seluas 592.771 m2 di Pelabuhan Sunda Kelapa. (lanjutan)

Pada tahun 2019, PT Artha Sempana mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr dengan tambahan pokok gugatan yang meminta untuk dilakukan ganti kerugian terhadap lahan yang dikuasai oleh PT Arta Sempana apabila pihak Perusahaan ingin menguasai lahan tersebut.

Telah diterbitkan Surat Kuasa khusus dari Direktur Utama Perusahaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku Jaksa Pengacara Negara No. KP.20.04/23/4/1/LGI/UT/PI.II-19 tanggal 23 April 2019.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara hukum ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

- b) Gugatan dari Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal menuntut ganti rugi akibat perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Serikat Pekerja PT JICT mengajukan gugatan kepada PT JICT selaku Tergugat, Perusahaan selaku Turut Tergugat I, dan Hutchison Ports Ltd selaku Turut Tergugat II yang diregister dengan nomor perkara 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., dengan pokok gugatan menuntut pembatalan perpanjangan kerja sama pengelolaan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok antara Perusahaan dengan PT JICT, pengembalian rental fee oleh Perusahaan kepada PT JICT sebesar USD147.595.109 atau setara dengan Rp1.976.869.823, dan sita jaminan atas rekening bank milik Perusahaan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr pada amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

47. LAWSUIT (continued)

- a) *Lawsuit Issue of PT Artha Sempana requested for cancellation of Decree of the Minister of Home Affairs No. 128/HPL/DA/86 dated December 18, 1986 regarding the granting of the Right to Operate (HPL) the land to the Company with area of 592,771 m2 in Port of Sunda Kelapa. (continued)*

In 2019, PT Artha Sempana submitted a new lawsuit to the North Jakarta District Court with No. 194 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Utr with the addition of the principal lawsuit to request compensation to be made against the land held by PT Arta Sempana if the Company wishes to control the land.

A special Power of Attorney has been issued from the President Director of the Company to the Head of the North Jakarta District Attorney as State Attorney No. KP.20.04 / 23/4/1 / LGI / UT / PI.II-19 dated April 23, 2019.

As of the completion date of the consolidated financial statements, the lawsuit is still in process in the North Jakarta District Court.

- b) *Lawsuit filed by Labor Union of PT Jakarta International Container Terminal claiming compensation due to the extension of cooperation agreement on Terminal Petikemas in Pelabuhan Tanjung Priok.*

The Labor Union of PT JICT has filed a lawsuit to PT JICT as co-defendant I, and Hutchison Ports Ltd as co-defendant II as registered by Case Number 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., with principal issue to order cancelation of extension cooperation on Terminal Peti Kemas in Pelabuhan Tanjung Priok between the company and PT JICT, repayment of rental fee of the Company to PT JICT amounting to USD147,595,109 or equal to Rp1,976,869,823, and sequestration of Company's bank account. Until the completion date of this consolidated financial statements, this case is still in process in Jakarta Utara District Court.

The verdict of the North Jakarta District Court Number 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr stated that the lawsuit was not accepted, stating that the North Jakarta District Court was not authorized to examine and adjudicate this case.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

47. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- b) Gugatan dari Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal menuntut ganti rugi akibat perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. (lanjutan)

Pada tanggal 13 Maret 2018, SP JICT telah mengajukan banding dan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara tersebut masih dalam proses di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

- c) Gugatan dari Ir. Nuraini Udaya, Handara, S. Maryono, Doly Indra Nasution

Penggugat menyatakan bahwa Kantor Pertanahan mengakui adanya tumpang tindih HPL No.1 dan No.2 dengan tanah-tanah milik Penggugat (surat No.300.7-45/1/2010 tanggal 22 Januari 2010 Perihal Klarifikasi Status Tanah 565 Sertifikat Hak Milik dan Salinan Peta Lokasi Tanah yang terletak di Desa Pulo Ampel dan Desa Margasari Kec. Bojonegara Kabupaten Serang).

Penggugat mendalilkan bahwa kantor Pertanahan Kab. Serang telah salah mengeluarkan sertifikat HPL karena dianggap sudah mengetahui adanya sertifikat yang dimiliki oleh para Penggugat, sehingga dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusan Nomor 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT tanggal 23 April 2012 telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat.

Pada tanggal 14 Agustus 2012, Perusahaan telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut di atas ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan Nomor 634/PDT/2014/PT.DKI jo. 435/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut yang Amarnya pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT tanggal 23 April 2012.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara tersebut sedang pada tahap upaya Peninjauan Kembali (PK) dimana Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) menjadi kuasa dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

47. LAWSUIT (continued)

- b) Lawsuit filed by Labor Union of PT Jakarta International Container Terminal claiming compensation due to the extension of cooperation agreement on Terminal Petikemas in Pelabuhan Tanjung Priok. (continued)

On March 13, 2018, the JICT SP has filed an appeal and until the completion date of this consolidated financial statements, the case is still in process in DKI Jakarta High Court

- c) Lawsuit Filed by Ir. Nuraini Udaya, Handara, S. Maryono, Doly Indra Nasution

The Plaintiffs claimed that the Land Administration Office has admitted the existence of overlapping of HPL No. 1 and No. 2 with lands owned by the Plaintiffs (Letter No. 300.7-45/1/2010 dated January 22, 2010 regarding Clarifications on Status of Lands 565 Right of Ownership and copy of Land Location Map situated at Pulo Ampel Village and Margasari Village, Sub-District of Bojonegara, District of Serang).

Plaintiffs argued that Land Administration Office of Serang District has mistakenly issued HPL Certificate, on the ground that the Land Administration Office was deemed to have known the existence of certificates owned by the Plaintiffs. Therefore, the Land Administration Office has been categorized to have breached the law.

The North Jakarta District Court in their decision No. 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT dated April 23, 2012 has granted in part the lawsuit filed by the Plaintiffs.

On August 14, 2012, the Company has filed an appeal against the decision issued by the North Jakarta District Court as stated above to the DKI Jakarta High Court.

The DKI Jakarta High Court in their decision No. 634/PDT/2014/PT.DKI jo. 435/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut, strengthened the North Jakarta District Court decision No. 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT dated April 23, 2012.

Until the completion date of this consolidated financial statements, the lawsuit is at the stage of Judicial Review by Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) as the legal counsel of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

47. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- d) Perkara dengan No.182/Pdt.G/2016/PN.Plg., di Pengadilan Negeri Palembang terkait gugatan perdata dari PT Resources Alam Indonesia menuntut pembatalan Sertifikat HPL No.91/Sungai Selincah atas nama Perusahaan yang diklaim tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.100/Sei Selincah dan HGB No.101/Sei Selincah atas nama PT Susel Prima Permai (sekarang PT Resources Alam Indonesia) yang telah berakhir jangka waktunya.

Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusan No.182/Pdt.G/2016/PN.Plg., dalam amarnya menyatakan diantaranya sertifikat HPL No.91/Sungai Selincah atas nama Perusahaan cacat yuridis atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memerintahkan Perusahaan membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp25.000.000 per tahun sejak terbitnya sertifikat HPL No.91/Sungai Selincah sampai putusan berkekuatan hukum tetap, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap tanah sertifikat HPL No.91/Sungai Selincah seluas 23.500 m² di Desa Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sesuai Berita Acara Sita Jaminan pada tanggal 28 Februari 2017 dengan No.182/BA.Pdt.G/2016/PN.Plg.

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No.182/Pdt.G/2016/PN.Plg, telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.182/BA.Pdt.G/2016/PN.Plg. Perusahaan telah menempuh upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung yang telah didaftarkan pada tanggal 27 Februari 2018. MA dalam Putusan Kasasi No.2725K/PDT/2018 telah menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Perusahaan sehingga perkara dimenangkan oleh Perusahaan.

PT Resource Alam Indonesia telah mendaftarkan Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Agustus 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam hal ini Perusahaan sebagai Termohon Peninjauan Kembali I.

47. LAWSUIT (continued)

- d) Case with No.182/Pdt.G/2016/PN.Plg., in Palembang Public Court about civil suit from PT. Resources Alam Indonesia demanding the cancellation of the Right to Operate (HPL) certificates No. 91/Sungai Selincah registered under the name of the Company which is claimed to be overlapping with Right to Build (HGB) certificate No.100/Sei Selincah and HGB certificate No.101/Sei Selincah under the name of PT Susel Prima Permai (now PT Resources Alam Indonesia) which terms have terminated.

The Palembang District Court in Decision No.182 / Pdt.G /2016/ PN.Plg. In its ruling stated that among them were certificates of HPL No.91/Sungai Selincah registered under the name of the Company is a juridical defective or no binding legal force, ordering the Company to pay compensation to the plaintiff in the amount of Rp. 25,000,000 per year since the issuance of certificate of HPL No.91/Sungai Selincah until the decision has permanent legal force, declares valid and valuable confiscation of collateral that has been placed by the Palembang District Court on land of HPL certificate No.91/Selincah River covering an area of 23,500 m² in the Village Sungai Selincah, Kalidoni Subdistrict, Palembang City, according to the Official Record of Confiscation on February 28, 2017 with No.182/BA.Pdt.G/2016 / PN.Plg.

Appeal Decision of South Sumatera High Court No.182/Pdt.G/2016/PN.Plg has reinforced the Palembang State Court Decision No.182/BA.Pdt.G/2016/PN.Plg. The Company has filed a cassation to the Supreme Court registered on February 27, 2018.

Supreme Court on the Decision No. 2725K/PDT/2018 has granted the cassation request from the Company therefore the decision has favored the Company.

PT Resource Alam Indonesia registered the Judicial Review on August 12, 2019 at the Registrar of the Palembang State Court in this case the Company as the Respondent for Judicial Review I.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

47. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- e) Perkara dengan No.151/Pdt.G/2017/PN.Plg., di Pengadilan Negeri Palembang terkait gugatan perdata dari PT Resources Alam Indonesia yang menuntut pembatalan Sertifikat HPL No.88/Sungai Selincah atas nama Perusahaan yang diklaim tumpang tindih dengan Sertifikat HGB No.100/Sei Selincah atas nama PT Resources Alam Indonesia yang telah berakhir jangka waktunya.

Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusan No.151/Pdt.G/2017/PN.Plg., dalam amarnya menyatakan diantaranya menyatakan sertifikat HPL No.88/Sungai Selincah atas nama Perusahaan cacat yuridis atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memerintahkan Perusahaan membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp25.000.000 per tahun sejak terbitnya sertipikat HPL No.88/Sungai Selincah sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

Perusahaan telah menempuh upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan.

Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusan banding No.80/Pdt/2018/PT.Plg dalam amarnya telah menyatakan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.151/Pdt.G/2017/PN/Plg.

Perusahaan telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2018 dan telah menunjuk kuasa hukum untuk menangani perkara kasasi dimaksud.

Pada tanggal 13 Maret 2019 Perusahaan telah mengirimkan berkas hukum ke Mahkamah Agung sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, pihak perusahaan masih menunggu putusan kasasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

47. LAWSUIT (continued)

- e) Case with No.151/Pdt.G/2017/PN.Plg., in Palembang Public Court about civil suit from PT Resources Alam Indonesia demanded the cancellation of Right to Operate (HPL) certificate No.88/Sungai Selincah registered under the name of the Company which is claimed to be overlapped with HGB certificate No.100/Sei Selincah registered under the name of PT Resources Alam Indonesia which terms has been terminated.

The Palembang District Court in Decision No.151 / Pdt.G / 2016 / PN.Plg. in its ruling stated that among others certificates of HPL No.88 / Sungai Selincah registered under the name of the Company is a juridical defective or no binding legal force, ordering the Company to pay compensation to the plaintiff in the amount of Rp25,000,000 per year since the issuance of certificate of HPL No.88 / Sungai Selincah until the decision has permanent legal force..

The Company has filed an appeal to the South Sumatera High Court.

Palembang High Court on the appeal decision No.90/Pdt/2018/PT.Plg has decided to strengthen the Decision of Palembang State Court No.151/Pdt.G/2017/PN/Plg

The Company has proposed the cassation on October 23, 2018 and has appointed legal representatives to handle the cassation.

On March 13, 2019, the Company sent the legal file to the Supreme Court. Until the completion date of the consolidated financial statements, the company is still waiting for an cassation from the North Jakarta District Court.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

47. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- f) Permasalahan Hubungan Industrial dengan 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan Perusahaan yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan.

Terdapat 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan Perusahaan mengajukan pengunduran diri dari jabatan kepada Manajemen Perusahaan dikarenakan merasa sudah tidak sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh manajemen Perusahaan.

Atas dasar permohonan pengunduran diri dari jabatan tersebut, manajemen Perusahaan mengeluarkan surat persetujuan pengunduran diri sebagai karyawan Perusahaan kepada 33 (tiga puluh tiga) karyawan tersebut dengan dasar bahwa pengunduran diri dari jabatan tidak diatur di dalam Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta dalam Perjanjian Kerja Bersama.

Terhadap surat persetujuan dimaksud, kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Direksi tentang Pengakhiran Hubungan Kerja kepada masing-masing karyawan, namun demikian ada beberapa orang dari ke-33 orang karyawan tersebut yang mengajukan surat permohonan untuk dapat diangkat kembali sebagai karyawan dan 3 orang karyawan sudah diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan ke 30 (tiga puluh) karyawan tidak terima dengan keputusan Manajemen terkait Pengakhiran Hubungan Kerja, maka melalui kuasa hukumnya yakni Ihza & Ihza Lawfirm, mengirimkan somasi kepada Manajemen Perusahaan dan menuntut untuk dapat dipekerjakan kembali serta diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas somasi tersebut, manajemen Perusahaan melalui kuasa hukumnya (Kantor Hukum Kemalsjah & Associates) menolak somasi dimaksud.

Atas penolakan tersebut, kuasa hukum karyawan mendaftarkan penyelesaian tersebut di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara untuk tujuan mediasi.

Sehubungan dengan gagalnya mediasi ke 30 karyawan yang tidak menerima keputusan manajemen, 30 karyawan tersebut mendaftarkan gugatan industrial pada masing-masing wilayah kerja antara lain Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) DKI Jakarta, PHI Bandung, PHI Serang, PHI Jambi dan PHI Palembang.

47. LAWSUIT (continued)

- f) *Industrial Relations Issue with 33 (thirty three) employees of the Company who resigned from their position.*

There were 33 (thirty three) employees of the Company who rendered their resignation from their position to the management of the Company as they felt they were not in line with the policy undertaken by the Company's management.

In response to such resignation from the position, the management of the Company issued consent letters to those 33 (thirty three) employees for resignation as the employees of the Company on the basis that the resignation from the job position is not regulated in Law No. 13 of 2003 regarding Labor and the Collective Working Agreement.

As a follow up on the consents for resignation, Board of Directors' Decision Letters were issued regarding Employment Termination to each employee. However, there were several terminated employees out of those 33 (thirty three) employees who rendered request letters asking for rehiring as employees. Three employees have been rehired in accordance with the prevailing regulations.

As 30 (thirty) employees did not accept management decisions regarding employment termination, they sent a legal notice to the management of the Company through their legal counsel from Ihza & Ihza Law Firm, demanding for rehiring and receiving their rights in accordance with the prevailing regulations. In response to such legal notice, the management of the Company through their legal counsel from Kemalsjah & Associates Law Firm rejected the legal notice in question.

In response to such rejection, the employees' legal counsel applied for resolution to the case to the Transmigration and Manpower Office of North Jakarta for mediation purpose.

Following the failed mediation process with 30 employees that did not accept the management decision, the 30 employees submitted industrial lawsuit to Industrial Relations Court (PHI) DKI Jakarta, PHI Bandung, PHI Serang, PHI Jambi and PHI Palembang.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

47. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- g) PHI Jakarta dalam amarnya melalui surat Putusan No.114/PHI.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 23 Juli 2014 menyatakan bahwa hubungan kerja antara 23 mantan karyawan dan Perusahaan berakhir terhitung 22 Juli 2014 dan tergugat wajib membayar kepada 23 mantan karyawan dengan nilai sebesar Rp15.742.190.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601 K/Pdt.Sus-Phi/2014 tanggal 7 Januari 2015, menyatakan membatalkan putusan pengadilan Hubungan Industrial pada PN Jakarta Pusat, mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan hubungan kerja putus, mewajibkan kepada Perusahaan untuk membayar hak para Penggugat antara lain manfaat program pensiun, Uang Pisah sebesar 2x Gaji Merit dan bantuan uang pindah sebagaimana diatur dalam PKB.

Putusan PHI Palembang No. 14/Pdt.Sus/PHI/2014/PN.Plg tanggal 25 November 2014 dalam amar putusannya menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan Perusahaan berkewajiban membayar uang bantuan pindah sebesar Rp39.888. Atas putusan tersebut, penggugat mengajukan kasasi. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Mahkamah Agung dalam Putusan No.292 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 11 Juni 2015 telah menolak permohonan kasasi pekerja sehingga memenangkan Perusahaan.

Putusan PHI Bandung No. 121/Pdt/-Sus-PHI/2014/PN.BDG pada tanggal 20 Oktober 2014 dalam amar putusannya menyatakan menerima gugatan penggugat untuk sebagian, menghukum Perusahaan untuk mempekerjakan kembali para penggugat, membayar upah para penggugat sebesar Rp502.971. Atas putusan tersebut, Perusahaan menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No.138k/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 16 April 2015 telah menyatakan menerima permohonan kasasi dari Perusahaan, dan membatalkan Putusan PHI Bandung No.121/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg, sehingga memenangkan Perusahaan.

47. LAWSUIT (continued)

- g) *The PHI Jakarta through its Decision letter No. 114/PHI.G/2014/PN.JKT.PST dated July 23, 2014, stated that the work relation between the 23 ex-employees and the Company ended as of July 22, 2014 and the defendant was obliged to pay to the 23 ex-employees amounting to Rp15,742,190.*

Based on Decision of Supreme Court of Republic Indonesia No. 601 K/Pdt.Sus-Phi/2014 dated January 7, 2015 it was decided to reverse the court decision of the Jakarta Pusat District Court regarding industrial relations, to reject all the claims of the plaintiff to declare the termination of working relationship and to require the Company to pay the Plaintiff's right such as pension program benefit, severance payment amounting to 2x salary and relocation fund as regulated in PKB.

The PHI Palembang through its decision letter No. 14/Pdt.Sus/PHI/2014/PN.Plg dated November 25, 2014, rejected all the plaintiff claims and the Company was required to pay relocation cost of Rp39,888. Against the decision, the plaintiff filed a cassation to the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Until the completion date of this consolidated financial statements, this case is still in the cassation process at the Supreme Court. Until the completion date of this consolidated financial statements, Supreme Court has stated in Cassation Verdict No. 292 K/Pdt.Sus-PHI/2015 on June 11, 2015 to reject the appeal from Employee, thus declaring a win to the Company.

The PHI Bandung through its Decision letter No. 121/Pdt/-Sus-PHI/2014/PN.BDG dated October 20, 2014 partially granted the plaintiff claims, and punished the Company to rehire the plaintiffs, to pay the plaintiffs salaries amounting to Rp502,971. The Supreme Court through its Cassation Verdict No. 138k/Pdt.Sus-PHI/2015 on April 16, 2015 has stated to accept the appeal from the Company, and cancelled the Decision Letter of PHI Bandung No.121/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg, thus resulting in a win to the Company.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

47. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- h) Putusan PHI Jambi No. 13/G/2014/PHI/PN.Jmb tanggal 20 November 2014 dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menghukum Perusahaan untuk mempekerjakan kembali penggugat dan membayar upah penggugat sampai putusan Inkracht. Atas putusan tersebut, Perusahaan telah menempuh upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No.123 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 16 April 2015 telah menyatakan mengabulkan permohonan kasasi Perusahaan, dan membatalkan Putusan PHI Jambi No.13/G/2014/PHI.Jmb., sehingga memenangkan Perusahaan.

Putusan PHI Serang No. 49/PHI.G/2014/PN.Srg tanggal 26 November 2014. Dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menghukum tergugat untuk mempekerjakan kembali penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar upah penggugat sebesar 6 (enam) bulan upah sebesar Rp68.546. Perusahaan telah menempuh upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No.438K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 28 Agustus 2015 menyatakan mengabulkan permohonan kasasi Perusahaan, dan membatalkan Putusan PHI Serang No.49/PHI.G/2014/PN.Srg, sehingga memenangkan Perusahaan.

Dari 23 mantan karyawan tersebut terdapat 5 orang yang menempuh upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana perkara PK Nomor 115PK/Pdt.Sus-Phi/2018 namun pihak Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dan menghukum para pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.

47. LAWSUIT (continued)

- h) *The PHI Jambi through its Decision letter No. 13/G/2014/PHI/PN.Jmb dated November 20, 2014 partially granted the plaintiff claims, and ordered the Company to rehire the plaintiffs, to pay the plaintiffs salary until a binding decision is reached. The Supreme Court through its Cassation Verdict No.123 K/Pdt.Sus-PHI/2015 on April 16, 2015 has stated to accept the appeal from the Company, and cancelled the Decision Letter of PHI Jambi No. 13/G/2014/PHI.Jmb, thus resulting a win to the Company.*

The PHI Serang through its Decision letter No. 49/PHI.G/2014/PN.Srg dated November 26, 2014, partially granted the plaintiff claims, and punished the Company to rehire the plaintiffs, to pay the plaintiffs salary for 6 (six) months amounting to Rp68,546. The Supreme Court through its Cassation Verdict No. 438 K/Pdt.Sus-PHI/2015 on August 28, 2015 has stated to accept the appeal from the Company, and cancelled the Decision Letter of PHI Serang No. 49/PHI.G/2014/PN.Srg, thus resulting a win to the Company.

From 23 ex-employees five of them are preparing Judicial Review with case number 115PK/Pdt.Sus-Phi/2018. However, the Supreme Court rejected the request for reconsideration and sentenced the petitioners to pay the reconsideration examination fee of Rp2,500.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn No.14 tanggal 26 Maret 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan diantaranya menetapkan perubahan nomenklatur serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/
Independen

Moermahadi Soerja Djanegara

Komisaris Independen

Suaidi Marasabessy

Komisaris

Kushari Suprianto

Komisaris

Montty Giriana

Komisaris

D. Andhi Nirwanto

Komisaris

Djadmiko

Komisaris

R. Agus H. Purnomo

Direksi

Direktur Utama

Arif Suhartono

Wakil Direktur Utama

Hambra

Direktur Komersial

Rima Novianti

Direktur Teknik

Dani Rusli Utama

Direktur Operasi

Muarip

Direktur Keuangan

Yon Irawan

Direktur SDM dan Umum

Ihsanuddin Usman

Direktur Transformasi dan

Ogi Rulino

Pengembangan Bisnis

- b) Setelah tanggal pelaporan, terdapat ketidakpastian terhadap kondisi makro ekonomi baik di Indonesia maupun global yang terutama disebabkan oleh virus Covid-19. Operasi Kelompok Usaha telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran virus Covid-19 yang dimulai di Cina dan kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Kondisi ini berdampak pada menurunnya secara signifikan operasi dan kondisi keuangan Kelompok Usaha. Efek masa depan dari merebaknya virus Covid-19 terhadap Indonesia dan Kelompok Usaha masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan Kelompok Usaha.

48. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

- a) Based on The Decree of The Minister of SOEs No. SK-69/MBU/03/2020 which stated on Notarial Deed Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No.14 dated March 26 2020, The Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders (GMS) of The Company stipulated as follows:

Board of Commissioners

President/Independent

Commissioner

Independent Commissioner

Commissioner

Commissioner

Commissioner

Commissioner

Commissioner

Directors

President Director

Vice President of Director

Director of Commercial

Director of Engineering

Director of Operations

Director of Finance

Director of HR and General Affairs

Director of Transformation and

Business Development

- b) After the reporting date, there was uncertainty on the macro-economic condition both in Indonesia and global which mainly due to impact of Covid-19 virus. The Group operation has and may continue to be impacted by the outbreak of Covid-19 virus which started in China and subsequently spread to other countries including Indonesia. This condition has affected the significant decreased in the Group's operation and financial condition. The future effects of the outbreak of Covid-19 virus to Indonesia and the Group are unclear at this time. A significant rise in the number of Covid-19 virus infections or prolongation of the outbreak may affect Indonesia and the Group.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**48. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

- c) Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

**48. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

- c) On March 31, 2020, the Government issued a Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2020 which stipulates, among others, reduction to the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishments entities from previously 25% to become 22% for fiscal years 2020 and 2021 and 20% starting fiscal year 2022 and onwards, and further reduction of 3% for corporate income tax payers that fulfill certain criteria.

49. INFORMASI SEGMENT

Informasi yang menyangkut segmen usaha Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

49. SEGMENT INFORMATION

Information concerning the Company's business segments is as follows:

31 Desember/December 31, 2019

	Operasi Kepelabuhanan/ Port Operation	Jasa Lainnya/ Other Services	Total Sebelum Eliminasi/ Before Elimination	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan operasi segmen						Segment operating revenues
Pendapatan operasi eksternal	10.054.866.623	1.086.885.602	11.141.752.225	-	11.141.752.225	External operating revenues
Pendapatan operasi antar segmen	3.627.525.315	27.156.463	3.654.681.779	(3.654.681.779)	-	Inter-segment operating revenues
Total pendapatan operasi segmen	13.682.391.938	1.114.042.065	14.796.434.004	(3.654.681.779)	11.141.752.225	Total segment operating revenues
Beban operasi	(10.862.669.461)	(1.164.951.377)	(12.027.620.837)	3.507.263.164	(8.520.357.673)	Operating expenses
Pendapatan operasi lainnya - neto	720.320.596	51.672.366	771.992.962	(54.878.448)	717.114.514	Other operating income - net
Laba usaha					3.338.509.066	Operating income
Pendapatan keuangan	832.477.623	3.782.489	836.260.112	-	836.260.112	Finance income
Beban keuangan	(1.196.139.389)	(17.046.345)	(1.213.185.734)	12.948.645	(1.200.237.089)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	979.956.870	-	979.956.870	(739.388.528)	240.568.343	Equity in income of associates and joint control entity - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					3.215.100.432	Income before final tax and corporate income tax
Beban pajak final	(505.944.961)	(3.747.530)	(509.692.491)	-	(509.692.491)	Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan badan					2.705.407.941	Income before corporate income tax
Pajak penghasilan badan						Corporate income tax
Kini	(240.416.714)	(19.500.340)	(259.917.054)	-	(259.917.054)	Current
Tangguhan	39.603.470	18.715.991	58.319.461	-	58.319.461	Deferred
Laba tahun berjalan					2.503.810.348	Income for the year
Posisi keuangan						Financial position
Aset segmen	58.538.271.418	1.351.814.560	59.890.085.978	(7.849.486.244)	52.040.599.734	Segment assets
Liabilitas segmen	37.864.505.082	933.846.256	38.798.351.338	(4.883.962.382)	33.914.388.956	Segment liabilities
Penyusutan dan amortisasi segmen	(803.880.502)	(59.825.118)	(863.705.620)	-	(863.705.620)	Segment depreciation and amortization

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen usaha Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

49. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Company's business segments is as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2018						
	Operasi Kebutuhan/Port Operation	Jasa Lainnya/ Other Services	Total Sebelum Eliminasi/Total Before Elimination	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan operasi segmen						Segment operating revenues
Pendapatan operasi eksternal	10.410.223.653	1.026.477.241	11.436.700.894	-	11.436.700.894	External operating revenues
Pendapatan operasi antar segmen	3.262.402.694	4.160.570	3.266.563.264	(3.266.563.264)	-	Inter-segment operating revenues
Total pendapatan operasi segmen	13.672.626.347	1.030.637.811	14.703.264.158	(3.266.563.264)	11.436.700.894	Total segment operating revenues
Beban operasi	(10.193.660.949)	(959.616.637)	(11.153.277.586)	3.110.722.766	(8.042.554.820)	Operating expenses
Pendapatan operasi lainnya - neto	(214.188.922)	94.303.039	(119.885.883)	(76.474.693)	(196.360.574)	Other operating income - net
Laba usaha					3.197.785.500	Operating income
Pendapatan keuangan	681.864.210	7.050.090	688.914.300	-	688.914.300	Finance income
Beban keuangan	(1.120.125.705)	(13.526.311)	(1.133.652.016)	2.870.000	(1.130.782.016)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	1.677.185.749	-	1.677.185.749	(1.300.985.155)	376.200.594	Equity in income of associates and joint control entity - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					3.132.118.378	Income before final tax and corporate income tax
Beban pajak final	(344.088.410)	(13.024.812)	(357.113.222)	-	(357.113.222)	Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan badan					2.775.005.156	Income before corporate income tax
Pajak penghasilan badan						Corporate income tax
Kini	(344.085.965)	(9.895.803)	(353.981.768)	-	(353.981.768)	Current
Tangguhan	(4.516.972)	14.203.439	9.686.467	-	9.686.466	Deferred
Laba tahun berjalan					2.430.709.854	Income for the year
Posisi keuangan						Financial position
Aset segmen	59.489.560.988	1.184.698.666	60.674.259.654	(9.241.382.631)	51.432.877.023	Segment assets
Liabilitas segmen	39.839.642.559	667.223.706	40.506.866.265	(5.508.445.561)	34.998.420.704	Segment liabilities
Penyusutan dan amortisasi segmen	(713.497.663)	(59.861.617)	(773.359.280)	-	(773.359.280)	Segment depreciation and amortization

Informasi yang menyangkut segmen geografis Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

Information concerning the Company's geographical segment is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Pendapatan Operasi			Operating Revenues
Tanjung Priok	8.426.347.509	9.666.180.682	Tanjung Priok
Panjang	431.012.354	332.388.938	Panjang
Banten	505.505.646	327.697.066	Banten
Palembang	442.335.533	283.449.657	Palembang
Teluk Bayur	353.339.199	250.570.236	Teluk Bayur
Pontianak	366.080.664	187.996.098	Pontianak
Bengkulu	179.902.032	129.757.069	Bengkulu
Cirebon	207.846.157	101.044.253	Cirebon
Sunda Kelapa	56.554.487	56.606.751	Sunda Kelapa
Jambi	107.477.694	56.168.698	Jambi
Pangkal Balam	46.383.534	36.573.146	Pangkal Balam
Tanjung Pandan	18.967.416	8.268.300	Tanjung Pandan
Total	11.141.752.225	11.436.700.894	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen geografis Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

49. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Company's geographical segment is as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Aset tidak lancar			Non-current asset
Tanjung Priok	26.115.731.872	22.411.760.752	Tanjung Priok
Banten	1.175.481.901	1.086.484.236	Banten
Panjang	798.291.930	711.492.393	Panjang
Teluk Bayur	660.756.402	657.751.014	Teluk Bayur
Pontianak	454.415.947	466.828.200	Pontianak
Bengkulu	456.746.282	443.924.137	Bengkulu
Palembang	387.199.459	371.103.634	Palembang
Jambi	278.532.863	248.972.474	Jambi
Cirebon	233.309.650	226.987.094	Cirebon
Pangkal Balam	122.095.269	116.236.840	Pangkal Balam
Sunda Kelapa	103.639.466	103.637.404	Sunda Kelapa
Tanjung Pandan	40.377.652	33.362.716	Tanjung Pandan
Total	30.826.578.693	26.878.540.894	Total

50. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

50. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Movement of liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flows are as follows:

	Non- arus kas/Non-cash flow				31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange difference	Lainnya/ Others		
Pinjaman bank jangka pendek	4.000.000	30.193.914	-	-	34.193.914	Short-term bank loans
Utang bank	-	114.990.000	-	-	114.990.000	Bank loans
Utang obligasi	22.890.166.969	-	(905.988.776)	-	21.984.178.193	Bonds payable
Dividen	(653.968.052)	(832.742.000)	-	653.968.052	(832.742.000)	Dividend
Total	22.240.198.917	(687.558.086)	(905.988.776)	653.968.052	21.300.620.107	Total